

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

OPOSISI TAN MALAKA TERHADAP KABINET SJAHRIR

(1945 - 1947)



Oleh :

Sri Aryanti

NIM : 85 214038

NIRM : 85 5027260127

JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH DAN GEOGRAFI SOSIAL

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

IKIP SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

1991

**OPOSISI TAN MALAKA TERHADAP KABINET SJAHRIR
(1945 - 1947)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**

Oleh :

Sri Aryanti

NIM : 85 214038

NIRM : 85 5027260127

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH DAN GEOGRAFI SOSIAL
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

1991

S k r i p s i

Oposisi Tan Malaka Terhadap Kabinet Sjahrir

(1945 - 1947)

Oleh

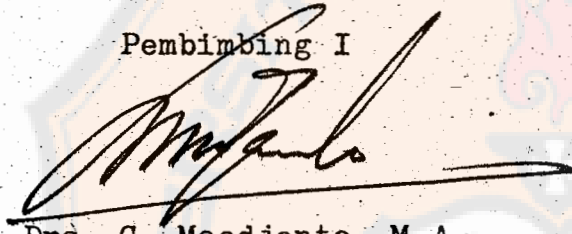
Sri Aryanti

NIM: 85 214038

NIRM: 85 5027260127

telah disetujui oleh:

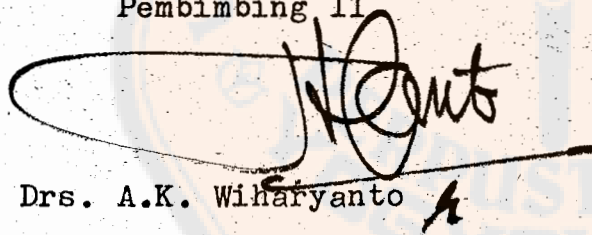
Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

tanggal 5/10/91.....

Pembimbing II



Drs. A.K. Wiharyanto

tanggal

S K R I P S I

OPOSISI TAN MALAKA TERHADAP KABINET SJAHRIR

(1945 - 1947)

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Sri Aryanti

NIM: 85 214038

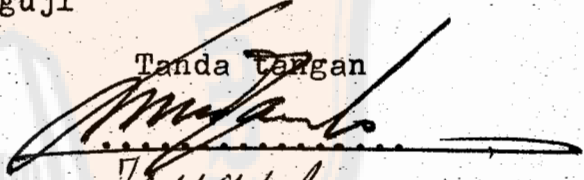
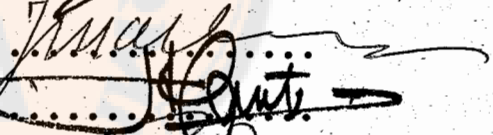
NIRM: 85 5027260127

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

pada tanggal ..17 SEPTEMBER.. 19 91....

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda Tangan
Ketua	DRS. G. MOEDJANTO, M.A.	
Sekretaris	DRS. J. MARKISWO	
Anggota	DRS. A.K. WIHARTANTO	
Anggota	DRS. JI ADISUSILO	
Anggota		

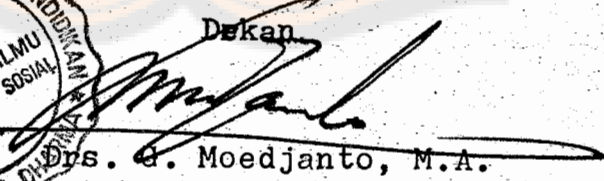
Yogyakarta, 11 Oktober.. 19 91..

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

IKIP Sanata Dharma



Dekan


DRS. G. Moedjanto, M.A.

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur yang tak terhingga ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat serta hidayat dariNya, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi yang berjudul Oposisi Tan Malaka terhadap Kabinet Sjahrir (1945-1947) ini, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.

Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan, saran serta bimbingan kepada:

1. Ibu dan Ayahanda serta saudaraku sekalian, yang senantiasa memberikan dorongan hingga selesainya penulisan Skripsi ini.
2. Bp. Drs. G. Moedjanto, M.A. sebagai dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.
3. Bp. Drs. A.K. Wiharyanto sebagai dosen pembimbing.
4. Bp. Drs. S. Adisusilo sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.
5. Ibu Kepala Perpustakaan IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta beserta segenap karyawan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bapak Kepala Perpustakaan Negara Yogyakarta, beserta segenap karyawannya.
7. Bapak Kepala Perpustakaan Islam Yogyakarta, beserta segenap karyawannya.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada Yogyakarta beserta karyawannya.
9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyusun Skripsi ini.

Penulis berharap semoga amal kebajikan dari pihak tersebut di atas mendapatkan balasan yang setimpal dariNya.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan, maka dari itu penulis menerima dengan senang hati saran dan kritik yang membangun. Namun demikian penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, Amiin.

Yogyakarta, 19 ...

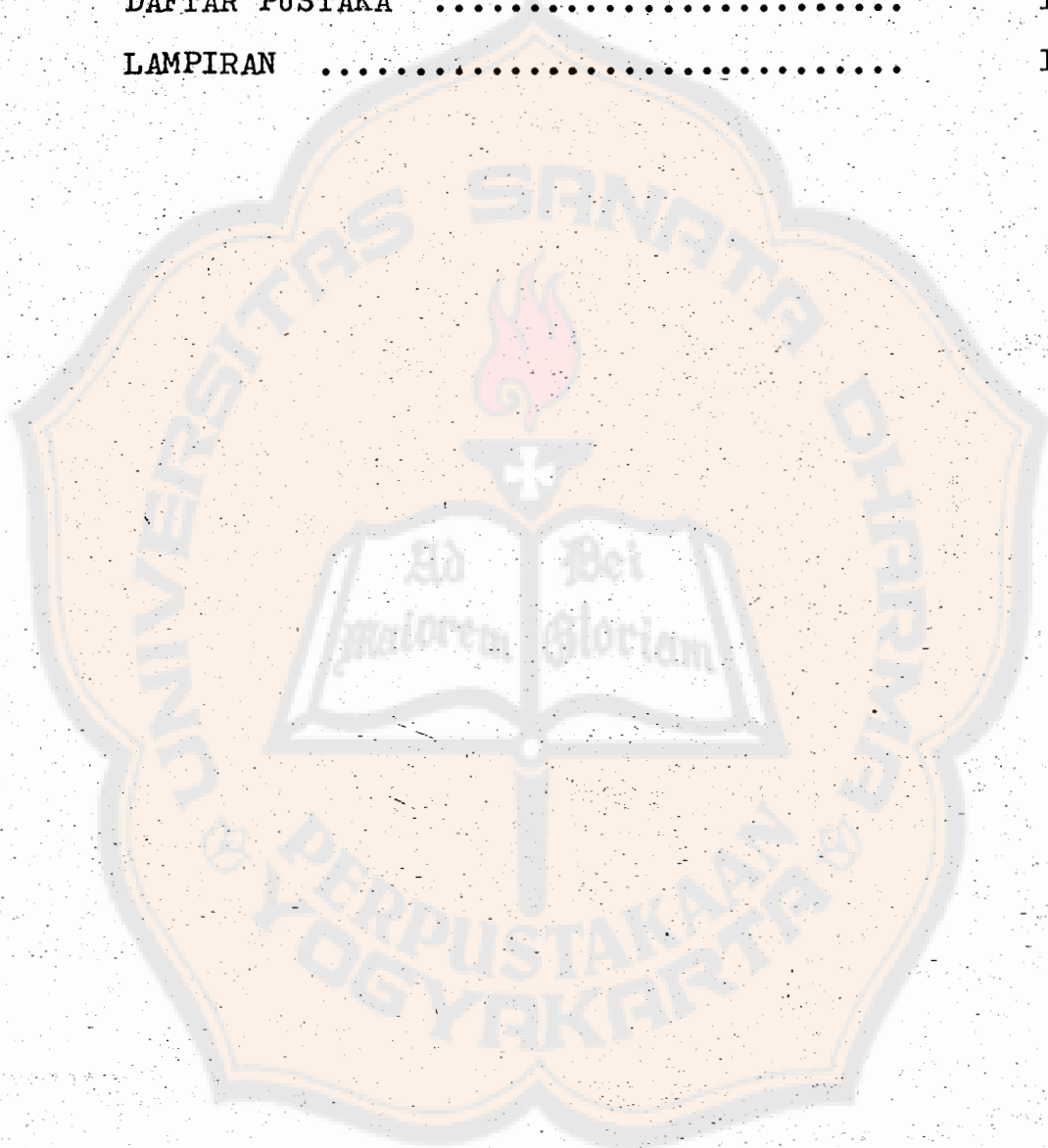
Penulis

(Sri Aryanti)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II. SITUASI POLITIK SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN	11
A. Masa Menjelang Proklamasi	11
B. Masa Pembentukan KNIP Hingga Kabinet Presidensiil	28
C. Masa Kedatangan Sekutu Hingga Terbentuknya Kabinet Parlementer	38
BAB III. BERDIRINYA PERSATUAN PERJUANGAN	50
A. Peranan Tan Malaka dalam Persatuan Perjuangan	50
B. Program Persatuan Perjuangan	50
BAB IV. OPOSISI PERSATUAN PERJUANGAN TERHADAP KEBIJAKSA- NAAN KABINET SJAHRIK DALAM MENGHADAPI BELANDA	81
A. Oposisi Persatuan Perjuangan Masa Kabinet Sjahrir I	81
B. Oposisi Persatuan Perjuangan Masa Kabinet Sjahrir II	96

	Halaman
C. Oposisi Persatuan Perjuangan Masa Kabinet Sjahrir III	116
BAB V. KESIMPULAN	134
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	144



ABSTRAK

Skripsi yang diberi judul Oposisi Tan Malaka terhadap Kabinet Sjahrir (1945-1947) ini bermaksud menyajikan salah satu peristiwa Sejarah Nasional Indonesia pada masa revolusi Kemerdekaan Indonesia. Ada pun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk mengungkap kembali peristiwa sejarah, sehingga akan memperjelas pengertian kita mengenai oposisi yang dilakukan oleh golongan yang tidak setuju terhadap kebijaksanaan yang ditempuh Kabinet Sjahrir dalam menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Dalam menjalankan kebijaksanaan diplomasi terhadap Belanda itu Sjahrir mengalami banyak rintangan, baik dari kalangan rakyat Indonesia sendiri maupun dari pihak lawan diplomasinya yaitu Belanda. Para pemuda yang semula mendukungnya, sehingga ia menempati posisi terpenting di dalam negara Republik Indonesia yang baru lahir yaitu menjadi Perdana Menteri, akhirnya terpaksa menghentikannya karena Sjahrir meneruskan politik diplomasi yang telah dirintis kabinet pendahulunya. Sedangkan pihak Belanda sebagai lawan politik diplomasi Sjahrir, bukanlah pihak yang bermain dengan jujur. Banyak kecurangan-kecurangan dan ke-licikan yang dilakukannya selama perundingan berlangsung, yang seharusnya tidak boleh dilakukannya. Bahkan karena kecurangan dan ke-licikan Belandalah Sjahrir nanti akhirnya jatuh dari kursi kepemimpinannya.

Para golongan penentang kebijaksanaan politik pemerintah Republik terhadap Belanda pada masa Kabinet Sjahrir itu memusatkan kekuatan dengan menggabungkan diri membentuk suatu federasi, bernama Persatuan Perjuangan dengan tokoh utamanya Tan Malaka. Atas bantuan kalangan yang bersimpati kepadanya, Tan Malaka berhasil mengorganisasikan berbagai partai, laskar rakyat dan badan-badan perjuangan, menjadi suatu front perjuangan rakyat untuk menghadapi Inggris dan Belanda.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sejak masa mudanya Tan Malaka sudah cenderung kepada prinsip perjuangan kerakyatan yang revolusioner. Ia tidak dapat berdiam diri dan hatinya berontak melihat kehidupan bangsanya yang melarat, diperas dan ditindas oleh kaum kolonialis Belanda. Oleh karena itu Tan Malaka memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Semula Tan Malaka berjuang melalui jalur pendidikan, dan akhirnya ia terjun langsung dalam kegiatan politik menentang pemerintah kolonial Belanda. Aktifitasnya di dalam dunia politik itu dirasakan oleh pemerintah Belanda akan mengancam kedudukannya, sehingga akhirnya pemerintah Belanda mendeportasikan Tan Malaka ke luar negeri.

Setelah melewati masa pengasingannya yang panjang di luar negeri, menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tan Malaka kembali ke Indonesia secara ilegal. Dan baru sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi, ia bergerak secara legal dan ikut berjuang di tengah-tengah bangsa Indonesia, menghadapi musuh yang baru datang yaitu Inggris dan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia.

Persatuan Perjuangan yang lahir tanpa adanya kaderisasi yang kuat itu akhirnya tidak berhasil mewujudkan tujuannya. Baik karena dari dalam tubuh Persatuan Perjuangan itu sendiri memang lemah, ditambah dengan tekanan dari pemerintah untuk berusaha menghancurkan oposisi itu dengan jalan menangkapi para pemimpin utamanya. Maka akhirnya Persatuan Perjuangan yang berfungsi sebagai motor penggerak oposisi terhadap Kabinet Sjahrir tenggelam dalam kekuasaan pemerintah.

Sementara itu, dengan konsepnya yang bisa diterima dunia Barat Sjahrir berusaha memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kerja sama dan dukungan Sukarno, serta setelah menghancurkan kekuatan kaum oposisi terlebih dahulu, maka Sjahrir dapat menjalankan peranannya berdiplomasi menghadapi Belanda untuk merebut posisi pengakuan dunia internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat pentingnya studi terhadap sejarah revolusi nasional Indonesia, maka dalam penelitian ini dipilih salah satu topik yang berjudul Oposisi Tan Malaka terhadap Kabinet Sjahrir (1945-1947).

Tulisan mengenai revolusi nasional Indonesia telah cukup banyak, baik yang ditulis oleh sarjana Barat yang menarik dan sudah menggunakan metodologi yang akurat yaitu Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 oleh Ben Anderson, dan buku Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia yang ditulis oleh George McT. Kahin. Karya penulis Indonesia juga sedikit banyak telah membahas masalah revolusi nasional Indonesia. Namun demikian tulisan-tulisan itu belum ada yang memberikan perhatian dan gambaran secara khusus tentang oposisi Tan Malaka terhadap Kabinet Sjahrir. Tulisan-tulisan yang ada di satu pihak menekankan kepada negara Republik Indonesia sebagai kekuatan baru untuk menghadapi Imperialis Belanda, sedang di pihak lain perhatian difokuskan kepada perkembangan Negara Republik Indonesia sebagai negara yang belum lama merdeka.

Untuk memahami proses terjadinya oposisi Tan Malaka terhadap Kabinet Sjahrir diperlukan pengamatan secara komprehensif. Selain itu, pengamatan ditekankan pada gejala sosial-politik dan ideologi.

Bila kasus-kasus yang pernah terjadi pada masa revolusi kita perhatikan, maka ternyata penyebabnya berasal dari hal-hal yang sederhana kemudian menjadi dominan. Begitu juga oposisi Tan Malaka terhadap Kabinet Sjahrir, merupakan klimaks dari suatu krisis politik yang sudah berakar sebelumnya. Krisis yang timbul akibat hubungan antara Sukarno, Hatta dengan Tan Malaka dan pengikutnya telah menimbulkan pengaruh kepada perkembangan politik negara Republik Indonesia, dan pengaruh itu benar-benar terasa mendalam setelah terjadinya "Peristiwa Tiga Juli".¹ Sehingga sehubungan dengan peristiwa itu, pemerintah Republik mengeluarkan suatu pernyataan resmi yang isinya mengecam Peristiwa Tiga Juli sebagai usaha perebutan kekuasaan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang didalangi oleh Tan Malaka.

Pernyataan resmi pemerintah Republik sehubungan dengan Peristiwa Tiga Juli itu mencemarkan nama Tan Malaka sebagai pejuang nasionalis Indonesia. Pengalaman hidupnya pada masa penjajahan kolonial Belanda menumbuhkan nasionalisme dalam diri Tan Malaka. Sejak itu ia ingin berjuang untuk membela hak bangsanya, dan bertekad mengusir Belanda dari Indonesia.

Pada dasarnya nasionalisme di Indonesia timbul karena adanya pengaruh kekuasaan kolonial bangsa Belanda. Praktek politik pemerintah kolonial Belanda yang mementingkan subyek negeri induk, yaitu dengan menjadikan daerah koloni

¹Osman Raliby, Documenta Historica (Djakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 342-343; Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta (Jogjakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hal. 135.

Indonesia sebagai sumber ekonomi untuk kemakmuran negeri Belanda, menimbulkan reaksi keras dan radikal di kalangan rakyat Indonesia.² Perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa terjajah menimbulkan solidaritas di kalangan rakyat Indonesia untuk bersama-sama membebaskan nasibnya dari kekuasaan Belanda, dan kemudian membentuk nagara nasional yang dapat melindungi serta memberi jaminan hidup yang lebih baik bagi mereka.

Nasionalisme sebagai paham anti kolonialisme mengalami pertumbuhan terus menerus, dan hal itu berperan penting dalam pergolakan revolusi nasional Indonesia. Situasi pada pertengahan tahun 1945 sangat penting untuk dicatat sejarah, yaitu saat terjadi rasa ketidakpuasan kaum nasionalis Indonesia sudah mencapai puncaknya. Sejak itu di kalangan bangsa Indonesia timbul ketekadan untuk membebaskan nasibnya dari kaum penjajah, dan selanjutnya hidup sebagai bangsa merdeka layaknya.

Menurut Tan Malaka, kemerdekaan bukan hanya berarti politik, tetapi juga sosial ekonomi, dan lebih dari itu merdeka secara mental. Baginya, perombakan masyarakat Indonesia yang bermakna hanya mungkin terjadi melalui suatu revolusi total, yaitu bukan hanya si penjajah yang diusir tetapi juga mengikis habis sisa-sisa feodalisme yang menyuburkan mentalitas budak dalam masyarakat selama itu. Dengan

²Suyatno, "Timbul dan Perkembangan Nasionalisme Indonesia", dalam Basis No. 1-12, Vol. XXXIV Th. 1985 (Yogyakarta: Yayasan B.P. Basis, 1985), hal. 416.

demikian revolusi nasional Indonesia hanya merupakan fase awal dan sebagai sarana belaka untuk tujuan kemerdekaan yang lebih esensial, yaitu revolusi sosial dan mental.³

Sebenarnya tujuan merdeka seutuhnya, baik secara fisik maupun psikhis itu juga diperjuangkan oleh pihak pemerintah, baik pemerintah pimpinan Sukarno maupun Sjahrir. Ada pun yang menjadi pokok pertentangan antara kelompok oposisi dengan pihak pemerintah adalah cara perjuangannya untuk merealisasikan tde tentang kemerdekaan itu.

Sejak awal pemerintahannya, Sukarno telah menghadapi persoalan yang pelik yaitu perbedaan pendapatnya dengan golongan pemuda yang belum terselesaikan secara tuntas, yang berasal dari hari-hari menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bahkan sejak Sukarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia perbedaan pendapat itu menjadi tajam. Para pemuda yang radikal dan tidak sepaham dengan Sukarno pada akhirnya menemukan tempat bernaung dalam Persatuan Perjuangan. Karena berdiri di luar pemerintah, organisasi itu akhirnya dapat dihancurkan dengan ditangkapnya para tokohnya antara lain Tan Malaka, Muhammad Yamin pada tanggal 17 Maret 1946.⁴

³ Alfian, "Tan Malaka Pejuang Revolusioner yang Kesepian", dalam Manusia dalam Kemelut Sejarah (Jakarta: LP3ES, 1978), hal. 163.

⁴ George McT. Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980), hal. 220; Soeharto, Saksi Sejarah (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 59.

Kurun waktu dari tahun 1945 hingga 1947 dipandang sebagai batasan dari pengertian oposisi Tan Malaka terhadap Kabinet Sjahrir, sebab pada masa itu tampak ciri yang menonjol yaitu adanya oposisi Persatuan Perjuangan terhadap pemerintah Republik. Yang menarik dari masa itu, di samping harus menghadapi tentara Sekutu beserta NICA yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia, pemerintah Republik juga harus menyelesaikan kemelut dalam tubuh negara Republik Indonesia sendiri.

Untuk menghadapi golongan oposisi dalam negeri, Sjahrir terpaksa harus mengambil jalan tengah yaitu menerima sebagian tuntutan mereka yang antara lain berunding atas dasar kemerdekaan 100%, mempersiapkan rakyat, menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis seperti yang tercantum dalam "minimum program" Persatuan Perjuangan. Sedangkan untuk menghadapi Belanda, Sjahrir menggunakan siasat diplomasi dengan Inggris sebagai pihak penengah, dengan demikian dalam negara Republik Indonesia ada dua kekuatan yang mempunyai cara berbeda untuk menegakkan dan mengisi Indonesia merdeka. Sukarno, Hatta dan Sjahrir, adalah kekuatan yang memegang tampuk pimpinan negara Republik Indonesia, menempuh jalan diplomasi dalam menghadapi Belanda yang akan berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia, sedangkan kekuatan lain yaitu golongan oposisi yang tidak setuju dengan politik Sjahrir yang menempuh jalan diplomasi.

Persatuan Perjuangan perlu disoroti secara khusus agar diperoleh gambaran seberapa jauh pengaruhnya terhadap persoalan politik di negara Indonesia pada masa itu. Beberapa

pengamat politik di Indonesia beranggapan bahwa Persatuan Perjuangan dapat merekrut Jendral Sudirman untuk bersama-sama menghadapi pemerintah.⁵ Hal itu menarik untuk dilihat seberapa jauh peranan militer masa itu berpengaruh terhadap kekuatan negara Republik Indonesia. Keadaan itu erat kaitannya dengan kenyataan bahwa sejak Jendral Sudirman bergabung dengan Tan Malaka, stabilitas nasional negara Republik Indonesia menjadi goyah, sehingga Sukarno, Hatta dan Sjahrir berusaha mengajak Jendral Sudirman untuk membantu pemerintah.⁶

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang oposisi Persatuan Perjuangan itu, penelitian ini juga menyoroti situasi politik di sekitar Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai latar belakang munculnya kekuatan golongan oposisi. Dengan demikian diharapkan akan tampak jelas proses munculnya kekuatan politik yang berperan dalam perkembangan politik selanjutnya. Di samping itu juga akan diuraikan mengenai pencetus ide pendirian organisasi itu, serta pengaruh keberadaan Persatuan Perjuangan sebagai kelompok yang beroposisi terhadap kebijaksanaan pemerintah pimpinan Sjahrir.

⁵ Adam Malik, Mengabdi Republik Indonesia Jilid II: Angkatan 45 (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hal. 90; George McT. Kahin, op. cit., hal. 237.

⁶ Ibid; Ben Anderson, Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hal. 416.

B. Perumusan Masalah

Ada tiga permasalahan pokok yang akan diajukan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya permasalahan tersebut akan dirinci lebih lanjut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah situasi politik Indonesia di sekitar Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia?

Pertanyaan itu akan mengungkap latar belakang terbentuknya kelompok oposisi, maka uraian mengenai hal tersebut merupakan sisi yang tepat untuk dibahas. Dengan demikian akan timbul beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban, yaitu:

a. Bagaimanakah situasi politik dalam negeri menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia?

b. Bagaimanakah situasi politik dalam negeri pada masa pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat hingga pembentukan Kabinet Presdidsiil?

c. Bagaimanakah situasi politik dalam negeri pada masa kedatangan tentara Sekutu hingga terbentuknya Kabinet Parlemennter?

2. Sejauh mana peranan Tan Malaka lewat Persatuan Perjuangan mewarnai sejarah Indonesia?

Pertanyaan itu akan mencoba mengungkap tentang diri Tan Malaka sebagai seorang yang berperan dalam Persatuan Perjuangan, serta kiprah organisasi itu dalam panggung politik Indonesia pada masa Kabinet Sjahrir. Hal itu akan menjadi jelas dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan seba-

gai berikut:

- a. Bagaimanakah kedudukan Tan Malaka dalam Persatuan Perjuangan?
- b. Apakah program yang diperjuangkan Persatuan Perjuangan pada masa Kabinet Sjahrir?
3. Bagaimanakah sikap kaum oposisi terhadap kebijaksanaan politik Kabinet Sjahrir dalam menghadapi Belanda?

Untuk memecahkan permasalahan itu peneliti akan membahas tentang usaha yang dilakukan kaum oposisi dalam menentang kebijaksanaan politik Kabinet Sjahrir dan sikap Kabinet Sjahrir. Pertanyaan yang relevan untuk mengungkap permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah oposisi Persatuan Perjuangan pada masa Kabinet Sjahrir I?
- b. Bagaimanakah oposisi Persatuan Perjuangan pada masa Kabinet Sjahrir II?
- c. Bagaimanakah oposisi Persatuan Perjuangan pada masa Kabinet Sjahrir III?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bermaksud mengumpulkan dan menganalisa secara kritis data masa lampau mengenai peristiwa-peristiwa sejarah dalam kurun waktu 1945-1947, khususnya masalah oposisi Persatuan Perjuangan terhadap kebijaksanaan Kabinet Sjahrir, untuk kemudian menyusunnya menjadi suatu kisah sejarah.

Di samping itu secara khusus penelitian ini juga bertu-

juan untuk:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terbentuknya oposisi Persatuan Perjuangan berdasarkan fakta-fakta.
2. Menjelaskan peranan Tan Malaka sebagai seorang nasionalis yang memimpin Persatuan Perjuangan.
3. Mengetahui program yang diperjuangkan Persatuan Perjuangan.
4. Mengetahui kegiatan oposisi yang dilakukan Persatuan Perjuangan terhadap Kabinet Sjahrir.
5. Mengetahui kebijaksanaan Kabinet Sjahrir dalam menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia.
6. Mengetahui sikap yang diambil Kabinet Sjahrir dalam menghadapi kegiatan golongan oposisi.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau, untuk kemudian merekonstruksinya menjadi suatu kisah sejarah melalui proses historiografi.⁷

Secara terinci metode sejarah adalah merupakan dua proses kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kegiatan analisis sejarah dan sintesis sejarah. Kegiatan analisis

⁷Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 32.

sejarah meliputi beberapa tahap, yaitu:

(1) Pemilihan subyek untuk diselidiki; (2) Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut; (3) Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati-tidaknya; (4) Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang terbukti sejati.⁸

sedangkan kegiatan sintesia adalah usaha menyusun sumber-sumber yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah sejarah, dan proses semacam itu disebut historiografi.

Ada pun data yang dikumpulkan untuk menyusun Skripsi ini adalah berasal dari sumber tertulis, baik primer maupun sekunder.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti.

Penelitian berjudul Oposisi Tan Malaka terhadap Kabinet Sjahrir (1945-1947) ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Pendadaran guna menyelesaikan studi di program S₁ Jurusan Pendidikan Sejarah, FP IPS, IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan tentang Sejarah Nasional pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, khususnya permasalahan oposisi pada masa kabinet Sjahrir dari tahun 1945-1947, sehubungan dengan kebijaksanaannya di bidang diplomasi dalam menghadapi Belanda.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, bab-bab dalam Skripsi ini akan menguraikannya secara lebih terinci.

⁸Ibid., hal. 34.

BAB II

SITUASI POLITIK SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan mempunyai arti yang luas dan dalam, yaitu tidak hanya ingin melepaskan diri dari belenggu penjajah, tetapi lebih jauh ingin mencapai masyarakat adil dan makmur. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan perwujudan dari perjuangan bangsa Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan kita adalah suatu tindakan yang revolusioner. Sesuai dengan teks proklamasi, bangsa Indonesia bermaksud melakukan pemindahan kekuasaan secara seksama dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Di sisi lain proklamasi kemerdekaan melahirkan pertikaian antara bangsa Indonesia dengan Belanda yang ingin kembali menjajah. Negara Indonesia yang baru lahir itu mengalami masa ujian yang sulit, sehingga bangsa Indonesia pada masa itu harus berjuang mempertahankan kemerdekaan, baik lewat perjuangan bersenjata maupun dengan cara diplomasi.

A. Masa Menjelang Proklamasi

Meluasnya berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu di seluruh Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 mengejutkan

tokoh-tokoh Jepang di Jawa.¹ Kekalahan Jepang itu membawa konsekwensi politis dalam bentuk kekosongan kekuasaan di Indonesia. Keadaan ini mempercepat pecahnya revolusi rakyat Indonesia untuk menggulingkan kekuasaan penjajah kemudian mendirikan kekuasaan nasional yang merdeka dan demokratis. Pada masa yang sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan nasionalis Indonesia.

Perbedaan pendapat itu terjadi antara golongan tua dan golongan pemuda mengenai saat yang tepat untuk mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pendapat itu mengakibatkan terjadinya penculikan terhadap Sukarno dan Hatta, yang dilakukan oleh golongan pemuda. Sejarah penculikan itu terkenal dengan nama "Peristiwa Rengasdengklok".²

Pada tanggal 11 Agustus 1945 di Dalath, Indo China, berlangsung pembicaraan antara Sukarno, Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan Marsekal Terauchi, yaitu panglima tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan disertai pelantikan terhadap Sukarno dan Hatta masing-masing

¹Ben Anderson, Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946; terj. Jiman Rumbo (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal. 89.

²Mohammad Roem, Pentjulikan; Proklamasi dan Penilaian Sedjarah (Jakarta: Hudaya, 1970), hal. 12; wawancara Mohammad Hatta dengan Yasni, Bung Hatta Menjawab (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hal. 137-138.

sebagai ketua dan wakil ketua.³ Pada hari berikutnya, tanggal 12 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia mendapat pesan resmi dari Terauchi yang pada prinsipnya Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaan Proklamasi diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.⁴

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sukarno, Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat tiba kembali di Indonesia. Sutan Sjahrir yang sudah mendengar berita kehendak Jepang untuk menyerah kepada Sekutu lewat radio gelapnya menemui Sukarno dan Hatta, mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia menunjuk Sukarno sebagai wakil rakyat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia.⁵ Sjahrir berpendapat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia hasil pembentukan Jepang itu akan menimbulkan kesan kemerdekaan Indonesia adalah hadiah Jepang. Sedangkan Sukarno dan Hatta berpendapat lain, yaitu kemerdekaan Indonesia datang dari pemerintah Jepang atau hasil per-

³Mohammad Roem, op. cit., hal. 18; Ben Anderson, op. cit., hal. 85-86; Soeharto, Saksi Sejarah (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 8; anggota yang diumumkan hari itu ialah: dr. Radjiman Wedyodiningrat, dr. G.S. Ratulangie, Mr. Pudjo, Andi Pangeran, Mr. Latuharhary, Mr. Teuku Mohammad Hasan, R.P. Suroso, P.H. Puruboyo, G.P.H. Surjo Hamidjojo, Otto Iskandardinata, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasjim, Abdul Kadir, A.A. Hamidan, Prof.Dr. Supomo, Drs. Yap Tjwan Bing, serta penasehat khusus: Mr. A. Subardjo.

⁴Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 (Djakarta: Tintamas, 1982), hal 22-23.

⁵Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, eds., Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976), hal.24.

juangan dari bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi persoalan, sebab Jepang sudah kalah. Lawan bangsa Indonesia yang harus dihadapi bukan lagi Jepang tetapi Sekutu yang akan berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Oleh sebab itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi.⁶ Mengenai badan apa yang memproklamasikan kemerdekaan Sekutu tidak mempersoalkan, yang pertama mereka lihat adalah pelakunya. Jadi baik mengumumkan Proklamasi di dalam atau di luar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Sukarno dan Hatta tetap dianggap kolaborator. Dengan melihat kenyataan bahwa tentara Jepang masih berkuasa di Jawa, maka jalan yang baik adalah mengikuti prosedur yang sudah digariskan oleh Jepang. Sukarno dan Hatta ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam rapat anggota PPKI. ✓

Sesudah masyarakat umum mengetahui berita penyerahan Jepang, maka beberapa pemimpin pemuda segera menggalang kesatuan aksi. Pada tanggal 15 Agustus 1945 berlangsung pertemuan dari berbagai golongan di Laboratorium Bakteriologi Pengangsaan. Pertemuan yang dipimpin Chaerul Saleh itu berhasil mengambil kesimpulan, bahwa kemerdekaan Indonesia yang menjadi hak dan persoalan rakyat Indonesia harus segera dinyatakan dengan jalan proklamasi. Kesimpulan rapat itu disampaikan kepada Sukarno dan Hatta dengan mengutus sebuah dele-

⁶Ibid.

gasi yang dipimpin Wikana.⁷ Mereka bersepakat bahwa deklarasi kemerdekaan yang segera dan otonom sangat penting demi kemerdekaan itu sendiri, sebagai pernyataan secara simbolis dari kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 malam hari berlangsung pertemuan antara Sukarno dengan sejumlah pemuda di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Para pemuda itu mendesak Sukarno agar mengobarkan revolusi dan menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia malam itu juga. Sukarno menolak usul itu, dengan alasan Jepang sudah mengambil keputusan untuk kemerdekaan Indonesia dan esok hari tanggal 16 Agustus 1945, PPKI akan bersidang tentang pelaksanaan kemerdekaan itu.⁸

Sementara pertemuan masih berlangsung, beberapa tokoh terkemuka lainnya segera datang diantaranya Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo serta Buntaran.⁹ Golongan pemuda tetap menuntut agar Sukarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tidak sebagai hadiah Jepang tetapi atas usaha rakyat sendiri. Pihak pemuda juga menuntut Proklamasi dicetuskan bukan oleh suatu badan yang dibentuk Jepang tetapi hanya oleh Sukarno dan Hatta sebagai pemimpin rakyat Indone-

⁷Sidik Kertapati, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 (Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1961), hal. 75-76; Adam Malik, Riwayat dan Perdjuaan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 (Djakarta: Widjaja, 1956), hal. 33.

⁸Sidik Kertapati, op. cit., hal. 76; Mohammad Hatta, op. cit., hal. 30.

⁹Ibid; Sidik Kertapati, loc. cit.

sia. Di pihak lain Sukarno dan Hatta tidak mau menyatakan Proklamasi dengan alasan tidak bersedia merebut hak dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sudah disiapkan. Di sinilah letak perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan pemuda, walaupun mereka mempunyai tujuan sama yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia, dan bersedia mengorbankan jiwa raga.¹⁰

Perundingan antara golongan pemuda dan Sukarno tidak menghasilkan satu kata sepakat, bahkan berkembang menjadi perdebatan sengit. Karena golongan pemuda tetap berkeras pada pendiriannya, akhirnya Hatta berkata: "jika saudara-saudara tidak setuju dengan pendapat saya, dan saudara-saudara merasa sudah siap dan sanggup memproklamasikan kemerdekaan, mengapa minta kepada Sukarno untuk melakukannya?".¹¹

Pertemuan itu tidak memberikan kepuasan bagi golongan pemuda, sehingga perbedaan pendapat golongan tua dan golongan pemuda semakin tajam. Golongan pemuda beranggapan bahwa Sukarno dan Hatta mengganggu rencana mereka, sebab kesanggupan untuk memproklamasikan kemerdekaan sesuai tuntutan mereka tidak ada. Bahkan golongan pemuda merasa direndahkan kesanggupan revolusionernya, tetapi mereka pun menyadari bahwa deklarasi yang dibuatnya tidak akan mempunyai arti, sebab tak seorangpun diantara mereka terkenal luas. Pemimpin yang mem-

¹⁰ Mohammad Roem, "Soekarni, Anak dari Zamannya", Kompas, 15 Agustus 1983.

¹¹ Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, Lahirnya Republik Indonesia (Bandung: PT. Kinta, 1977), hal. 87.

punyai martabat dan wibawa untuk membuat deklarasi kemerdekaan yang mempunyai arti secara politik hanyalah Sukarno dan Hatta.

Delegasi pemuda segera menuju ke Cikini 71, tempat para pemuda lain menunggu hasil pertemuan dengan Sukarno.¹² Pertemuan lanjutan segera dilaksanakan dan akhirnya memutuskan akan mengambil tindakan tertentu untuk membuktikan tekad golongan pemuda yang merasa ditantang keberaniannya, oleh Hatta.

Pembicaraan yang berlangsung dalam pertemuan itu mengarah pada pengambilan keputusan bahwa kemerdekaan tetap harus dinyatakan rakyat, karena itu harus membawa Sukarno dan Hatta ke luar kota Jakarta. Maksud golongan pemuda menyingkirkan kedua pemimpin itu adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, yang kemungkinan akan menghalangi pernyataan kemerdekaan.¹³ Mereka yang hadir dalam pertemuan menjelang tanggal 16 Agustus 1945 itu diantaranya Sukarni, Jusuf Kunto, dr., Muwardi dari Barisan Pelopor Istimewa; Syudanco Singgih dari Daidan Pembela Tanah Air (PETA) Jakarta, bekerja sama dengan Chaerul Saleh¹⁴ memilih Rengasdengklok sebagai tempat untuk menyingkirkan Sukarno dan Hatta dari

¹²Sidik Kertapati, op. cit., hal. 77.

¹³Adam Malik, op. cit., hal. 38.

¹⁴Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, eds., op. cit., hal. 26; Sidik Kertapati, op. cit., hal. 78.

Jakarta.

Rencana itu segera dilaksanakan. Sementara Sukarni, Singgih, dr. Muwardi dan Jusuf Kunto akan membawa Sukarno dan Hatta, Chaerul Saleh dan Wikana akan mempersiapkan revolusi yang akan dikobarkan di Jakarta. Kira-kira pukul 04.00 Sukarno dan Hatta di rumah masing-masing dibangunkan oleh pemuda dengan diberi tahu bahwa suatu revolusi akan segera terjadi, karena itu mereka akan diselamatkan ke luar Kota Jakarta.¹⁵ Tak lama kemudian berangkatlah Sukarno, Fatmawati dan Guntur dalam satu mobil, sedangkan Hatta dan Sukarni di mobil lain bersama Jusuf Kunto, menuju Rengasdengklok dengan diiringi sepasukan PETA di bawah pimpinan Singgih.¹⁶ Peristiwa itu berlangsung tanpa adanya paksaan secara fisik. Sukarno dan Hatta pada waktu itu tidak sempat menolak, kecuali menurut kehendak pemuda.

Golongan pemuda setelah menyingkirkan kedua pemimpin tersebut segera akan merealisasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 ternyata bukan hari kemerdekaan seperti yang diharapkan golongan pemuda, dan penculikan terhadap Sukarno serta Hatta justru menunda rencana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sebab rapat yang seharusnya diadakan PPKI pada hari tersebut gagal karena kedua pemimpin itu tidak ada.

¹⁵Ibid., hal. 79; Adam Malik, op. cit., hal. 36-37.

¹⁶Sidik Kertapati, loc. cit.; Mohammad Hatta, op. cit., hal. 34.

Sementara itu setelah tiba di Rengasdengklok, pemuda mulai memaksakan kembali kehendaknya kepada Sukarno dan Hatta agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia.¹⁷ Pemuda berharap dengan menyingkirkan Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok, mereka akan berhasil memaksa kedua pemimpin itu agar mengabdikan keinginannya, sehingga akan mengobati kekecewaannya pada kejadian di Pegangsaan Timur malam sebelumnya. Akan tetapi harapan itu tidak terwujud. Sukarno dan Hatta mulai menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi dan menolak untuk beralih dari pendirian mereka. Selama mereka belum menerima jaminan yang mantap dari pejabat-pejabat Jepang, mereka tidak bersedia membuat tindakan atas kemauan sendiri.

Di Jakarta hari itu tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh pemuda revolusioner mempersiapkan pelaksanaan revolusi. Kirakira pukul 10.00 sampai 11.00 terjadi pertemuan di Kebun binatang Cikini untuk menyusun program aksi bersama, antara golongan pemuda yang diwakili oleh Chaerul Saleh, Wikana, Suroto Kunto, Djohar Nur di satu pihak, dengan Abdul Latief Hendraningrat, mewakili komandan PETA Jakarta. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa pukul 01.00 dini hari, kekuatan bersenjata dari PETA dan Heiho akan mempelopori penggepungan pusat-pusat militer Jepang di Jakarta dengan bantuan kekuatan rakyat. Akan tetapi hasil perundingan itu tak ada artinya, karena petang hari itu Kasman Singodimedjo, komandan PETA Jakarta, mengirim kurir yang menyampaikan pesan bahwa "PETA

¹⁷Sidik Kertapati, op. cit., hal. 86.

dan Heiho tidak bisa ikut dalam penggepungan karena tidak ada perintah dari Bung Karno".¹⁸ Maka pada hari itu tidak ada revolusi. Dari peristiwa itu tampak bahwa hubungan dengan PETA hanya bersifat perorangan, tidak ada kekompakan.

Para pemuda tidak mempunyai gagasan yang nyata untuk merebut kekuasaan di Jakarta, melainkan hanya akan mengambil alih pemancar radio di Gambir Barat supaya proklamasi kemerdekaan dapat disampaikan ke daerah-daerah dan dunia luar. Jepang sangat waspada terhadap kemungkinan itu, maka langkah utama militer yang diambil Jepang adalah memperkuat penjagaan di stasiun radio.¹⁹

Pada pagi hari itu Subardjo menemui Laksamana Maeda untuk menanyakan apakah sudah ada penegasan tentang penyerahan Jepang dari Tokyo, serta menceritakan kepergiannya Sukarno dan Hatta dari rumahnya tanpa ada yang mengetahui tujuannya.²⁰ Laksamana Maeda mengkhawatirkan kedua pemimpin itu ditangkap oleh tentara Jepang, maka ia segera mencari keterangan ke kantor Gunseikan yang ternyata pihak Angkatan Darat-pun tidak mengetahui.

Pihak Kaigun yang mendengar dari Subardjo tentang pen-culikan Sukarno dan Hatta, mengirim Nishijima untuk mencari Wikana guna mengetahui kemana kedua pemimpin itu dibawa.

Pada mulanya Wikana tidak bersedia memberitahukan, tetapi

¹⁸Ibid., hal. 83; Adam Malik, op. cit., hal. 45.

¹⁹Ben Anderson, op. cit., hal. 100.

²⁰Subadio Sastroasatomo, Perjuangan Revolusi (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 22.

setelah Nishijima dan Maeda menjanjikan akan memberikan bantuan dan jaminan untuk melaksanakan kemerdekaan, maka Wikana bersedia mengembalikan Sukarno dan Hatta. Kemudian Wikana pergi ke kantor Subardjo dan bertemu dengan Jusuf Kunto yang telah dikirim kembali ke Jakarta oleh Sukarni, untuk melaporkan sikap Sukarno yang tidak berubah dan untuk mencari apakah sudah ada penegasan terakhir tentang berita penyerahan Jepang kepada Sekutu dari Tokyo. Setelah terjadi pembicaraan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Subardjo harus pergi ke Rengasdengklok dengan Jusuf Kunto, Sudiro, Yoshizumi untuk membawa kembali kedua pemimpin itu ke Jakarta.²¹

Mereka sampai di Rengasdengklok pukul 17.30, Subardjo segera menceritakan kepada Sukarno dan Hatta tentang keadaan kota Jakarta dan berusaha meyakinkan bahwa pernyataan kemerdekaan dapat dijalankan, karena Laksamana Maeda menjanjikan bantuan dan jaminan keamanan. Ahmad Subardjo menjamin kemerdekaan Indonesia pasti terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan nyawa Ahmad Subardjo sebagai taruhan, maka komandan Subeno mengizinkan kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta.²² Sukarni juga dapat diyakinkan oleh Jusuf Kunto, maka kira-kira pukul delapan malam seluruh kelompok itu berangkat kembali ke Jakarta.²³

²¹Ibid., hal. 23; Ben Anderson, op. cit., hal. 98.

²²Ahmad Subardjo, op. cit., hal. 97-98.

²³Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 23; Ben Anderson, op. cit., hal. 101.

Sesampai di Jakarta, Hatta meminta Subardjo agar menghubungi hotel des Indes untuk menyelenggarakan rapat PPKI yang sudah direncanakan, akan tetapi pihak hotel menjawab bahwa pihaknya tidak dapat menyediakan tempat untuk rapat, sebab hari sudah malam. Akhirnya atas usul Ahmad Subardjo, rapat itu diselenggarakan di rumah Laksamana Maeda.²⁴ Usul itu disambut baik oleh Hatta dan Sukarno.

Laksamana Maeda yang memang telah menyediakan diri untuk membantu mempercepat deklarasi kemerdekaan, segera menghubungi Jendral Yamamoto untuk bersedia mengadakan temuwicara dengan Sukarno dan Hatta. Jendral Yamamoto yang telah mendapat perintah dari Tokyo untuk mempertahankan status quo seluruh wilayah yang didudukinya, melalui Jendral Itagaki di Singapura menolak permintaan itu. Sebaliknya ia menyuruh menghubungi bawahannya Jendral Nishimura.²⁵

Pukul 24.00 mereka berhasil menemui Nishimura di rumahnya. Dengan dukungan Laksamana Maeda, kedua pemimpin Indonesia itu meminta suatu pernyataan lengkap mengenai sikap Jepang serta minta persetujuannya untuk mengadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jendral Nishimura menolak permintaan Sukarno, dan mengatakan bahwa sejak pukul 13.00 tadi pejabat militer Jepang di Jakarta telah mendapat perintah dari Tokyo untuk mempertahankan status quo dan membekukan semua kegiatan politik di wilayah Indonesia. Se-

²⁴Mohammad Hatta, op. cit., hal. 45.

²⁵Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 23-24; Ben Anderson, op. cit., hal. 101.

lanjutnya ia menegaskan bahwa Jepang sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan lagi atas wilayah Indonesia, sedangkanudukannya sekarang hanyalah sebagai agen tentara Sekutu.²⁶ Menanggapi pernyataan itu Sukarno dan Hatta mengusulkan supaya Jepang membiarkan para pemuda bergerak melaksanakan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Nishimura tetap tidak dapat menerima usul seperti itu "selama ia tahu hal itu", sebaliknya mungkin akan membiarkan jika hal itu dilakukan "tanpa sepengetahuannya".²⁷ Setelah mendengar pernyataan terakhir itu, mereka bertiga bermufakat untuk kembali ke rumah Laksamana Maeda dengan disertai Miyoshi yang ditugaskan Nishimura untuk mengawasi pertemuan di rumah Maeda.

Sementara itu, Nishijima ditugaskan untuk membantu Sukarni dan Sajuti Melik' memperingatkan para pemuda Jakarta supaya tidak membuat gerakan apa pun yang membahayakan jalannya perundingan. Tugas itu berhasil diselesaikan dengan baik. Sejumlah pemuda yang ditahan tentara Jepang yang bertugas jaga di sekitar stasiun radio Gambir Barat, dapat mereka bebaskan lagi atas pengaruh Laksamana Maeda.²⁸

Di rumah Laksamana Maeda berkumpul utusan dari berbagai kelompok. Dalam situasi yang menentukan itu, di saat berba-

²⁶ Mohammad Hatta. op. cit., hal. 47.

²⁷ Ben Anderson, op. cit., hal. 102.

²⁸ Ibid., hal. 103; Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, Kesadaran Nasional (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hal. 326.

gai kelompok berkumpul untuk mengadakan rapat dan persiapan mengenai deklarasi kemerdekaan, Sutan Sjahrir tidak ikut hadir. Sebenarnya beberapa pemuda telah dikirim untuk mencarinya, tetapi ia tidak berhasil ditemukan.²⁹ Para anggota PPKI yang sedianya akan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 siang hari tadi, juga hadir dalam pertemuan itu. Langkah pertama yang diambil oleh Sukarno dan Hatta adalah meyakinkan mereka bahwa Jepang telah mengizinkan suatu deklarasi kemerdekaan sehingga tidak ada alasan lagi untuk merasa takut akibatnya. Setelah itu Laksamana Maeda, Sukarno, Hatta, Ahmad Subardjo, Miyoshi serta beberapa pemuda yaitu Sukarni, Sudiro dan B.M. Diah masuk ke ruang belakang untuk menyusun teks proklamasi.³⁰

Sebagai hasil persepakatan antara Sukarno, Hatta dan Ahmad Subardjo akhirnya diperoleh rumusan teks proklamasi tulisan tangan Sukarno yang berbunyi:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-05
Wakil-wakil bangsa Indonesia³¹

²⁹ Ibid., hal. 328-329; Sidik Kertapati, op. cit., hal. 90-91.

³⁰ Ben Anderson, op. cit., hal. 104; Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, Kesadaran ..., hal. 330.

³¹ Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi yang Otentik (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1983), hal. 16.

Untuk mendapat persetujuan dari semua pihak, maka Sukarno segera membawa rumusan teks proklamasi itu ke hadapan sidang dan membacanya berulang-ulang. Pihak pemuda semula tidak menyetujui teks itu, Sukarni dan Chaerul Saleh sebagai wakil mereka memprotes watak "banci" teks proklamasi itu, tetapi bagaimanapun juga mereka tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya. Ada pun rumusan yang sebenarnya diinginkanya adalah: "Bahwa dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Segala badan-badan pemerintah yang ada harus direbut rakyat dari orang-orang asing yang masih mempertahankannya."³²

Akhirnya setelah diadakan musyawarah maka rumusan teks yang dibuat di rumah Maeda itu diterima semua anggota rapat. Kemudian timbul persoalan baru mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Sukarno dan Hatta menghendaki semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi,³³ hal ini akan menunjukkan bahwa proklamasi itu bukan hanya hasil perjuangan suatu golongan saja, tetapi merupakan hasil perjuangan berbagai golongan dari seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh PPKI, atas bantuan para pemuda. Akan tetapi Chaerul Saleh tidak setuju PPKI yang dikecamnya sebagai badan yang dibentuk oleh Jepang itu ikut menandata-

³²Adam Malik, op. cit., hal. 54; Mohammad Hatta, op. cit., hal. 51.

³³Ibid.



ngani naskah proklamasi,³⁴ sebab akan menimbulkan kesan kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang, bukan hasil perjuangan rakyat. Sebaliknya pemuda menghendaki agar naskah ditandatangani enam orang dari wakil-wakil pemuda, karena mereka merasa telah mempersiapkan segala usaha untuk proklamasi kemerdekaan.³⁵ Akhirnya atas usul Sukarni dicapai kesepakatan bahwa yang menandatangani naskah proklamasi cukup Sukarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia.³⁶ Kemudian naskah tersebut diserahkan kepada Sajuti Melik untuk diketik dengan sedikit perubahan, yaitu kata "tempoh" diganti "tempo", "wakil-wakil bangsa Indonesia" diubah menjadi "atas nama bangsa Indonesia". Sedangkan cara menulis tanggal diubah menjadi "hari 17 boelan 8 tahoen 05", kemudian naskah itu ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta.³⁷

Perumusan dan penandatanganan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda itu selesai pada pukul 05.00. Peserta rapat segera meninggalkan rumah Maeda untuk mempersiapkan diri masing-masing guna menghadiri pembacaan naskah proklamasi pada pukul 10.00 di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

³⁴Ben Anderson, op. cit., hal. 105.

³⁵Ibid; Sidik Kertapati, op. cit., hal. 94; Ahmad Suardjo Djoyoadisuryo, Lahirnya ..., hal. 112, menyebut 6 orang itu adalah: Chaerul Saleh, Adam Malik, Djawoto, Pandu Kartawiguna, Maruto Nitimihardjo dan Sukarni.

³⁶Mohammad Hatta, loc. cit.

³⁷Nugroho Notosusanto, loc. cit.

Pada mulanya Sukarni mengusulkan agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di Lapangan Ikada, tetapi karena takut akan terjadi kerusuhan, usul itu tidak dapat dilaksanakan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hari itu diselenggarakan dengan upacara sederhana. Dr. Muwardi membacakan rencana Pembukaan Undang Undang Dasar, Sukarno dengan didampingi Hatta membacakan naskah proklamasi dan Abdul Latief Hendraningrat yang mengibarkan bendera Merah Putih.³⁸ Oleh karena ada berita sebelumnya bahwa pembacaan proklamasi akan diadakan di Lapangan Ikada, maka yang hadir di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta itu hanya sekitar 100 orang, namun upacara itu berlangsung dengan sangat khidmad.³⁹

Dengan diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, maka kewajiban bangsa Indonesia selanjutnya adalah segera membentuk pemerintahan yang merdeka pula. Ada pun mengenai masalah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia ini akan diuraikan pada bagian selanjutnya dari bab ini.

³⁸Sidik Kentapati, op. cit., hal. 95-96.

³⁹Wawancara Mohammad Hatta dengan Yasni, op. cit., hal. 146-147.

B. Masa Pembentukan KNIP Hingga Kabinet Presidensiil

Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang bertempat di Gedung Kesenian Jakarta. Sukarno atas tanggung jawabnya sendiri menambah anggota PPKI yaitu R.A.A. Wiranatakusuma, Ki Hajar Dewantara, Iwa Kusumasumantri, Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik dan Subardjo. Dari golongan pemuda juga akan diikutsertakan, tetapi Wikana, Sukarni dan Chaerul Saleh menolak sebagai anggota PPKI. Bahkan ketika rapat akan dimulai Chaerul Saleh memprotes tentang ketidakabsahan badan itu karena masih "berbau" Jepang. Ia menekankan bahwa semua usaha pembentukan Republik jangan diselenggarakan oleh badan bekas pembentukan Jepang. Selanjutnya ia mendesak supaya pertemuan itu diadakan di tengah-tengah rakyat, dan nama badan itu diubah menjadi Komite Nasional Indonesia. Hatta mencoba meredakan kelompok pemuda itu dengan mengatakan bahwa ia dan Sukarno tidak dapat memenuhi tuntutan pemuda, serta mengalami kesulitan untuk memisahkan tanggung jawab mereka kepada Jepang dan tugas kewajiban terhadap rakyat Indonesia.⁴⁰

Para pemuda tidak dapat menerima keterangan seperti itu dan mereka segera meninggalkan rapat. Kepergian mereka menjadikan para pemimpin tua dapat mengambil beberapa keputusan besar menyangkut kehidupan politik mendatang, yaitu berhasil mengesahkan Undang Undang Dasar yang kemudian dike-

⁴⁰Sidik Kertapati, op. cit., hal. 100; Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 31.

nal dengan UUD¹⁹⁴⁵.⁴¹ Pada siang harinya atas pencalonan Oto Iskandardinata, PPKI dengan suara bulat memilih Sukarno dan Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden,⁴² dan dalam melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Pada hari itu Sukarno dan Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyat Indonesia yang isinya meminta kesediaan rakyat untuk tenang, siap sedia dan disiplin dalam upaya ikut menyelenggarakan pembangunan. Sementara itu, PPKI juga mengeluarkan pernyataan yang isinya mengajak rakyat Indonesia untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan Indonesia, menjaga kehormatan bangsa dan tetap menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasanya.⁴³ Kedua maklumat itu menunjukkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden beserta PPKI sangat memperhatikan ketentraman umum dan disiplin organisasi. Segala usaha perebutan kekuasaan dengan kekerasan harus dihindari. Maka kedua maklumat itu sangat mengecewakan golongan pemuda revolusioner yang berkeinginan mengadakan gerakan rakyat bersenjata, untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Usaha mereka membangkitkan semangat rakyat kurang berhasil, sebab rakyat lebih mendengar dan mengi-

⁴¹Ibid; Mohammad Hatta, op. cit., hal. 62.

⁴²Ibid; Ben Anderson, op. cit., hal. 110.

⁴³Yap Tjwan Bing, Meretas Jalan Kemerdekaan (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), hal. 25.

kuti perintah Presiden Sukarno.

Sementara itu, politik kepemimpinan Sukarno dan Hatta tetap ditujukan untuk mempertahankan kesinambungan antara jaman Jepang bagian akhir dan masa pertama kemerdekaan Republik Indonesia, dengan mengambil alih sedapat mungkin sarana-sarana kekuasaan yang diciptakan oleh Jepang, dan mencoba menyesuaikannya dengan kepentingan-kepentingan Republik. Politik itu secara diam-diam diterima oleh Jepang. Akan tetapi ada juga masalah yang tidak dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, yaitu dengan adanya keputusan Jepang untuk membubarkan PETA dan Heiho, sehingga tindakan itu menghilangkan kekuatan pertahanan bersenjata yang diperlukan oleh Republik yang baru itu, untuk mempertahankan martabatnya ke dalam dan ke luar negeri.

Ditinjau dari segi Jepang, keputusan itu masuk akal. Sehubungan dengan tugas yang dibebankan Sekutu kepadanya untuk mempertahankan status quo wilayah yang dikuasainya, maka jelas tidak mungkin untuk membenarkan berkelanjutannya suatu pasukan bersenjata yang diciptakan secara khusus untuk memerangi Sekutu. Selain itu, Jepang juga diliputi perasaan khawatir akan adanya pembalasan dendam yang mungkin dilakukan oleh kesatuan PETA dan Heiho sebagai akibat tindakannya selama masa pendudukan, begitu berita kejatuhan Jepang sam- di daerah-daerah. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan kebijaksanaan menuntut supaya pasukan-pasukan itu dibubarkan, dan sejak tanggal 17 Agustus 1945, Jendral Nagano memutus-

kan pembubaran PETA dan Heiho di seluruh Jawa dan Bali.⁴⁴

Perintah-perintah rahasia untuk pembubaran itu segera dikirim ke berbagai daerah. Pelucutan-pelucutan senjata terhadap PETA itu terlebih dahulu dilakukan di daerah-daerah yang lebih gawat, seperti Bandung dan Jakarta. Sedangkan di berbagai daerah terpencil, pelucutan senjata itu hingga tanggal 20 Agustus 1945 belum selesai. Dan untuk pembubaran pasukan Heiho, pada tanggal 25 Agustus 1945 baru selesai dilaksanakan.⁴⁵

Proses pembubaran itu secara pasti juga dipermudah dengan adanya konferensi yang diselenggarakan oleh Jepang di Bandung, pada tanggal 14 Agustus 1945, yang dihadiri para wakil PETA se-Jawa. Sementara konferensi Bandung masih berlangsung, sedangkan para wakil PETA itu sudah mengambil keputusan untuk "sehidup semati" dengan Jepang dalam menghadapi Sekutu, berita tentang kejatuhan Jepang sampai ke telinga mereka. Akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi para pemimpin PETA untuk membuat kebijaksanaan mempertahankan kesatuan-kesatuan mereka, untuk selanjutnya memperkuat barisan pertahanan Indonesia. Bahkan sebaliknya nampaknya Jepang berhasil mencegah adanya perubahan pikiran para pemimpin PETA, dengan memperingatkan bahwa Sekutu mungkin akan meng-

⁴⁴Ben Anderson, op. cit., hal. 122; Tanu Suherly, Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hal. 5.

⁴⁵Ben Anderson, op. cit., hal. 123.

anggap mereka sebagai pasukan gerilya di luar perlindungan hukum internasional, sehingga sah untuk ditembak mati tanpa melalui proses.⁴⁶ Dengan demikian pasukan-pasukan PETA itu dibayangi perasaan takut akan tindakan yang mungkin dilakukan Sekutu terhadap mereka.

Hal lain yang juga membantu politik Jepang itu adalah keputusan yang diambil oleh sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang PPKI pada hari itu berhasil mengambil dua keputusan penting, yaitu menetapkan tentang Pemerintahan Daerah Indonesia yang untuk sementara waktu dibagi atas 8 propinsi dengan masing-masing dikepalai seorang gubernur; serta menetapkan Kementerian Negara yang terbagi atas 12 departemen dengan masing-masing dipimpin seorang menteri.⁴⁷ Selain itu rapat juga membicarakan kedudukan PETA dan Heiho. Hasil rapat mengenai itulah yang membantu politik Jepang, sehubungan dengan keputusannya terhadap PETA dan Heiho. Oto Iskandardinata yang pada waktu itu menjadi penasihat di Departemen Keamanan Pemerintah Militer Jepang, mendesak agar PETA dan Heiho dibubarkan, karena kedua badan itu akan menyulitkan kedudukan Indonesia di mata Sekutu. Pendapatnya itu diterima sidang PPKI, dan selanjutnya dibentuk panitia terdiri dari Oto Iskandardinata, Kasman Singodimedjo dan Abdul Kadir, untuk melaksanakan keputusan itu serta menyusun rencana guna membentuk pasukan pertahanan nasional se-

⁴⁶Sidik Kertapati, op. cit., hsl. 104.

⁴⁷Yap Tjwan Bing, op. cit., hal. 26-27; Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 32.

cepatnya.⁴⁸

Dengan demikian, setelah PETA dan Heiho bubar, para pemimpin Republik ingin segera membangun pasukan keamanan sendiri, dan pemerintah Republik terpaksa harus menyusunnya dengan hati-hati, karena Jepang yang saat itu masih bersenjata sewaktu-waktu dapat menghancurkannya. Pada tanggal 20 Agustus 1945, PPKI membentuk suatu badan bernama BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang), dan di dalam tubuh BPKKP inilah Badan Keamanan Rakyat (BKR), dibentuk.⁴⁹ Badan Keamanan Rakyat inilah yang bertugas menjaga keamanan negara Republik Indonesia saat itu.

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI bersidang dan mengambil keputusan mengenai Komite Nasional Indonesia dan Partai Nasional Indonesia.⁵⁰ Pada hari itu juga PPKI lebur ke dalam KNI yang baru dibentuk itu. Dengan demikian PPKI pada hari itu membubarkan diri.

Pada tanggal 29 Agustus 1945, di Gedung Kesenian Jakarta, KNIP yang berjumlah 137 anggota itu dilantik. Dalam kesempatan itu, Mr. Kasman Singodimedjo terpilih sebagai ketua KNIP, sedang para wakil ketuanya adalah Sutardjo Kar-

⁴⁸Sidik Kertapati, op. cit., hal. 102.

⁴⁹Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 33; Ben Anderson, op. cit., hal. 126.

⁵⁰Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 34.

tohadikusumo, Mr.J. Latuharhary dan Adam Malik.⁵¹ Komite Nasional Indonesia baik pusat maupun daerah adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Keseimbangan kekuatan dalam kepemimpinan nasional pada waktu itu digambarkan oleh keanggotaan KNIP. Ada pun anggota-anggotanya adalah pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk pula bekas anggota PPKI. Karena itu keanggotaan KNIP meliputi seluruh aliran dan semua lapisan rakyat, yaitu para pangreh praja, ulama, kaum pergerakan dan pemuda.⁵² Pada waktu itu juga, dua politisi yang tidak terlibat dalam pemerintahan Jepang, yaitu Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, diikutsertakan ke dalam keanggotaan KNIP itu.⁵³

Selanjutnya, pada tanggal 5 September 1945, pemerintahan Sukarno dan Hatta segera melengkapi diri dengan membentuk Kabinet I Republik Indonesia yang langsung di bawah pimpinan Presiden Sukarno sendiri.⁵⁴ Meskipun pemerintah sudah terbentuk dan memperoleh dukungan dari pejabat-pejabat tradisional, serta terus menerima pesan-pesan dukungan dari komite-komite nasional tingkat daerah, tetapi di Jakar-

⁵¹Sidik Kertapati, *op. cit.*, hal. 105; Seperempat Abad DPR RI (Jakarta: Sekretariat DPR GR, 1970), hal. 16.

⁵²Ibid., hal. 6.

⁵³Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 113.

⁵⁴Sidik Kertapati, *loc. cit.*; Soebadio Sastrosatomo, *op. cit.*, hal. 40.

ta sendiri pemerintah menghadapi jalan buntu. Situasi masih tetap kacau, langkah-langkah pemerintah dirasakan pemuda sangat lamban, bahkan kadangkala dianggap berlawanan dengan arus revolusi. Pemerintah cenderung bersikap hati-hati, hal itu disebabkan semakin dekatnya waktu pendaratan tentara Sekutu serta adanya ketidakpastian dan kegelisahan mengenai keinginan-keinginan Sekutu di Indonesia nanti.

Dalam keadaan demikian, para pemuda yang dalam masa pendudukan Jepang telah giat dalam memimpin dan mengatur jalannya revolusi, pada bulan-bulan pertama setelah proklamasi mengambil tindakan sendiri mewujudkan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang.

Pada tanggal 1 September 1945 lahirlah API (Angkatan Pemuda Indonesia), bermarkas di Menteng 31, Jakarta, dengan tujuan mengkoordinasikan usaha-usaha dari berbagai kelompok pemuda di Jakarta. Sebagai ketua adalah Wikana, sedangkan Chaerul Saleh sebagai wakil ketua merangkap sekretaris dan Darwis sebagai bendahara. Anggota pimpinan lainnya adalah D.N. Aidit, Parjono, Hanafi Kusnandar, Djohar Nur, serta Chalid Rasjidi. Kemudian menyusul pembentukan Barisan Rakyat, sebuah organisasi petani yang dipimpin Sidik Kertapati, Lukman, Sjamsuddin dan Maruto Nitimihardjo, dan Barisan Buruh, yaitu suatu kelompok aksi buruh yang dipimpin oleh Wjono dan Pandu Kartawiguna. Ketiga organisasi itu bertindak di bawah naungan Komite van Aktie yang bermarkas di Menteng No. 31 juga.⁵⁵ Dalam Komite van Aktie itu tergabung

⁵⁵Ibid., hal. 47; Adam Malik, Mengabdikan ..., hal. 61-62. Sidik Kertapati, op. cit., hal. 111.

berbagai golongan rakyat Indonesia, seperti kaum buruh, kaum tani, kaum intelegensia, para seniman dan lain-lainnya.

Untuk menentukan langkah selanjutnya, Komite van Aktie menyusun program dasar bagi revolusi yang disiarkan ke seluruh Jawa, lewat "Suara Rakyat" No.1. Ada pun program itu berbunyi sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Rakjat Indonesia telah merdeka, bebas dari pemerintahan bangsa asing.
2. Semua kekuasaan harus di tangan negara dan bangsa Indonesia.
3. Djepang sudah kalah dan tidak ada hak mendjalankan kekuasaan lagi di atas bumi Indonesia.
4. Rakjat Indonesia harus merebut sendjata dari tangan Djepang.
5. Segala perusahaan (kantor², pabrik, tambang, kebun d.l.l.), harus direbut dan dikuasai oleh Rakjat Indonesia (terutama oleh kaum buruh) dari tangan Djepang.⁵⁶

Pada tanggal 3 September 1945, Komite van Aktie memprakarsai pengambilalihan Jawatan Kereta Api di Jakarta, bengkel Manggarai dan stasiun Jatinegara. Pada tanggal 4 September 1945 kekuatan trem seluruh Jakarta dikuasai, menyusun dikuasainya Stasiun Radio Jakarta mulai tanggal 5 September, sehingga akhirnya pada tanggal 11 September 1945, seluruh stasiun radio di Jakarta telah dikuasai. Sukses demi sukses berakumulasi, sehingga pemuda bertekad untuk mempersatukan tekad rakyat dengan pemerintah pimpinan Sukarno dan Hatta. Untuk maksud itu Komite van Aktie membuat program untuk mengorganisasikan suatu rapat raksasa di

⁵⁶Ibid., hal. 110; Adam Malik, Mengabdikan ..., hal. 62; Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 47.

Lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.⁵⁷ Dengan melalui sedikit pertentangan antara golongan pemuda dan pihak pemerintah pimpinan Sukarno, maka rapat itu akhirnya dapat diselenggarakan. Dengan dijaga ketat oleh tentara Jepang yang bersenjata untuk mencegah terjadinya kerusuhan, rapat itu berlangsung dengan tertib tetapi dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun ada perasaan kecewa di kalangan rakyat, rapat raksasa itu berakhir dengan tenang.⁵⁸

Rapat raksasa di Ikada itu memberikan kesempatan yang pertama kepada massa rakyat Indonesia di Jakarta untuk turut merasakan dan menyatakan solidaritas mereka, dalam masa-masa pertama Indonesia merdeka. Sedangkan bagi berbagai pihak termasuk Jepang dan Sekutu kelak, rapat itu membuktikan bahwa Sukarno masih memiliki kharismanya di mata rakyat Indonesia. Hal itu merupakan "modal politik" yang besar dan mempunyai nilai tersendiri bagi Sukarno dalam masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Di saat dunia Barat masih memandangnya sebagai kolaborator, maka sebaliknya hari depan politiknya pada dasarnya tergantung kepada kemampuannya untuk memegang teguh imajinasi bangsanya. Hal itu tidak hanya merupakan cara terbaik untuk mengukuhkan kembali kepercayaan atas dirinya di mata Sekutu, tetapi juga menunjukkan bahwa ia mutlak diperlukan oleh tokoh-tokoh gerakan

⁵⁷Adam Malik, Mengabdi ..., hal. 66; Sidik Kertapati, op. cit., hal. 116.

⁵⁸Ibid., hal. 118.

bawah tanah yang sedang menunggu di samping-samping panggung politik dengan harapan terselubung untuk merebut panggung tengah.

Secara naluriah Sukarno merasakan bahwa dalam situasi yang penuh kekacauan itu, citra dan harapan akan lebih meyakinkan di mata rakyat daripada perintah-perintah atau aturan-aturan. Oleh karena itu ia tetap berpegang kepada strategi politik berhati-hati, yang menurut anggapan pemuda tidak sesuai dengan jalannya revolusi.

Sejak terbentuknya Kabinet Presidensiil, politik pemerintahan Republik Indonesia menentukan perjuangan di atas garis-garis diplomasi. Hal itu tercermin dalam tulisan menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo saat itu yang menyatakan antara lain "... Rakyat Indonesia harus insyaf, bahwa perjuangan kita dalam fase sekarang ini ialah perjuangan diplomatik".⁵⁹ Dan kebijaksanaan diplomasi pemerintah Republik itu akan terlihat jelas dalam tindakan-tindakan yang diambilnya setelah kedatangan tentara Sekutu di Indonesia nanti.

⁵⁹ A.H. Nasution, Tentara Nasional Indonesia Jilid I (Bandung-Jakarta: Ganaco N.V., 1962), hal. 21.

C. Masa Kedatangan Sekutu Hingga Terbentuknya Kabinet Parlementer

Pada tanggal 29 September 1945 tibalah tiga divisi Pasukan Sekutu Hindia Timur Belanda (AFNEI = Allied Forces Netherlands East Indies) dipimpin oleh Letnan Jendral Sir Philip Christison di Jakarta. Berkaitan dengan kedatangannya itu ia membuat pernyataan kepada pers, disiarkan melalui radio Singapura semalam sebelum pendaratannya di Jakarta. Dalam pernyataannya itu ia mengatakan bahwa Inggris mempunyai tiga tujuan sehubungan dengan kedatangannya ke Indonesia. Ada pun tujuannya itu adalah melindungi dan mengungsikan tawanan perang, melucuti serta mengembalikan tentara Jepang dan memelihara hukum serta ketertiban di Indonesia. Christison juga mengatakan bahwa pasukan-pasukan Inggris hanya akan menduduki kota-kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan dan Padang. Inggris juga tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dan menganjurkan kepada Belanda untuk mengadakan perundingan dengan pemerintah Republik secepat mungkin.⁶⁰

Usaha mempertemukan pihak Belanda dan Republik itu diawali Christison dengan mengeluarkan pernyataan pada tanggal 1 Oktober 1945 yang isinya, bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak akan diusir, dan diharapkan untuk melanjutkan pemerintahannya di luar wilayah yang diduduki tentara Inggris. Inggris akan menemui pemimpin-pemimpin dari berbagai

⁶⁰ Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, Kesadaran ..., hal. 356; Ben Anderson, op. cit., hal. 160.

pergerakan, untuk menerangkan maksud kedatangannya ke Indonesia. Selain itu Inggris juga akan mempertemukan wakil-wakil Belanda dan pemimpin-pemimpin Indonesia dalam meja perundingan.⁶¹ Sikap hati-hati Inggris dalam menjalankan tugasnya di Indonesia itu, disebabkan adanya kenyataan bahwa Negara Republik Indonesia sudah terbentuk. Selain itu juga untuk menghindari pertumpahan darah antara pasukannya dengan rakyat Indonesia.

Akan tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Dalam menjalankan tugasnya itu Inggris terlibat pertempuran dengan rakyat Indonesia. Kedatangan tentara Inggris yang diboncengi para personal Netherlands Indies Civil Administration (NICA) beserta pasukannya yang bernama Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), adalah di saat bangsa Indonesia dalam kondisi diliputi oleh semangat serta hasrat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 itu melegakan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia secara implisit menganggap pernyataan itu mengakui adanya pemerintah Republik Indonesia, dan menjelaskan bahwa Inggris tidak akan menghukum pemimpin-pemimpin Indonesia yang dituduh sebagai penjahat perang. Dengan demikian pemerintah RI dan rakyat Indonesia mulai mengambil sikap siap sedia terhadap kemungkinan berperang melawan Belanda yang ingin kembali berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Untuk kepentingan tersebut serta menjamin keamanan dalam ne-

⁶¹Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, Kesadaran ..., hal. 357.

geri, pada tanggal 5 Oktober 1945 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara nasional dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).⁶²

Di pihak Belanda, pernyataan Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 itu menimbulkan kekecewaan. Belanda menganggap pernyataan itu sebagai pengakuan de facto atas Republik, dan juga pengingkaran Inggris terhadap Perjanjian Urusan Sipil tanggal 24 Agustus 1945 di London. Ada pun isi perjanjian itu adalah Inggris akan membantu Belanda untuk menegakkan kekuasaan kolonialnya di wilayah Hindia Belanda. Akibatnya terjadilah kerusuhan yang tidak diinginkan Inggris. Belanda mulai mengibarkan bendera tri warna dan berusaha menurunkan bendera Merah Putih, sehingga mendapat perlawanan rakyat Indonesia.

Untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi di kedua belah pihak, maka komandan Southeast Asia Command (SEAC), Admiral Lord Mountbatten, mengadakan pertemuan dengan pemimpin NICA di Singapura pada tanggal 10-11 Oktober 1945. Dalam pertemuan itu Mountbatten menegaskan bahwa sikap tidak mengenal kompromi akan menimbulkan situasi gawat, padahal personal dan material yang dimiliki Inggris terbatas. Karena itu permusuhan antara pasukan Inggris melawan pejuang Indonesia sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu Admiral Mountbatten juga mendesak supaya Van Mook mau

⁶² T.B. Simatupang, Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai (Djakarta: Jajasan Pustaka Militer, 1954), hal. 54; A.H. Nasution, op. cit., hal. 120; Sidik Kertapati, op. cit., hal. 123.

berunding dengan pemimpin-pemimpin Indonesia, termasuk Sukarno.⁶³ Hal itu mempersulit tugas Van Mook, karena pemerintah Belanda di Den Haag telah memerintahkan kepadanya untuk tidak mengadakan pertemuan atau hubungan dengan pemerintah Republik pimpinan Sukarno.

Terjepit antara kenyataan di Indonesia, yaitu adanya Negara Republik Indonesia dan desakan Inggris, dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah Den Haag, maka Van Mook mengeluarkan pernyataan bahwa pihak Belanda mau berunding dengan semua pemimpin Indonesia, kecuali Sukarno.

Akan tetapi kenyataannya, pihak Belanda sulit untuk memilih orang Indonesia yang pantas untuk diajak berunding. Tentara Inggris memerlukan bekerja sama dengan Sukarno, untuk menjalankan tugasnya di Indonesia. Keinginan itu diper tegas oleh Lord Mountbatten lewat pernyataannya pada tanggal 23 Oktober 1945, bahwa "karena Inggris hanya menduduki tempat-tempat terpenting, maka bagi Inggris untuk menjaga keamanan dan ketentraman umum diperlukan kerja sama dengan bangsa Indonesia".⁶⁴ Republik Indonesia yang telah menggariskan perjuangan lewat jalur diplomasi, menyambut baik pernyataan Lord Mountbatten itu. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia bersedia me-

⁶³Soebadio Sastrosatomo, *op. cit.*, hal. 158-159.

⁶⁴Samawi, 25 Tahun Merdeka (Jogjakarta: Kedaulatan Rakyat, 1970), hal. 21.

masuk ke perundingan untuk memecahkan masalah politik, dengan dasar menentukan nasib sendiri, dan diadakan dengan kesaksian pihak ketiga sebagai pihak pengantara.⁶⁵

Di hadapan kenyataan-kenyataan seperti itu, dan atas desakan Inggris kepada pihak Belanda harus menggantung diri, akhirnya Belanda bersedia menghadiri pertemuan yang diusulkan Inggris itu. Walaupun tidak ada keinginan untuk mengakui dan berbicara dengan Sukarno, akhirnya terpaksa Van Mook menerima dan mengadakan pembicaraan dengan Sukarno. Pada tanggal 31 Oktober 1945, berlangsung pertemuan di kediaman Jendral Christison. Dari pihak Belanda hadir antara lain Van Mook, Van der Plas dan Idenburgh, sedangkan dari Indonesia hadir antara lain Sukarno, Hatta, Subardjo Djoyoadisuryo dan Amir Sjarifuddin. Pertemuan itu bersifat penjajagan antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu, Belanda belum mengemukakan pendirian pemerintah Belanda tentang politik Belanda terhadap Indonesia.⁶⁶

Inggris memakai strategi mengakui de facto kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia, pada kenyatannya hal itu hanya merupakan taktik belaka, di saat posisi tentara Inggris dalam keadaan tidak menguntungkan. Di balik taktiknya itu, Inggris sebenarnya memberi kesempatan kepada Belanda untuk

⁶⁵G. Moedjanto, "Perundingan Pendahuluan antara Indonesia-Belanda dan Perundingan Hoge Veluwe" dalam Seri Pembinaan Pengajaran Sejarah Seri VI, No. 2, Th. 1977 (Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Geografi Sosial, IKIP Sanata Dharma, 1977), hal. 6.

⁶⁶Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 166; Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, Kesadaran ..., hal. 401.

memperkuat posisinya, dengan jalan secara berangsur memasukkan serdadu Belanda di bawah perlindungannya. Karena pada dasarnya memang itulah tugas Inggris yang sebenarnya, membantu Belanda dalam menegakkan kekuasaannya lagi di wilayah Indonesia. Di samping itu Inggris juga mengusahakan agar Belanda dan pemerintah Republik Indonesia mengadakan perundingan untuk menyelesaikan perselisihan politik. Usaha itu dalam rangka menghindari tuduhan dunia internasional, bahwa Inggris tidak mampu mengendalikan ketertiban, keamanan dan perdamaian di Indonesia.⁶⁷

Sementara para penguasa Indonesia yang duduk dalam pemerintahan mengadakan persiapan untuk berunding dengan Belanda, para pemuda revolusioner merasa tidak puas dan menganggap pemerintah Republik tidak dapat bertindak cepat yang dapat mengimbangi situasi politik yang berubah dengan cepat. Orang yang tampil untuk menyuarakan ketidakpuasan itu adalah Sutan Sjahrir. Namun Sjahrir menyadari, bahwa sejak bulan-bulan pertama pecahnya revolusi, Sukarno dan Hatta sudah menyatu dengan rakyat Indonesia. Kedua pemimpin itu diikuti oleh sebagian besar rakyat Indonesia, maka jalan satu-satunya adalah mengambil alih kekuasaan tanpa menggeser kedudukan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁶⁸ Untuk

⁶⁷ T.B. Simatupang, loc. cit.; Osman Raliby, Documenta Historica (Djakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 17-18.

⁶⁸ Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 59; Ahmaddani G. Martha, Christiano Wibisono, Yozar Anwar, Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa (Jakarta: Kurnia Esa, 1985), hal. 215.

itu Sjahrir dan para pendukungnya membuat program untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berstatus sebagai pembantu presiden, harus dijadikan sebagai badan Legislatif.
2. Mengenalkan Kabinet Parlementer dengan Sjahrir sebagai perdana menteri.
3. Membentuk kabinet dimana golongan sosialis demokrat menduduki sebagian besar kursinya.⁶⁹

Untuk merealisasi program tersebut, titik mula yang tepat untuk mengadakan perombakan adalah melalui Komite Nasional Indonesia Pusat. Kedudukan KNIP dalam Undang Undang Dasar¹⁹⁴⁵ Pasal 4 Aturan Peralihan disebutkan bahwa, sebelum Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang Undang Dasar ini segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Dari kalimat "dengan bantuan" ini para pendukung Sjahrir menafsirkan bahwa Komite Nasional juga dapat berperan sebagai badan Legislatif. Inilah yang menjadi dasar mereka mengajukan usul bagi perubahan status Komite Nasional Indonesia Pusat.

Pada tanggal 7 Oktober 1945, lima puluh anggota KNIP, menandatangani sebuah petisi yang ditujukan kepada Sukarno dan Hatta yang isinya, mendesak agar diadakan sidang pleno KNIP untuk membicarakan usul mengubah sifat KNIP sebagai suatu badan eksekutif (pembantu Presiden) menjadi suatu badan legislatif.⁷⁰

⁶⁹Ibid.

⁷⁰Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 62; Ben Anderson, op. cit., hal. 200.

Dengan adanya petisi itu, maka pada tanggal 16-17 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat mengadakan sidang. Sidang pada tanggal 16 Oktober 1945 itu membicarakan usul mengenai sifat KNIP. Suasana sidang hari itu sangat kacau, dan menggambarkan perasaan tidak puas para pemuda terhadap pimpinan KNIP, yang menurut mereka tidak cocok dengan situasi revolusi saat itu. Oleh karena itu, di samping mengusulkan perubahan sifat KNIP dari eksekutif menjadi legislatif, peserta sidang juga mendesak supaya pimpinan KNIP diganti. Pada kesempatan itu, Amir Sjarifuddin mengusulkan dibentuknya suatu "badan pekerja", yang bertugas menjalankan tugas KNIP sehari-hari. Usul itu diterima sidang dan disetujui Wakil Presiden, sehingga lahirlah maklumat negara Republik Indonesia No. X (eks), yang pada intinya memberi status legislatif MPR kepada KNIP, dan pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.⁷¹

Pada hari berikutnya sidang beralih kepada pembahasan usul Sukarni yang menuntut perubahan pimpinan KNIP untuk meningkatkan perjuangan Republik Indonesia. Sartono dan Latharhary membela kepemimpinan lama KNIP dan pemerintah pada umumnya, tetapi hal itu kurang berpengaruh. Pada akhirnya dicapai kesepakatan bahwa usul Sukarni itu ditarik, tetapi kepemimpinan lama KNIP akan segera mengundurkan diri, dan mempersilakan kepemimpinan baru yang akan dipilih oleh Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin yang menjabat sebagai ketua dan

⁷¹Seperempat Abad ..., hal. 17; Sidik Kertapati, op. cit., hal. 17; Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 63.

wakil ketua Badan Pekerja KNIP.⁷² Dengan dukungan KNIP, Sjahrir dan Amir Sjarifuddin segera menyusun keanggotaan Badan Pekerja KNIP yang berjumlah 15 orang. Melalui BPKNIP itu Sjahrir dengan para pendukungnya berusaha memperkuat posisinya untuk mengendalikan pemerintahan.

Di bawah pimpinan Sjahrir, BPKNIP segera bersidang untuk membicarakan garis politik yang harus dianut Republik. Sidang berhasil merumuskan maklumat politik yang naskahnya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapat persetujuannya.

Pada tanggal 1 Nopember 1945, atas sumbangan pikiran seluruh anggota BPKNIP, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat politik yang berisi tentang kesediaan Republik untuk bekerja sama dengan siapa saja yang mau menghormati kedaulatannya.⁷³ Pemerintah Republik berharap lewat maklumat politik itu, Indonesia akan mendapat simpati dari Sekutu dan dunia internasional. Sebaliknya, para pemuda sangat kecewa dan mengecamnya karena maklumat itu dianggap mengurangi jiwa, semangat dan tujuan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Nopember 1945, atas usul BPKNIP juga, pemerintah mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden, yang isinya adalah:

1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik

⁷²Ben Anderson, op. cit., hal. 202.

⁷³Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 70-76; Sidik Kertapati, op. cit., hal. 146-147.

karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelumnya dilaksanakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.⁷⁴

Langkah selanjutnya yang diambil BPKNIP ialah, dalam sidangnya pada tanggal 11 Nopember 1945, mulai membicarakan persoalan perubahan sistem kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer. Sidang itu berhasil memutuskan persoalan yang diajukan itu, dan pada hari itu juga BPKNIP mengeluarkan pengumuman tentang peralihan pertanggungjawaban menteri-menteri, dari Presiden kepada badan legislatif dalam hal ini BPKNIP. Hal itu berarti sistem kabinet persidensiil diubah menjadi sistem kabinet parlementer. Selanjutnya BPKNIP menunjuk Sjahrir menjadi formatu kabinet baru. Keputusan itu disampaikan kepada Wakil Presiden, dan akhirnya mendapat persetujuannya.⁷⁵ Pada tanggal 14 Nopember 1945 terbentuklah Kabinet Parlementer dengan Sutan Sjahrir menjabat tiga jabatan penting sekaligus, yaitu jabatan perdana menteri, menteri dalam negeri dan menteri luar negeri.

Dengan tiga jabatan penting dipegangnya, Sjahrir ingin memperkokoh kedudukannya di mata internasional untuk mempermudah perundingannya dengan Belanda. Oleh karena itu, ia tetap berkeinginan untuk menyingkirkan semua kolaborator Je-

⁷⁴Ahmad Subardjo, Djoyoadisuryo, Kesadaranloc. cit;
Seperempat Abad ..., hal. 53.

⁷⁵Osman Raliby, op. cit., hal. 529.

pang yang duduk dalam pemerintahan Republik. Dengan jalan menerbitkan pamflet politik berjudul Perdjoeangan Kita, ia ingin menguasai panggung politik Indonesia.

Pamflet itu menggambarkan keadaan yang serba pahit dan sulit, serta akibat dari pendudukan Jepang berupa bangkitnya sejumlah nasionalis yang dianggapnya telah menjual dirinya kepada Jepang, dan peracunan pemuda dengan sikap militeristis dan facistis, melalui organisasi yang didirikan Jepang.⁷⁶ Kecaman padas terhadap pemuda yang pada prinsipnya mengecilkan arti pemuda dalam perjuangan, menjadikan para pemuda itu sadar bahwa kepemimpinan Sjahrir tidak seperti apa yang mereka harapkan.

Selanjutnya dalam pamflet itu, Sjahrir juga menyerang kabinet pertama. Ia menyebutkan sebab-sebab kegagalan kabinet pertama menyusun kekuasaan negara, yaitu pertama, karena yang mengendelikan pemerintahan Negara Republik Indonesia bukan orang yang berjiwa kuat, dan te biasa membungkuk kepada Jepang atau Belanda, berjiwa bimbang serta tidak sanggup bertindak tanggung jawab; kedua, kebanyakan mereka merasa berhutang budi kepada Jepang.⁷⁷

Setelah memegang pemerintahan, untuk menghadapi Belanda Sjahrir segera membuka perundingan dengan Belanda dan Inggris bertindak sebagai perantaranya. Mengenai masalah ini akan dibahas selanjutnya pada bab IV dari Skripsi ini.

⁷⁶Sutan Sjahrir, Perdjoeangan Kita (Djakarta: Pertjetakan Repoebliek Indonesia, 1945), hal. 7.

⁷⁷Ibid., hal. 6.

BAB III

BERDIRINYA PERSATUAN PERJUANGAN

A. Peranan Tan Malaka dalam Persatuan Perjuangan

Berbicara tentang Tan Malaka, maka kita akan membicarakan seorang pejuang politik yang paling misterius sepanjang sejarah perjuangan kemerdekaan. Aktifitasnya, di dalam maupun di luar negeri, sebagai pejuang yang menebarkan benih-benih anti kolonialisme dan imperialisme, hanya diketahui secara samar-samar. Hal itu disebabkan sebagian besar hidupnya berada di perantauan dan berpindah-pindah, sehingga rakyat Indonesia awam tidak banyak yang mengenalnya.

Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897, di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, putera dari orang Minangkabau setempat.¹ Awal perantauannya dimulai sejak ia meninggalkan desanya untuk menuntut ilmu di sekolah latihan guru, Bukit Tinggi yang dulu bernama Fort de Kock. Salah seorang gurunya yaitu G.H. Horensma sangat terkesan padanya, sehingga ia mengusahakan supaya Tan Malaka dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di negeri Belanda.² Selama enam tahun di negeri Belanda, dari tahun 1913 sampai dengan tahun 1919, ia hidup dalam kondisi yang menyedihkan, sakit-sakitan dan kesepian. Selama belajar

¹Harry A. Poeze, Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik I (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988), hal. 12.

²Ibid., hal. 23; Tan Malaka, Dari Pendjara ke Pendjara I (Jakarta: Yayasan Massa, 1980), hal. 21.

di negeri Belanda itu, Tan Malaka sangat tertarik dan senang membaca buku-buku tentang Revolusi Perancis dan kemiliteran. Akan tetapi setelah pecahnya Revolusi Rusia pada tahun 1917, ia mulai berkenalan dengan buku-buku tentang Marx dan Engels, serta brosur-brosur mengenai revolusi sosial bulan Oktober 1917 itu. Sejak itu keyakinan politiknya mulai mendapat arah yang pasti. Secara lambat laun cara berpikirnya terpengaruh ide komunisme. Pengalaman hidup serta pengaruh dari buku-buku yang dibacanya itu, membentuk jiwa Tan Malaka menjadi revolusioner.³

Pada bulan Nopember 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru di Senembah, Deli, dengan gaji besar yang disamakan dengan gaji seorang Eropa. Kontras kehidupan yang amat tajam antara tuan-tuan kolonialis yang mewah dengan kuli-kuli kontrak yang sengsara sangat memuakkannya. Kondisi seperti itu menjadikan pandangan-pandangan komunismenya semakin mendalam.⁴ Idenya tentang revolusi sebagai pemecahan untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman kaum kolonialis dan kapitalis berkembang cepat. Lingkungan Senembah seperti itu tidak memberikan tempat baginya untuk memperjuangkan idenya. Oleh karena itu Tan Malaka bertekad pergi ke Jawa, untuk memperoleh kebebasan bekerja dalam mendidik rakyat jelata dan memperjuangkan idenya itu.

Pada tahun 1921 ia pindah ke Jawa, tempat gerakan ra-

³Ibid., hal. 27-32; Harry A. Poeze, op. cit., hal. 71.

⁴Ibid., hal. 136.

dikal mulai tumbuh. Ia berkenalan dengan Semaun, seorang tokoh komunis kenamaan yang kemudian mengajaknya ke Semarang. Tan Malaka kemudian diminta Semaun untuk mendirikan perguruan demi kepentingan pergerakan.⁵ Ia berhasil menjalankan perguruan yang dipercayakan kepadanya itu, sehingga terkenal dengan sebutan "Sekolah Tan Malaka".

Keberhasilannya dalam membangun perguruan itu menjadi faktor penting terhadap pengangkatannya sebagai ketua Partai Komunis Indonesia (PKI), dalam konggresnya di bulan Desember 1921.⁶ Sejak itu Tan Malaka benar-benar terjun dalam kancah politik. Sebagai orang baru dalam pergerakan, Tan Malaka sudah berani menunjukkan sikap bebasnya dalam pemikiran, sehingga kadang-kadang ia harus mengambil posisi yang berlawanan dengan para tokoh PKI lainnya. Dengan berpegang pada visi revolusinya yaitu menentang kolonialis dan imperialis Belanda, Tan Malaka memasuki dunia pergerakan. Untuk dapat mengusir kolonialis Belanda itu Tan Malaka menekankan perlunya persatuan di kalangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau ia kemudian menentang sikap sebagian tokoh penting PKI yang menunjukkan perselisihannya dengan Sarekat Islam (SI). Perpecahan seperti itu menurut Tan Malaka hanya melemahkan kekuatan bangsa Indonesia secara keseluruhan dalam menentang penjajah Belan-

⁵Tan Malaka, op. cit., hal. 69-70; Harry A. Poeze, op. cit., hal. 173-174.

⁶Ibid., hal. 202.

da, maka dari itu harus dihindari.⁷

Sikap keras yang diperlihatkan sebagian tokoh-tokoh PKI itu sebenarnya dipengaruhi oleh kebijaksanaan politik Komintern di Moskow, yang menentang Pan-Islamisme sebagai corak baru dari imperialisme.⁸ Tan Malaka tidak dapat menerima sikap Komunis Internasional itu, karena menurutnya Pan-Islamisme justru bangkit menentang imperialisme Barat yang menjajah kaum Muslim di berbagai negara di dunia. Selain itu, secara realistis Islam merupakan kekuatan politik yang besar di Indonesia dan para pemimpinnya dapat menjadi motor pergerakan massa. Hal itu menyebabkan Tan Malaka menilai bahwa sikap anti Pan-Islamisme Moskow tidak mencerminkan realita suasana perkembangan dunia pada waktu itu, dan sejalan dengan itu sikap anti Sarekat Islam dari PKI tidak pula sesuai dengan keadaan sebenarnya dari masyarakat Indonesia.

PKI dan khususnya Tan Malaka berusaha sebaik-baiknya menghapuskan cap anti Islam, dan menegaskan tujuan bersama dari kaum Muslim dan komunis yaitu mengusir kolonialis dan imperialis Belanda. Pada akhirnya suara Tan Malaka mendapat sambutan yang cukup baik di kedua pihak, dan setelah itu dibentuklah Persatuan Serikat Islam (PSI), sebagai organ yang mencakup semua cabang SI komunis.⁹ Akan tetapi kebijaksanaan

⁷Ibid., hal. 204-205; Tan Malaka, op. cit., hal. 74.

⁸Harry A. Poeze, op. cit., hal. 213.

⁹Ibid., hal. 207.

Moskow yang anti Pan-Islamisme itu tetap merupakan ancaman bagi usaha penyatuan SI dengan PKI.

Dalam waktu yang relatif singkat Tan Malaka memperlihatkan peranannya yang besar dalam membangkitkan semangat persatuan di kalangan pergerakan dan kaum buruh. Dan itu membuat pemerintah kolonial Belanda merasa terancam dengan kegiatan-kegiatan yang dilancarkan Tan Malaka. Oleh karena itu sewaktu ia terlibat dalam kegiatan pemogokan buruh pada awal tahun 1922, ia ditangkap pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 13 Februari 1922.¹⁰ Dan pada bulan Maret 1922 itu pula Tan Malaka dibuang ke negeri Belanda.

Penangkapan dan pembuangan atas diri Tan Malaka itu memastikan dirinya sebagai pejuang revolusioner. Partai Komunis Belanda menyebutnya "martir" atau pahlawan, dan memangsanya sebagai calon nomor tiga dalam pemilihan umum.¹¹ Tan Malaka menerima pencalonan atas dirinya itu bukan karena ia ingin duduk dalam Parlemen Belanda, tetapi ia ingin menggunakan kesempatan untuk mempropagandakan keadaan Indonesia selama masa kampanye pemilu. Tan Malaka menjelaskan kesewenang-wenangan yang dilakukan Gubernur Jendral Hindia Belanda lewat hak istimewanya, serta kesengsaraan bangsa Indonesia karena penindasan yang dilakukan kaum kolonialis dan imperialis Belanda. Selanjutnya ia mendorong Partai Komunis Belanda agar membantu bangsa Indonesia dalam perjuangannya mela-

¹⁰Ibid., hal. 220.

¹¹Ibid., hal. 265-266; Tan Malaka, op. cit., hal. 93.

wan Imperialisme Belanda.¹² Kepopuleran Tan Malaka terlihat ketika ia berhasil mengumpulkan suara banyak. Akan tetapi posisinya sebagai calon resmi nomor tiga dan juga usianya, belum memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota Parlemen Belanda. Tan Malaka meneruskan perantauannya ke Berlin, Jerman. Di Berlin ia hanya sebentar, dan tak lama kemudian ia pergi ke Moskow.

Kedatangannya di Moskow bertepatan dengan masa persiapan menyambut kongres Komintern keempat yang akan berlangsung dari tanggal 5 November sampai 5 Desember 1922. Oleh karena itu semua kegiatan Tan Malaka diarahkan untuk meraih kesempatan dapat berbicara dalam kongres Komintern itu. Akhirnya Tan Malaka dapat bergabung dalam Komite Eksekutif Komintern (EKKI), dan ikut mengadakan persiapan kongres itu.¹³

Sewaktu ia diberi kesempatan berbicara di hadapan peserta kongres Komintern sebagai wakil PKI, dengan tetap setia kepada pandangan politiknya yang berasal dari hasil pemikirannya sendiri, Tan Malaka meneruskan sikap bebasnya dalam mengemukakan pendapatnya.¹⁴ Seperti semula, Tan Malaka tetap mengemukakan kekeliruan kebijaksanaan Komintern terhadap Pan-Islamisme, dan ia menghendaki agar kebijaksanaan itu ditinjau kembali. Menurut Tan Malaka, Pan-Islamisme sekarang

¹²Ibid.; Harry A. Poeze, op. cit., hal. 291.

¹³Ibid., hal. 312.

¹⁴Ibid., hal. 313-316.

merupakan suatu perjuangan kemerdekaan nasional yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap imperialisme, suatu perjuangan yang hendaknya diberi dukungan sepenuhnya. Pidato Tan Malaka itu mendapat sambutan hangat dari peserta kongres Komintern. Akan tetapi Komintern tidak merubah kebijaksanaannya terhadap Pan-Islamisme.

Setelah kongres Komintern tidak menjawab pidatonya, Tan Malaka menjadi ragu mengenai dirinya. Tetapi tak lama kemudian Pemimpin Komintern seksi Timur mendekatinya, dan memintanya untuk bekerja sama demi kepentingan Asia. Ajakan itu disambut Tan Malaka dengan senang hati, karena perlawanannya terhadap tesis-tesis Komintern tidak menjadikannya harus keluar dari permainan, tetapi bahkan dapat menerjunkannya sepenuhnya ke dalam arena permainan itu. Selanjutnya Tan Malaka mendapat tugas dari Komintern untuk menulis buku tentang Indonesia.¹⁵

Pada pertengahan tahun 1923 dalam sidang EKKI, Tan Malaka diberi tugas untuk mengawasi partai-partai komunis yang akan didirikan di Annam, Siam, Philipina, Indonesia dan Burma. Pada akhir itu juga ia berangkat ke tempat tugasnya yang baru, dan pada bulan Desember 1923, ia tiba di Canton.¹⁶ Tugas yang dipercayakan Komintern kepada Tan Malaka itu, menjadikannya kadang-kadang harus berkeliling ke berba-

¹⁵Tan Malaka, op. cit., hal. 101-102.

¹⁶Ibid., hal. 104-105; Harry A. Poeze, op. cit., hal. 344.

gai negara yang menjadi wilayah tugasnya.

Ketika Tan Malaka berada di salah satu tempat di Asia Tenggara untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil Komintern, ia mendapat perintah dari Moskow supaya menghubungi dan mengajak delegasi Indonesia untuk menghadiri kongres Buruh Lalu-lintas seluruh Asia, yang akan diadakan di Canton.¹⁷ Kongres yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 23 Juni 1924 itu, memutuskan mendirikan biro di Canton sebagai pusat informasi untuk memperlancar komunikasi antar serikat-serikat buruh di seluruh Asia, dan memilih Tan Malaka sebagai pemimpinnya.¹⁸

Sebagai ketua biro, Tan Malaka berkewajiban mengeluarkan majalah berbahasa Inggris yang akan disebarakan ke berbagai negara yang tergabung dalam organisasi Buruh seluruh Asia. Ketidak pahamannya tentang bahasa Inggris merupakan kendala utama bagi Tan Malaka untuk dapat segera menerbitkan majalahnya. Maka untuk sementara waktu, walaupun kondisi kesehatannya memburuk Tan Malaka tetap belajar keras untuk menguasai bahasa Inggris. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Tan Malaka dapat mengeluarkan suatu majalah bernama *The Dawn* (Senja), dan pada bulan April 1925 brosurnya yang berjudul Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) juga berhasil diterbitkan.¹⁹

¹⁷Tan Malaka, op. cit., hal. 110.

¹⁸Ibid., hal. 114.

¹⁹Harry A. Poeze, op. cit., hal. 383; Alfian, "Tan Malaka Pejuang Revolusioner yang Kesepian", dalam Manusia dalam Kemelut Sejarah (Jakarta: LP3ES, 1979), hal. 151.

Sebenarnya brosur itu berisi program-program mencapai berdirinya Republik Indonesia merdeka, dan maksudnya ditujukan sebagai pegangan para pimpinan dan kader-kader PKI yang diinginkannya untuk memainkan peranan pimpinan revolusioner ke arah yang dicita-citakannya itu.²⁰ Akan tetapi karena hubungannya dengan tokoh-tokoh PKI memburuk, maka kehadiran brosur itu tidak disambut baik oleh PKI dan penyebarannya di Indonesia tidak mencapai sasaran yang diinginkannya.

Dengan perasaan khawatir Tan Malaka melihat dari Canton PKI mengikuti arah yang salah. Sementara itu kondisi kesehatannya semakin merosot, Tan Malaka diminta datang suatu negara di Selatan yang untuk keperluan apa tidak dijelaskan. Akan tetapi Tan Malaka merasa bahwa pada tahun 1925 itu, PKI menghadapi suatu krisis.²¹ Setelah Tan Malaka datang ke tempat itu (mungkin di Singapura) untuk menjumpai teman-temannya akan tetapi belum sempat ketemu, ia menerima berita untuk segera kembali ke Canton karena seorang temannya dari Moskow ingin berbicara dengannya.

Ketika dua minggu kemudian Tan Malaka tiba kembali di Canton dalam keadaan sangat letih, ternyata temannya yang dari Moskow sudah pergi. Dapat dibayangkan betapa kecewanya Tan Malaka. Kesehatannya merosot kembali di iklim Canton. Oleh karena itu semua tanggung jawabnya di Canton segera di-

²⁰Ibid.; Harry A. Poeze, op. cit., hal. 389.

²¹Tan Malaka, op. cit., hal. 121.

bereskan, kemudian mengadakan persiapan untuk pergi ke Philipina guna memulihkan kesehatannya.

Pada tanggal 6 Juli 1925, Tan Malaka berhasil memasuki Philipina dengan nama samaran Elias Fuentes.²² Setelah beberapa bulan di Manila, ia mendapat surat dari Singapura dengan maksud memintanya lagi untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan rencana mengadakan pemberontakan yang dicetuskan oleh para tokoh PKI termasuk Muso dan Alimin, dalam suatu rapat di Prambanan pada tahun 1925 itu juga. Akan tetapi Tan Malaka tidak menyetujui putusan Prambanan itu, karena PKI masih kecil dan belum memiliki disiplin yang tinggi, sehingga tak mungkin mampu menggerakkan massa rakyat. Lagi pula gerak gerik PKI pada masa itu selalu diawasi penguasa kolonial Belanda, oleh karena itu Tan Malaka mengusulkan untuk merundingkan kembali putusan Prambanan itu di Singapura. Akan tetapi keinginannya itu tidak digubris para tokoh PKI.²³

Tinjauan Tan Malaka mengenai putusan Prambanan yang dibawa ke Singapura oleh Alimin yang saat itu tinggal bersamanya, untuk dibacakan dalam rapat di Singapura itu tak ada artinya. Rapat yang diusulkan Tan Malaka itu tidak diselenggarakan, dan tinjauan serta usul Tan Malaka yang dibawa Alimin itu juga tidak disampaikan kepada para tokoh PKI.²⁴ Ke-

²²Ibid., hal. 156.

²³Ibid., hal. 143-144.

²⁴Ibid., hal. 146.

khawatiran Tan Malaka terhadap pergerakan di Indonesia menjadikannya terpaksa berangkat ke Singapura. Pada awal tahun 1926 ia tiba di Singapura dengan nama samaran Hasan Gozali.²⁵ Dari Singapura ia mengikuti perkembangan pergerakan di Indonesia.

Pemberontakan yang direncanakan para tokoh PKI itu akhirnya meletus, tetapi dalam waktu singkat berhasil dipadamkan oleh pemerintah Belanda. Tan Malaka yang memantau peristiwa itu dari Singapura, mengecam pemberontakan tahun 1926/1927 itu sebagai perbuatan konyol yang secara praktis melumpuhkan PKI sebagai kekuatan politik pada waktu itu.

Sesudah hubungannya dengan Indonesia terputus, Tan Malaka segera meninggalkan Singapura dan untuk sementara waktu menetap di Bangkok. Sebagai kelanjutan dari usahanya untuk merealisasikan cita-cita revolusinya, pada bulan Juli 1927 Tan Malaka bersama Subakat dan Djamaluddin Tamin mendirikan "Partai Republik Indonesia" (PARI) di Bangkok.²⁶ Perbedaan pendapatnya dengan tokoh-tokoh komunis Indonesia dan ketidaksesuaiannya dengan sikap politik Komintern, terutama mengenai Pan-Islamisme yang menunjukkan Moskow tampak lebih banyak memakai Komintern untuk kepentingan "hegemony" internasional Rusia dari pada kepentingan perjuangan kaum nasionalis di daerah-daerah jajahan, mendorongnya untuk mendirikan sebuah partai baru (PARI) tanpa merasa terikat untuk me-

²⁵Ibid., hal. 147.

²⁶Ibid., hal. 152; Alfian, op. cit., hal. 153.

makai mama komunis. Hal itu menunjukkan bahwa warna nasionalisme dalam diri Tan Malaka lebih tajam daripada fanatisme terhadap ideologi komunis.

Sungguhpun begitu, Tan Malaka tidak mungkin dapat dilepaskan sama sekali dari kaitan pengaruh Marx. Jelasnya, ia adalah seorang komunis yang lebih mengerti dan mengutamakan realita bangsanya. "Marxisme", katanya, "bukan kajian hafalan (dogma), melainkan suatu petunjuk untuk aksi revolusi. Oleh karena itu seorang Marxis perlu bersikap kritis terhadap petunjuk itu. Sikap kritis itu antara lain ditekankannya pada kemampuan untuk melihat perbedaan dalam kondisi faktor sosial dari suatu masyarakat dibandingkan masyarakat lain.²⁷ Dengan begitu kesimpulan yang diperoleh oleh ahli revolusi suatu negara, sudah tentu berlainan dengan kesimpulan yang diperoleh di Rusia.

Tan Malaka lebih cenderung sebagai seorang nasionalis, hal itu terlihat dari ketika ia mendirikan organisasi tidak menyebut nama partai Komunis, melainkan dengan nama PARI. Setelah PARI berdiri, ia meninggalkan Bangkok menuju Philipina. Sampai di Philipina pada awal Agustus 1927 dengan nama samaran Hasan Gozali.²⁸ Kerja sama yang erat antara intel pemerintah kolonial Belanda dan Amerika Serikat, berhasil menjaring Tan Malaka sewaktu ia berada di Manila, dengan dalih bahwa ia memasuki Philipina secara tidak sah.

²⁷Tan Malaka, op. cit., hal. 96-97.

²⁸Ibid., hal. 153.

Adanya simpati yang cukup jelas diperlihatkan oleh kaum nasionalis Philipina sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil pemerintah kolonial Amerika Serikat yang relatif ringan yaitu mengusirnya ke luar Philipina. Di mata penguasa kolonial itu Tan Malaka adalah orang yang amat berbahaya. Suasana anti komunis yang keras pada waktu itu dipakai sebagai alasan bahwa ia berbahaya bagi keamanan dan kestabilan politik para penguasa kolonial di wilayah jajahannya.²⁹ Dengan menumpang kapal milik bangsa Philipina, Tan Malaka melanjutkan perantauannya ke Amoy (Cina).

Semenjak itu Tan Malaka bergerak sendiri. PARI yang dimaksudkannya sebagai wahana untuk menuju revolusi Indonesia yang diinginkannya, tidak sempat berakar untuk menjalar luas di Indonesia. Dua orang pendiri lainnya, Subakat dan Djamiluddin Tamin, ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Sisa-sisa terakhir dari PARI di Jakarta dan Surabaya digulung habis oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1935.³⁰

Sementara itu, Komintern dan orang-orang komunis Indonesia yang mengetahui PARI, dan dengan sendirinya mengungkapkan kepada mereka tentang siapa Tan Malaka yang sebenarnya. Tan Malaka dikecam habis-habisan antara lain oleh Muso, yang berhasil masuk Indonesia dari Moskow tanpa sepengetahuan Belanda. Tan Malaka yang dulunya pernah menjadi ketua PKI dan agen - Komintern, kini menjadi musuh utamanya.³¹ Dengan sendirinya

²⁹ Alfian, op. cit., hal. 136.

³⁰ Ibid., hal. 155.

³¹ Ibid., hal. 156.

Tan Malaka putus hubungan dengan Komintern dan PKI. Akan tetapi hal itu tidak menjadikannya putus asa dalam melalui hidupnya yang sepi dan terasing, merantau dari tempat satu ke tempat lainnya dengan tetap setia kepada cita-cita revolusinya.

Pada tahun 1932, Tan Malaka keluar dari Shanghai menuju Hongkong. Pada awal bulan Oktober 1932 ia tiba di Hongkong³² dan ditangkap oleh penguasa kolonial Inggris. Setelah ditahan beberapa minggu dan tidak terbukti bersalah, ia dilepaskan dan pada bulan Desember 1932 itu ia kembali ke Amoy. Selama di Amoy, Tan Malaka menghidupi dirinya dengan mendirikan Sekolah Bahasa Ading.³³ Karena adanya pendudukan tentara Jepang di kota itu, maka pada bulan Agustus 1937³⁴ ia terpaksa pergi dari Amoy dengan tujuan Birma.

Setelah menetap satu bulan di Birma, Tan Malaka segera pindah ke Singapura.³⁵ Selama di Singapura ia menyamar sebagai seorang guru Cina, dan mengajar di sekolah-sekolah di kota itu hingga tahun 1942. Serangan Jepang atas Singapura pada tahun 1942, yang berakhir dengan kekalahan Inggris pada tanggal 13 Februari 1942, mendorongnya untuk kembali pulang

³²Tan Malaka, Dari Pendjara ke Pendjara II (Jakarta: Yayasan Massa, 1980), hal. 31.

³³Ibid., hal. 78.

³⁴Ibid., hal. 86.

³⁵Ibid., hal. 100.

ke Indonesia.³⁶ Pada bulan Mei 1942 ia meninggalkan Singapura menuju Penang,³⁷ kemudian menyeberang Selat Malaka dan memasuki Belawan, terus ke Medan, Padang, dan akhirnya sampai di Jakarta dengan memakai nama samaran Ramli Hussein.³⁸

Selama pengasingannya di luar negeri, kehidupan Tan Malaka diwarnai dengan petualangan dari negeri satu ke negeri lainnya. Dalam petualangannya itu ia selalu menggunakan nama samaran untuk menghilangkan jejak sebagai buronan politik yang selalu dicari penguasa kolonial. Nama samaran itu biasanya digunakan untuk keperluan memasuki negara yang akan dituju sebagai tempat persembunyiannya. Bahkan pada awal kedatangannya di Indonesia, Tan Malaka masih melanjutkan penymarannya dengan bekerja di perusahaan tambang arang, Bayah Kozan, Banten, dengan menggunakan nama samaran Ilyas Hussein.³⁹ Sampai permulaan revolusi Indonesia ia tetap menggunakan nama tersebut.

Sejak bekerja di Bayah Kozan, Banten, ia telah menunjukkan perbedaan pendapat dengan Sukarno. Perbedaan pendapat itu terjadi ketika Sukarno mengunjungi Bayah Kozan, dan mengemukakan gagasannya yang intinya adalah, "Kita mesti berbakti dulu kepada Djepang "saudara tua", yang sekarang mati-

³⁶Ibid., hal. 106-107.

³⁷Ibid., hal. 117.

³⁸Ibid., hal. 127.

³⁹Ibid., hal. 149.

matian menantang Sekutu jang djahanam itu. Setelah Sekutu kalah, maka kita oleh "saudara tua" akan diberi kemerdekaan ...".⁴⁰ Pernyataan Sukarno itu ditentang terang-terangan oleh Tan Malaka yang saat itu dikenal sebagai Hussein. Ia berpendapat bahwa Kemerdekaan Indonesia harus dicapai terlebih dahulu, baru kemudian berjuang melawan Sekutu.⁴¹ Sukarno menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan: "Kalau Dai Nippon sekarang djuga memberikan kemerdekaan kepada saja, maka saja tidak akan menerima".⁴² Perbedaan pendapat antara Sukarno dan Tan Malaka itu berkepanjangan hingga masa sesudah proklamasi, dan melibatkan para tokoh politik Indonesia. Sejak pertemuan itu Tan Malaka mulai menjajagi jiwa kepemimpinan Sukarno atas rakyat Indonesia.

Tan Malaka pernah mendapat kesempatan untuk mewakili pemuda Bayah Kozan menghadiri konferensi pemuda di Jakarta, yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus tahun 1945. Sampai di Jakarta ia bertemu dengan Chaerul Saleh, Sukarni, Anwar serta Harsono Cokroaminoto, dan mendapat informasi bahwa rapat dibatalkan karena dilarang Jepang.⁴³ Masih dengan nama samaran ia menginap di rumah Sukarni pada tanggal 15 Agustus 1945 hingga insiden Rengasdengklok berlangsung. Meskipun berada di Jakarta, ia tidak ikut ambil bagi-

⁴⁰Ibid., hal. 162.

⁴¹Ibid., hal. 164.

⁴²Ibid.

⁴³Tan Malaka, Dari Pendjara ke Pendjara III (Jakarta: Yayasan Massa, t.t.), hal. 145.

an dalam peristiwa proklamasi yang terus terang sangat disesalinya.⁴⁴ Sesudah pertemuan yang gagal itu, Tan Malaka tidak pernah berhubungan dengan para pemuda, dan baru pada hari-hari sesudah proklamasi hingga saat kedatangan Sekutu ia dapat bertemu dengan mereka kembali. Sejak itu Tan Malaka berada di tengah-tengah rakyat untuk bersama-sama menghadapi musuh.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia khususnya tentang cara menghadapi tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA), terdapat keretakan dalam persatuan rakyat Indonesia. Keretakan itu menurut Tan Malaka adalah antara golongan yang memilih "aksi massa" dan yang memilih cara "berdiplomasi". Dengan perkataan lain, antara yang konsekwen kepada proklamasi dan yang berkompromi.⁴⁵ Golongan pertama terdiri dari para pemuda dan mereka yang berjiwa revolusioner seperti Tan Malaka, Sukarni, Chaerul Saleh, Adam Malik dan lain-lainnya, yang akhirnya berhasil menghimpun 141 organisasi rakyat dalam satu wadah bernama "Persatuan Perjuangan". Sedangkan golongan kedua terdiri dari Sukarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifuddin dan lain-lainnya berperan sebagai penguasa dengan gezag dwitunggal Sukarno-Hatta memerintah dengan teguh di kalangan rakyat.

Selain itu Tan Malaka juga mengemukakan dua periode un-

⁴⁴Ibid., hal. 150.

⁴⁵Tan Malaka, Gerilja Politik Ekonomi (Jakarta: Jajasan Massa, 1948), hal. 10; A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid III (Bandung: Angkasa, 1977), hal. 66.

tuk usia Republik Indonesia dari masa revolusi hingga masa perundingan dengan Belanda, yaitu "musim jaya berjuang" dan "musim runtuh berdiplomasi". Sebagai batasan waktu, musim jaya berjuang dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai tanggal 17 Maret 1946, yang ditandai dengan penangkapan para pemimpin Persatuan Perjuangan di Madiun. Secara politik penangkapan para pemimpin Persatuan Perjuangan itu mempunyai arti usaha pemerintah untuk mengganti perjuangan "massa aksi" atau "aksi murba" menjadi "aksi berdiplomasi". Sedangkan musim runtuh berdiplomasi dimulai dari tanggal 17 Maret 1946 hingga tahun 1948 berkaitan dengan masa pelaksanaan perundingan dengan musuh.⁴⁶

Pada musim jaya berjuang, Tan Malaka mempunyai pandangan yang berbeda dengan pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Sukarno. Ia dan para pemuda yang sepaham dengannya menganggap Sukarno kurang revolusioner sebagai pemimpin saat itu,⁴⁷ hal ini tercermin dari sikapnya yang tidak setuju terhadap aksi pemuda melucuti Jepang, bahkan menghentikan pertempuran rakyat yang tengah berlangsung di beberapa kota melawan kehadiran Sekutu yang membantu Belanda dalam membangun lagi kekuasaannya di Indonesia.

Ketika pemerintahan dipimpin oleh Sjahrir yang saat itu menjadi Perdana Menteri, keadaan tetap tidak berubah se-

⁴⁶Tan Malaka, Gerpolek ..., loc. cit.

⁴⁷Tan Malaka, Dari Pendjara ... III..., hal. 175.

perti yang diharapkan para pemuda, bahkan politik pemerintah mulai mengambil bentuk nyata ke arah diplomasi ketika Sjahrir membuka jalan perundingan dengan musuh. Pada masa itu Tan Malaka tidak hanya sekedar berbeda pandangan, tetapi akhirnya menentang politik yang dijalankan Sjahrir.

Sikap Tan Malaka yang tidak sependapat dengan pandangan politik Sjahrir itu terlihat sejak berlangsungnya pertemuan di Serang, pada awal bulan Oktober 1945. Pertemuan antara Tan Malaka dan Sjahrir beserta beberapa pemuda terkemuka di Jakarta seperti Djohan Sjahruzah, Sukarni, Maruto Nitimihardjo, Kusniani, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Sudarsono, Djalil dan Karta Muhari itu, diadakan untuk membahas situasi saat itu.⁴⁸ Delegasi dari Jakarta itu ingin mengetahui pandangan Tan Malaka mengenai situasi politik saat itu, dan menanyakan kesediaannya untuk mengetuai suatu partai sosialis yang akan didirikan di Yogyakarta. Tan Malaka menanggapi pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa ia menentang pembentukan partai, sebab tidak mustahil tentara Sekutu dan Belanda yang datang di Indonesia akan menterang Republik. Menurutnya yang penting pada masa itu adalah memperkuat pemerintahan dengan para pemimpin revolusioner yang ada di luar pemerintahan.⁴⁹

Sejak itu strategi perjuangan Tan Malaka untuk mencapai

⁴⁸ Ibid., hal. 182-183.

⁴⁹ Ibid; Ben Anderson, Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal. 312.

Indonesia merdeka selalu bertolakan. Ketika tidak lama kemudian Sjahrir mengeluarkan pamflet berjudul Perdjoeangan Kita berupa analisis terhadap situasi negara Indonesia yang baru lahir dengan segala tantangannya, maka Tan Malaka juga menulis pamflet yang diberi judul Moeslihat.

Sjahrir melihat bahwa kekacauan pada masa itu, kerusakan birokrasi, ketiadaan pasukan pertahanan yang efektif serta radikalisme membuat Indonesia mudah kena serangan dunia luar. Oleh karena itu strategi yang cocok untuk mencapai tujuan perjuangan adalah diplomasi yang luwes dan pintar, agar Sekutu tidak memberikan dukungan penuh kepada Belanda. Hal itu harus ditempuh dengan cara merenut simpati Sekutu, jadi logisnya diperlukan suatu politik terbuka terhadap modal asing; diakhirinya kekejaman ala-pemuda, terutama terhadap orang kulit putih; berdirinya lembaga-lembaga politik yang dapat diterima oleh Barat, seperti ditegaskannya bahwa:

"Selama alam kita alam doenia kapitalis, terpaksa kita djangan sampai dimoesoehi oleh doenia kapitalis itoe, djadi memboeka negara kita oentoek lapang oesaha mereka sedapat moengkin, jaijoe dengan batas bahwa keselamatan rakjat tidak akan terganggu olehnja".⁵⁰

Sikap semacam itu dikecam keras oleh Tan Malaka dengan mengatakan bahwa pengakuan luar negeri itu bukan syarat hidupnya Republik Indonesia.⁵¹ Ia bahkan berpendapat semua

⁵⁰Sutan Sjahrir, Perdjoeangan Kita (Jakarta: Pertjetakan Repoeblik Indonesia, 1945), hal. 24.

⁵¹Tan Malaka, Muslihat (Jakarta: Yayasan Massa, 1987), hal. 12.

kekuatan asing harus enyah dari bumi Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia ada tergantung kepada kemauan rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang sudah merdeka, rakyat Indonesia harus mau dan bertindak sebagaimana bangsa merdeka, mempunyai "kehormatan atas diri sendiri" sehingga mau berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang dirongrong musuh.⁵²

Moeslihat dikarang secara dramatis dalam bentuk dialog antara wakil-wakil simbolis dari semua golongan yang diharapkan oleh Tan Malaka untuk disatukan ke dalam gerakan perlawanan rakyat. Moeslihat merupakan jawaban radikal terhadap hasil pemikiran Sjahrir dalam *Perdjoeangan Kita*.

Sebagai pejuang Tan Malaka merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembelaan kemerdekaan Indonesia secara terang-terangan mengingat situasi dalam negeri yang semakin kritis. Ia memutuskan akan mengkoordinir semua partai, badan-badan perjuangan dan laskar rakyat yang ada, untuk menghadapi diplomasi Belanda yang dibantu Inggris. Ia merasa perlu mengambil inisiatif itu karena adanya beberapa faktor, yaitu:

1. Pertentangan antara kemauan dan tindakan Kepala Negara dengan rakyat/pemuda di berbagai tempat.
2. Pertentangan antar partai.
3. Sikap dan tindakan Inggris yang mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan dengan kekerasan memaksakan kedaulatan Belanda atas bangsa Indonesia.
4. Kedatangan Van Mook dengan maksud perundingan yang merugikan rakyat Indonesia, serta menghubungkan semua itu dengan:
 - a. Terlaksananya kecemasannya di Serang, ialah akan

⁵²Ibid., hal. 17-18.

- timbulnya berbagai partai jika satu partai diijinkan berdiri.
- b. Pengalamannya tentang sikap penjajah terhadap si terjajah.
- c. Adanya Tan Malaka palsu yang berpropaganda di mana-mana.⁵³

Dengan bantuan beberapa pemuda yang baru dikenalnya, Tan Malaka mengajak semua partai, badan perjuangan dan las-kar-laskar rakyat yang ada untuk bekerja sama dalam satu federasi yang bebas dan selekas mungkin. Federasi yang erat bahkan fusi antara partai-partai itu akan tumbuh dengan sendirinya, jika selama bekerja sama mereka diikat oleh satu program bersama. Karena dasarnya persatuan untuk menyelesaikan revolusi itu adalah perjuangan menghadapi musuh bersama sampai dengan tercapainya kemerdekaan 100%, maka Persatuan Perjuangan dipakai sebagai nama bagi federasi itu.⁵⁴ Pertemuan pertama untuk membentuk Persatuan Perjuangan diadakan di Demak Idjo, pada tanggal 1 Januari 1946, dengan maksud saling mengenal diantara para wakil organisasi.⁵⁵

Jelaslah bahwa Persatuan Perjuangan sebagai front perjuangan rakyat untuk menghadapi musuh, lahir atas ide Tan Malaka. Karena kharismanya sebagai pejuang revolusioner yang konsekwen, serta situasi politik dalam negeri saat itu di mana para tokoh pemuda berjiwa revolusioner mulai kecewa dan melepaskan diri dari Sjahrir yang sedang membangun kekuasaan

⁵³Tan Malaka, Dari ... III..., hal. 188.

⁵⁴Ibid., hal. 191.

⁵⁵Ibid.

annya, menjadikan idenya lekas terwujud.

B. Program Persatuan Perjuangan

Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan dengan tujuan memobilisasi semua partai, laskar dan badan perjuangan rakyat untuk menghadapi Sekutu dan Belanda yang berusaha menegakkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Ia mengemukakan idenya di depan umum dalam konggres pertama Persatuan Perjuangan yang berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 5 Januari 1946 di Purwokerto, Konggres itu dihadiri kurang lebih 132 organisasi dan badan perjuangan yang pada dasarnya tidak setuju dengan dibukanya meja perundingan oleh pemerintah dan Sekutu serta pihak Belanda.⁵⁶ Sebagai pembicara utama, ia menunjuk akan adanya ketegangan antar golongan yang berbeda-beda dan mendesak perlunya perumusan suatu minimum program sesingkat dan sejelas mungkin untuk menyatukan bergagai golongan itu.

Tan Malaka mendesak supaya golongan-golongan sosialis, agama dan nasionalis semua bersatu ke dalam suatu front perjuangan rakyat di bawah program yang dipusatkan pada tujuan "100% merdeka", dan pengusiran seluruh pasukan asing dari bumi Indonesia. Adapun "minimum program" Persatuan Perjuangan terdiri dari 7 pasal, yaitu:

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%.
2. Pemerintahan Rakyat (dalam arti sesuainya haluan pemerintah dengan kemauan rakyat).

⁵⁶Ibid., hal. 191.

3. Tentara Rakyat (dalam arti sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat).
4. Melucuti tentara Jepang.
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa.
6. Menyita dan menyelenggarakan pertanian musuh.
7. Menyita dan menyelenggarakan perindustrian⁵⁷ musuh (pabrik, bengkel, tambang dan lain-lain).

Ia menjelaskan bahwa program itu berisikan dasar untuk perjuangan antikapitalis dan antiimperialis yang dapat dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh rakyat.

Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100% mempunyai maksud memindahkan kekuasaan dari tentara musuh ke tangan Republik Indonesia, atas dasar dan tujuan kemerdekaan 100%. Republik Indonesia mau mengadakan perundingan dengan pihak mana saja, dengan syarat kemerdekaan 100% diakui terlebih dahulu, yang berarti juga menuntut bebasnya Indonesia dari pendudukan tentara asing. Tuntutan itu sesuai dengan tujuan perjuangan bangsa Indonesia, serta untuk menjamin keamanan dan kehormatan bangsa Indonesia yang sudah memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi perundingan itu hanyalah untuk menentukan bentuk hubungan diplomatik dan perdagangan antara dua negara merdeka, menurut hukum internasional. Oleh karena itu, pasal pertama minimum program itu erat kaitannya dengan pasal enam dan tujuh, mengenai penyitaan semua harta benda musuh.

Ada pun maksud pemerintahan rakyat adalah adanya kesatuan tindakan dan perbuatan antara pemerintah dan rakyat,

⁵⁷ Ibid., hal. 193; A.H. Nasution, Sedjarah Perjuangan di Bidang Bersendjata (Djakarta: Mega Bookstore, 1964), hal. 95.

karena pemerintah berasal dari rakyat untuk kepentingan rakyat. Persatuan Perjuangan menganggap saat itu sebagai masa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Agar perjuangan berhasil, diperlukan adanya persatuan seluruh rakyat, dengan demikian dituntut terciptanya kesatuan tindakan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintahan yang dibutuhkan pada masa revolusi seperti ini adalah pemerintahan yang dipimpin seorang revolusioner, yang berani menghadapi semua kemungkinan kekuatan musuh.⁵⁸

Kehadiran Tentara Rakyat yang sesuai dengan kemauan rakyat dengan dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, agar tidak timbul sikap saling mencurigai dan pertentangan dalam menjalankan aksinya, seperti yang terjadi di Surabaya, Semarang, Magelang dan lain-lainnya.⁵⁹

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda tetap berusaha melenyapkan Republik Indonesia. Jepang yang secara yuridis tidak berkuasa lagi atas Indonesia, dipakai oleh Sekutu dan Belanda untuk mewujudkan ambisinya itu. Sebagai bangsa yang sudah merdeka, rakyat Indonesia melawan tindakan mereka dan merasa berhak melucuti senjata musuh untuk berjuang demi mempertahankan kemerdekaan.

Daya tarik kehadiran dan program yang digariskan Tan Malaka itu menyebabkan banyak organisasi yang tidak setuju dengan garis politik pemerintah bergabung dengannya, sehingga

⁵⁸ Tan Malaka, Dari Pendjara ... III ..., hal. 244.

⁵⁹ A.H. Nasution, Sekitar ..., hal. 80.

dalam konggres yang kedua di Solo pada tanggal 15 dan 16 Januari 1946, tidak kurang dari 141 organisasi rakyat diwakili dalam pertemuan tersebut.⁶⁰ Dalam kesempatan itu tentara Republik Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Persatuan Perjuangan yang pada dasarnya adalah suatu front perjuangan rakyat, dan dibentuk dengan tujuan untuk mengusir kekuatan asing dari wilayah Indonesia demi menjamin tegaknya Negara Republik Indonesia. Panglima Besar Jendral Sudirman hadir dalam konggres itu, dan menyatakan sikap menentang politik pemerintah yang menganut garis diplomasi terhadap musuh, dengan mengatakan kepada massa bahwa, "... lebih baik di bom atom sama sekali, daripada tidak merdeka 100% ... Kabinet boleh berganti lima kali satu hari, tapi tentara tetap tentara".⁶¹

Dalam konggres itu Tan Malaka membicarakan tentang sangat pentingnya organisasi, dan mengecam tumbuhnya berbagai partai sebagai sumber perpecahan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya arti persatuan untuk mencapai kemerdekaan 100%, dan mendesak supaya partai-partai itu kembali ke persatuan demi perjuangan. Pada hari itu juga dibentuk "Panitia Kecil" yang terdiri dari 11 anggota, yaitu: Ibnu Parna (Pesisindo); Wali Al-Fatah (Masyumi); Sakirman (Dewan Perjuangan Jawa Tengah); Abdul Madjid (PSI); Jendral Sudirman (TKR);

⁶⁰Ibid., hal. 76; Tan Malaka, Dari Penjara ... III ..., hal. 192.

⁶¹Ibid; A.H. Nasution, Sedjarah ..., hal. 95.

Atmadji (TKR AL); Soejono (KNI Surakarta); Tan Malaka; Usman (PRI Surabaya); Ny. Mangun Koesoemo (Perwani).⁶² Panitia Kecil itu dibentuk untuk diserahi tugas membuat usul-usul konkret dan menyempurnakan serta mempertegas minimum program. Dalam kesempatan itu juga secara resmi disepakati bersama bahwa nama front perjuangan rakyat itu adalah Persatuan Perjuangan.⁶³

Pada tanggal 16 Januari 1946, Panitia Kecil itu melanjutkan pertemuannya di gedung Habiprojo, Solo, dan berhasil mengambil beberapa keputusan, yaitu badan disepakati bernama Persatuan Perjuangan; menerima minimum program seperti yang telah digariskan Tan Malaka sebagai program Persatuan Perjuangan. Selain itu, rapat juga membicarakan dan membentuk susunan keorganisasian Persatuan Perjuangan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu kongres, sekretariat dan badan pekerja. Setelah susunan keorganisasian disetujui bersama, maka pada hari itu kongres membuat resolusi yang isinya mendesak pemerintah supaya bersedia bekerja sama melaksanakan dengan segera program yang telah diputuskan Persatuan Perjuangan, yang tercakup dalam minimum program.⁶⁴

Persatuan Perjuangan terus berkembang dengan pesat, sehingga akhirnya organisasi itu mewakili sebagian besar da-

⁶²Ben Anderson, op. cit., hal. 324; Osman Raliby, Documenta Historica (Djakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 194.

⁶³Ibid.

⁶⁴Ibid., hal. 197-198; Tan Malaka, Dari Pendjara ...III ..., hal. 193-194.

ri kekuatan-kekuatan sosial, politik, militer, laskar dan pemuda. Ide Tan Malaka tentang revolusi dengan tujuan merdeka 100% akhirnya secara formal diterima banyak orang, walaupun dalam aktualitas kadar penerimaan yang berbeda-beda. Sajuti Melik menulis pendapatnya dalam sebuah harian pada masa itu, bahwa semua organisasi besar sekarang telah memasuki Persatuan Perjuangan; hanya yang terbesar dan yang paling kuat tetap di luar yaitu pemerintah sendiri.⁶⁵

Selanjutnya ia mendesak pemerintah untuk memasuki Persatuan Perjuangan, bahkan menjalankan suatu peranan kepemimpinan di dalamnya. Minimum program itu sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah, rakyat hanya dapat membantu. Jika pemerintah tidak menerima tanggung jawab itu, Persatuan Perjuangan akan gagal sebab Persatuan Perjuangan sendiri tidak dapat melaksanakan hal-hal penting dalam program itu.⁶⁶

Sebagai tindak lanjut dari keputusan kongres pada tanggal 16 Januari 1946, pada tanggal 28 Januari di tahun yang sama Persatuan Perjuangan mengadakan rapat lengkap di Solo dengan dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai organisasi. Rapat itu akhirnya memutuskan akan mengirimkan delegasi kepada pemerintah Republik Indonesia, untuk merundingkan resolusi yang maksudnya mendesak pemerintah Republik supaya bersedia bekerja sama melaksanakan program Persatuan Perjuangan.⁶⁷

⁶⁵Ben Anderson, op. cit., hal. 324.

⁶⁶Ibid.

⁶⁷Osman Raliby, op. cit., hal. 208.

Kampanye yang dilancarkan Tan Malaka dalam waktu singkat telah mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Sejumlah golongan yang berbeda-beda, apakah karena keyakinan, taktik, ataupun oportunisme politik, telah memutuskan untuk memasuki Persatuan Perjuangan. Bersamaan dengan itu, mulai terdengar suara-suara yang mengatakan bahwa Persatuan Perjuangan pada dasarnya adalah badan perwakilan yang lebih murni daripada KNIP. Dan sesungguhnya pemimpin-pemimpin puncak Persatuan Perjuangan yang paling terkemuka seperti Tan Malaka dan Jendral Sudirman, tidak duduk dalam KNIP, sementara banyak organisasi komponen Persatuan Perjuangan yang karena dibentuk setelah KNIP ada dan lebih banyak memiliki basis di daerah-daerah dibanding di Ibu Kota, sangat kurang diwakili dalam KNIP itu.

Gelombang kekuatan organisasi massa di luar lembaga konstitusional itu merupakan kelompok penekan yang bagaikan arus deras menguasai medan politik Indonesia pada awal tahun 1946. Oleh karena itu Badan Pekerja KNIP menyambut lahirnya Persatuan Perjuangan itu dengan menyatakan pendiriannya melalui Pengumuman BPKNIP No. 21, yang isinya bahwa hanya dengan persatuan perjuangan yang bulat dan kuat bangsa Indonesia akan mampu menanggulangi segala kerusuhan yang sifatnya mengganggu penyelesaian revolusi nasional Indonesia.⁶⁸ Pengumuman itu disyahkan pada tanggal 28 Februari 1946 dalam Sidang Pleno KNIP di Solo.

⁶⁸Ibid., hal. 88.

Demikianlah, Tan Malaka dalam waktu yang relatif pendek muncul sebagai kekuatan baru yang langsung menantang relevansi kebijaksanaan penguasa waktu itu yang dikontrol oleh Sjahrir. Tan Malaka sebagai pencetus ide dan pemimpin Persatuan Perjuangan⁶⁹ memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai bulan Maret 1946. Penduduk Indonesia yang seluruhnya mencapai jumlah 70 juta sudah berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia yang merdeka. Begitu juga semua alat perdagangan, perkebunan dan pertambangan sudah berada di tangan Indonesia.⁷⁰ Kekuatan militer yang dimiliki rakyat siap untuk melawan tentara asing. Peralatan perang dari yang berupa granat, pistol dan meriam, sampai dengan pesawat terbang berhasil direbut rakyat dengan cara perundingan maupun kekerasan.⁷¹ Dalam bidang sosial politik, perpecahan antar golongan yang timbul pada permulaan revolusi akibat adanya Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 Nopember 1945, berhasil dipersatukan dalam wadah Persatuan Perjuangan. Kesemuanya itu menjadi modal bagi rakyat Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia di bidang politik belum mempunyai arti yang mendasar, bila tanpa kepergian kapitalis asing dari Indonesia. Meskipun kedaulatan dan kekuasaan politik su-

⁶⁹Revue Indonesia No. 21, Th. I, hal. 30.

⁷⁰Tan Malaka, Gerpolek ..., hal. 12-13.

⁷¹Amrin Imran, Perebutan-perebutan Kekuasaan Menegakkan Republik Indonesia 1945 (Djakarta: Lembaga Sedjarah Hankam, 1967), hal. 6.

dah di tangan bangsa Indonesia, dengan pimpinan pemerintahan dipegang oleh orang Indonesia tetapi penyitaan perkebunan, pertambangan maupun pabrik-pabrik tidak dilakukan atau masih dikelola asing, maka bagi kaum murba keadaan semacam itu tidak jauh berbeda dengan masa Hindia Belanda berkuasa di Indonesia. Masalah politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena perang kemerdekaan mempunyai arti untuk kemerdekaan politik dan perjuangan untuk jaminan ekonomi,⁷² sehingga revolusi Indonesia diharap menuju kepada perbaikan aspek ekonomi dan sosial dengan mengambil langkah perjuangan dan membela kemerdekaan 100%.

Pembentukan Persatuan Perjuangan dengan tujuh pasal minimum programnya merupakan titik puncak terakhir dari karir politik Tan Malaka dalam kehidupannya. Hal ini menambah keyakinan terhadap pandangannya bahwa ide mempunyai kekuatan untuk mengadakan perubahan masyarakat yang berarti. Akan tetapi tidak lama kemudian ia menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuatan ide saja tidak cukup.

Permasalahan di atas akan menjadi lebih jelas dalam bab IV dari Skripsi ini. Di situ akan diuraikan mengenai aktifitas Persatuan Perjuangan menentang kebijaksanaan Sjahrir untuk menghadapi Belanda, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh Sjahrir untuk menghadapi Belanda dan golongan oposisi di Indonesia.

⁷²Tan Malaka, Gerpolek ..., hal. 22.

BAB IV

OPOSISI PERSATUAN PERJUANGAN TERHADAP
KEBIJAKSANAAN POLITIK KABINET SJahrir
DALAM MENGHADAPI BELANDA

A. Oposisi Persatuan Perjuangan Masa Kabinet Sjahrir I

Di samping Sukarno dan Hatta, Sjahrir merupakan tokoh penting pula dalam minggu-minggu pertama revolusi Indonesia. Penunjukkan Sjahrir sebagai formatu kabinet baru ditafsirkan oleh banyak orang sebagai pertanda akan dibentuknya suatu pemerintahan yang kuat dan maju. Ia dengan dukungan para pemuda, berhasil mempengaruhi jalannya politik yang akhirnya menempatkan dirinya di kursi Perdana Menteri. Ada suatu harapan umum bahwa mulai saat itu segala sesuatu akan sangat berubah, antara pemerintah dan gerakan pemuda benar-benar tidak lagi akan berselisih melainkan akan bekerja sama dalam arus yang sama.

Pada tanggal 14 Nopember 1945, Sjahrir berhasil mengumumkan komposisi kabinetnya yang terdiri dari para tokoh pada jaman Belanda dan anti Jepang, sehingga memperkuat kedudukan Republik Indonesia dalam diplomasi, dengan tidak mengikut sertakan unsur pemuda.¹ Sjahrir sendiri merupakan tokoh yang diterima baik oleh dunia Barat, karena pendidikannya, keyakinan (pandangan) politiknya, maupun kegiatannya selama masa pendudukan Jepang. Komposisi kabinet semacam

¹Osman Raliby, Documenta Historica (Djakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 94-95; Soebadio Sastrosatomo, Perjuangan Revolusi (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 98-99; Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, Kesadaran Nasional (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hal. 417.

itu menimbulkan kekecewaan besar bagi para pendukung Sjahrir sebelumnya, terutama para pemuda. Pada masa itu sasaran utama permusuhan pemuda mulai beralih dari Jepang kepada Inggris dan Belanda. Kehadiran orang "bermental Belanda" dalam kabinet itu dianggap sesuatu yang tidak pada tempatnya. Secara meluas timbul prasangka bahwa mereka dipilih karena Sjahrir ingin berdamai dengan Sekutu, dan sebaliknya takut mengikutsertakan pemuda yang berpendirian keras sebab akan menggelisahkan Belanda, sehingga bisa digunakan sebagai dalih untuk menolak perundingan-perundingan.² Dengan kata lain kabinet itu sengaja dibentuk untuk keperluan perundingan dengan Belanda.

Kekecewaan para pemuda bertambah ketika pada tanggal 17 Nopember 1945, program kabinet disampaikan kepada pers. Kabinet tidak menumunkan program yang berapi-api untuk menghadapi musuh, tetapi hanya tujuan pemerintah yang intinya adalah:

1. Menyempurnakan susunan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.
3. Berusaha cepat untuk memperbaiki kemakmuran rakyat, diantaranya dengan jalan pembagian makanan.
4. Berusaha mempercepat keberhasilan tantang hal uang Republik Indonesia.³

²Ben Anderson, Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal. 228.

³Ibid., hal. 229; Seebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 177.

Selanjutnya tentang politik luar negeri, kabinet Sjahrir tetap berdasarkan atas Maklumat Pemerintah tanggal 1 Nopember 1945 yang lalu, maka jelaslah bahwa pemerintah memilih cara diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.⁴

Pada hari itu juga tanggal 17 Nopember 1945, Sjahrir mengadakan pertemuan informal dengan pihak Belanda di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison dari pihak Inggris yang bertindak sebagai penengah. Sebagai wakil dari pihak Belanda Van Mook mengatakan bahwa, perundingan yang sesungguhnya tidak dapat dilaksanakan bila suasana aman belum tercipta. Pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan yang berarti karena masalah penarikan pasukan Belanda dan pengakuan status Republik tidak dapat dipecahkan, tetapi ada kesepakatan bahwa pertemuan semacam itu akan diadakan lagi.⁵

Sementara pemerintah mulai melaksanakan politik diplomasi terhadap musuh, maka di lain pihak rakyat sedang terlibat pertempuran sengit melawan tentara Inggris (Sekutu) yang diboncengi militer Belanda. Demikian juga di Jakarta, sejak kedatangan tentara Sekutu terjadi perlawanan antara pemuda serta rakyat Indonesia dengan tentara Sekutu dan Be-

⁴Ibid., hal. 76-77; Soeharto, Saksi Sejarah (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 52.

⁵A.H. Nasution, Tentara Nasional Indonesia (TNI) I (Bandung-Djakarta: Ganaco N.V., 1963), hal. 183; Samawi, 25 Tahun Merdeka (Jogjakarta: Kedaulatan Rakjat, 1970), hal. 24.

landa. Tentara Belanda yang dipersenjatai dan dilindungi Inggris melakukan aksi teror di Jakarta, sehingga penduduk setempat berangsur-angsur hijrah ke luar kota. Hal tersebutlah yang menyebabkan Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dekrit pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, dengan tugas utama melindungi keamanan rakyat dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.⁶

Provokasi Belanda berjalan terus dengan hebat di berbagai tempat dan disambut dengan hebat pula oleh rakyat dan pemuda Indonesia. Akan tetapi perjuangan rakyat itu tidak didukung pemerintah, bahkan mulai Oktober tahun 1945 itu pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan keinginan Sekutu berusaha menghentikan perlawanan rakyat, dan selanjutnya berunding dengan Sekutu. Situasi seperti itu dimanfaatkan oleh tentara Sekutu dan Belanda untuk memperkuat militernya.

Selanjutnya pemerintah dipaksa mengalah kepada Sekutu di Ibu Kota, dan pada tanggal 19 Nopember 1945 pemerintah Republik Indonesia memerintahkan semua Tentara Keamanan Rakyat ke luar kota Jakarta.⁷

Dengan keluarnya semua pasukan keamanan Indonesia dari kota Jakarta, maka suasana Ibu Kota bertambah tidak aman

⁶Iwa Kusuma Sumantri, Sedjarah Revolusi Indonesia Masa Revolusi Bersendjata II, tp.tt., hal. 43-44; A.H. Nasution, Sedjarah Perdjuaan Nasional di Bidang Bersendjata (Djakarta: Mega Bookstore, 1966), hal. 68.

⁷Ibid.; Ben Anderson, op. cit., hal. 328.

bagi pemerintah, karena serdadu-serdadu Belanda yang tidak bertanggung jawab mulai mengadakan penekanan dan penyiksaan dengan membabi buta. Pada tanggal 26 dan 28 Desember 1945 terjadi usaha penembakan secara terpisah untuk membunuh Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, tetapi gagal.⁸

Karena semakin meningkatnya tindak kekerasan di Jakarta, maka pada tanggal 4 Januari 1946 pemerintah Republik Indonesia memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Sementara Sjahrir, demi kelangsungan politik diplomasinya tetap mempertahankan kedudukannya di Jakarta, ketika anggota pemerintah lainnya termasuk presiden dan wakil presiden pindah ke Yogyakarta.⁹

Pada masa itu situasi militer dan masalah diplomatik sangat sulit diatasi pemerintah. Hingga saat itu kebijaksanaan diplomasi pemerintah Sjahrir belum dapat memperlihatkan hasil yang nyata, bahkan Inggris dan Belanda-lah yang tampak semakin mengkonsolidasikan kekuatan mereka di Indonesia.

Dalam suasana macetnya perundingan itu, pada tanggal 11 Desember 1945 pemerintah Belanda mengeluarkan pernyataan berisi kesediaan untuk berunding dengan orang-orang Indonesia yang mau memasuki periode baru dalam perkembangan politik, ekonomi, sosial, dimana cita-cita bangsa Indonesia akan

⁸Ibid., hal. 329; Soebadio Satrosatomo, op. cit., hal. 201.

⁹Osman Raliby, op. cit., hal. 176; Soebadio Sastro satomo, op. cit., hal. 200-201; Ben Anderson, op. cit., hal. 331.

sepenuhnya dipuaskan.¹⁰ Selain itu Menteri Jajahan Belanda, Logeman, juga mengajukan persyaratan bahwa pemerintah Belanda hanya mau berunding dengan pemerintah Indonesia yang diwakili Sjahrir, dan tidak mau berunding dengan Presiden Sukarno. Sebaliknya pihak Indonesia yang diwakili Sjahrir, mengajukan persyaratan bahwa perundingan Indonesia dengan Belanda baru bisa diadakan apabila pihak Belanda mengakui terlebih dahulu kekuasaan Republik Indonesia.¹¹

Untuk mempersiapkan perundingan berikutnya, Van Mook dipanggil oleh pemerintah Den Haag untuk berkonsultasi mengenai pokok-pokok perundingan yang akan dibicarakan lebih lanjut. Pada bulan Desember 1945 itu, ia berangkat ke Den Haag dan kembali ke Jakarta lagi pada awal Februari tahun berikutnya.

Sjahrir menyadari bahwa tidak seluruh rakyat mendukung kebijaksanaannya, maka sebelum melanjutkan perundingan dengan Belanda, ia mengadakan pendekatan terhadap golongan penentangannya yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan. Pada tanggal 6 Februari, ketika berada di Yogyakarta untuk memimpin sidang lengkap kabinet, Sjahrir mengadakan pembicaraan dengan pihak Persatuan Perjuangan serta berusaha meyakinkan bahwa tidak ada jalan lain kecuali **diplomasi**. Ia mengharapkan

¹⁰G. Moedjanto, "Perundingan Pendahuluan antara Indonesia-Belanda dan Perundingan Hoge veluwe" dalam Seri Pembinaan Pengajaran Sejarah Seri VI, No. 2, Th. 1977 (Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Geografi Sosial, IKIP Sanata Dharma, 1977), hal. 7.

¹¹Radik Utoyo Sudiro, Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950, Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan (Jakarta: C.V. Alda, 1976), hal. 47.

dukungan dari pihak Persatuan Perjuangan.¹²

Pada tanggal 10 Februari 1946, dimulailah perundingan antara Sutan Sjahrir dengan Van Mook atas bantuan Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris yang ditugaskan untuk menyelesaikan urusan Belanda dengan Republik Indonesia. Dalam perundingan yang berlangsung di Jakarta itu, Van Mook menyampaikan keterangan resmi pemerintah Belanda yang berdasarkan isi pidato ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Ada pun keterangan atau usul-usul yang ditawarkan oleh Van Mook itu ialah:

1. Bangsa Indonesia, setelah suatu periode persiapan dalam jangka waktu tertentu, akan diberi hak menentukan nasibnya sendiri.
2. Dalam masa peralihan, pihak Belanda bermaksud mendirikan "Commonwealth of Indonesia" (Gemeenebest Indonésie/ Indonesia Serikat) yang akan menjadi partner dalam kerajaan Belanda (Uni Indonesia-Belanda), dan berhak menyelenggarakan urusan internnya dengan sebuah badan perwakilan yang mayoritasnya orang Indonesia. Commonwealth itu akan beranggotakan bagian-bagian yang taraf hak pemerintahannya bertingkat-tingkat.
3. Indonesia juga akan mempunyai kabinet (sebagai badan eksekutif) yang para menternya disesuaikan dengan perwakilan. Seorang Wakil Raja akan menjadi kepala eksekutif yang mempunyai kekuasaan luar biasa.
4. Akan dibentuk lembaga-lembaga pusat yang berfungsi di seluruh wilayah kerajaan yang anggota-anggotanya berasal dari anggota Commonwealth.
5. Setelah pembentukan Commonwealth terlaksana, Belanda akan memperjuangkan masuknya RI dalam PBB.¹³

Dalam penjelasan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 1946, Van Mook menerangkan bahwa Commonwealth of Indone-

¹²Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 217; Ben Anderson, op. cit., hal. 336.

¹³G. Moedjanto, op. cit., hal. 9.

sia adalah bentuk konstitusional yang dipilih untuk memelihara keseimbangan antara otonomi daerah dan kekuasaan pusat, tetapi segala sesuatu akan dilakukan untuk memperkuat kesatuan Indonesia sebagai suatu bangsa.¹⁴ Dalam usul-usul yang ditawarkan maupun dalam penjelasannya tidak ada kata yang menyebut tentang Republik, hal ini mengecewakan Sjahrir.

Sebelum Sjahrir menyusun usul balasan, meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil pemerintah yang bersifat mendamaikan, penentangan terhadap kebijaksanaan diplomasi belum juga reda. Golongan oposisi yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan menolak dengan tegas usul yang ditawarkan Belanda itu. Pada tanggal 13 Februari 1946, Tan Malaka atas nama Persatuan Perjuangan mengeluarkan pernyataan bahwa perundingan antara Sjahrir dan Van Mook baru dapat dilaksanakan dengan syarat: Republik Indonesia harus diakui Belanda; semua pemuda dan polisi yang ditawan Sekutu harus dibebaskan; segala tentara asing harus dienyahkan dari Indonesia; perundingan hendaknya dihadiri PBB. Jika persyaratan itu ditolak maka akan diadakan pemberontakan umum.¹⁵ Persatuan Perjuangan tidak puas terhadap Kabinet Sjahrir yang dianggap tidak mempunyai program nyata, dan membuka perundingan dengan pihak musuh.

Kabinet Sjahrir mendapat tekanan hebat dari berbagai organisasi yang menyatakan selain menyatakan kepercayaan pribadi terhadap Sjahrir, juga menuntut supaya ia tidak

¹⁴Ben Anderson, op. cit., hal. 335.

¹⁵Osman Raliby, op. cit., hal. 339-400.

memberi konsesi-konsesi kepada Belanda, dan hanya berunding atas dasar "100% Merdeka". Tuntutan berbagai organisasi itu diperkuat oleh hasil konperensi Masyumi di Solo pada tanggal 11 sampai 13 Februari 1946, yang juga menuntut pembentukan pemerintah koalisi nasional yang sungguh-sungguh untuk menghadapi tantangan Belanda.¹⁶

Karena tekanan-tekanan itulah maka pada tanggal 16 Februari 1946, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mendesak Presiden Sukarno untuk segera mengambil tindakan mengubah susunan pemerintahan dan keanggotaan KNIP, seperti yang diusulkan Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁷

Keputusan BPKNIP itu dengan sendirinya menjadikan Kabinet Sjahrir demisioner. Sutan Sjahrir menilai keputusan BPKNIP tanggal 16 Februari 1946 itu sebagai tuntutan supaya ia meletakkan jabatan. Maka pada tanggal 23 Februari 1946 ia mengirimkan surat pengunduran dirinya dari kursi Perdana Menteri, kepada Presiden Sukarno.¹⁸ Jadi ketika Sutan Sjahrir memberikan pidato pertanggungjawabannya di muka sidang BPKNIP tanggal 28 Februari 1946 di Solo, saat itu kabinet

¹⁶Ben Anderson, op. cit., hal. 337.

¹⁷Osman Raliby, op. cit., hal. 243-244; Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 222; Ben Anderson, op. cit., hal. 337.

¹⁸Tan Malaka, Dari Pendjara ke Pendjara III (Jakarta: Yayasan Massa, tt.), hal. 216; Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 223.

sudah jatuh.¹⁹

Kabinet Sjahrir itu telah berjalan kurang lebih tiga bulan. Akan tetapi dalam waktu yang singkat itu telah menimbulkan kekuatan-kekuatan gerakan yang sulit untuk dihentikan, dan telah mempertajam pertentangan-pertentangan yang sulit untuk dipersatukan kembali. Kabinet yang mulai mengambil bentuk nyata ke arah diplomasi terhadap musuh itu harus berhadapan dengan mereka yang menggariskan diri pada perjuangan revolusioner.

Keputusan untuk mengambil jalan diplomasi dimulai pada masa pemerintahan Sukarno dan dilaksanakan secara nyata di bawah pemerintahan Sjahrir. Politik diplomasi didasarkan atas suatu pandangan pesimis terhadap keseimbangan kekuatan di dunia dan terhadap kekuatan tenaga-tenaga revolusioner Indonesia. Kelemahan Republik dalam segi organisasi, militer, ideologi menghantui pendukung pandangan ini. Bagi mereka diplomasi adalah satu-satunya kunci kelangsungan hidup Republik Indonesia. Dengan jalan pemikiran ini adalah logis untuk mengesampingkan segalanya demi tercapainya suatu penyelesaian dengan Belanda yang dijamin oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Bila penyelesaian ini tercapai, tugas-tugas untuk memperbaharui, mendemokrasikan dan mengubah masyarakat dapat dilaksanakan. Akan tetapi kebijaksanaan diplomasi, yaitu politik penyesuaian diri dengan Belanda, memerlukan ke-

¹⁹Tan Malaka, loc. cit; Slamet Muljana, Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, tt.), hal. 218-219.

bijaksanaan dalam negeri yang dalam jangka panjang mungkin membuat tugas-tugas itu sulit dilaksanakan. Logika diplomasi menuntut supaya pemuda dikendalikan, harta benda asing dilindungi dan tindakan revolusioner spontan di tengah-tengah rakyat harus ditindas. Sebaliknya, mendorong pembentukan koalisi justru dengan golongan-golongan terhadap siapa proses pembaharuan itu harus ditujukan, yaitu: para pangreh praja yang hilang martabatnya, tokoh-tokoh tradisional setempat, bekas perwira-perwira kolonial yang curiga dan takut terhadap tenaga revolusioner dari semangat Merdeka.²⁰

Sebaliknya perjuangan revolusioner menunjukkan suatu arah yang berbeda. Pandangan itu berdasarkan suatu optimisme yang teguh mengenai kemampuan suatu gerakan revolusioner nasional yang dipimpin dengan mahir dan didukung oleh kekuatan sepenuhnya dari harapan-harapan dan tenaga-tenaga rakyat. Pendukung gagasan ini berkeyakinan bahwa perjuangan bersenjata tidak dapat dihindarkan. Hanya melalui pengalaman pertempuran itulah dasar-dasar masyarakat Indonesia dapat diubah, dan suatu kesadaran akan tujuan yang terpadu dan terorganisasi dapat diciptakan. Perjuangan seperti halnya Merdeka, adalah tujuan daripada kenyataan hidup. Kemerdekaan bukanlah suatu transaksi internasional, melainkan suatu pengalaman hidup.²¹

Perjuangan adalah suatu taruhan bahwa meskipun ada

²⁰Ben Anderson, op. cit., hal. 339.

²¹Ibid., hal. 339-340.

keterpisahan di Indonesia dari sudut geografis dan sosial, ada kekacauan ideologi dan organisasi yang ditinggalkan Jepang, serta ada masalah kekurangan senjata dan kader-kader terlatih, tetapi gerakan terpadu masih tetap dapat dibangun. Persatuan Perjuangan adalah suatu langkah logis ke arah itu karena tidak ada pilihan lain. Persatuan Perjuangan berusaha membangun suatu persatuan di antara organisasi-organisasi, karena tidak adanya persatuan organisasi. Tan Malaka yang tidak mempunyai kader-kader terpercaya yang cakap dan berpengalaman, terpaksa membangun koalisi dengan pemimpin-pemimpin oportunis yang pengabdian sesungguhnya terhadap perjuangan sering sangat tipis. Banyak di antara para pemimpin yang bergabung dengannya itu telah membantu merongrong Kabinet Sjahrir bukan karena mereka menolak kebijaksanaan-kebijaksanaannya, tetapi karena merasa jengkel terhadap komposisinya. Kenyataan seperti itu digunakan dengan baik oleh pemerintah yang tetap akan melanjutkan diplomasi, dengan memberikan umpan berupa jabatan dalam pemerintahan kepada anggota Persatuan Perjuangan untuk mencegah solidaritas dalam tubuh organisasi itu.²²

Dengan jatuhnya Kabinet Sjahrir itu, maka Sukarno segera mengambil alih pimpinan dan bertindak untuk mengubah susunan keanggotaan pemerintahan. Untuk melaksanakan hal itu, Presiden Sukarno membentuk suatu panitia yang terdiri dari pendukung Sjahrir dan Tan Malaka, tetapi tidak termasuk sa-

²²Ibid., hal. 343.

tupun dari pelaku utamanya sendiri. Dalam rapat panitia tanggal 28 Februari 1946, di rumah Komisaris Tinggi Surakarta, Suroso, Presiden Sukarno memimpin pembentukan kabinet baru yang mewakili semua golongan politik, tetapi tetap menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang segaris dengan pemerintahan Sjahrir sebelumnya. Presiden bermaksud membentuk kabinet yang di dalamnya Sjahrir dan Amir Sjarifuddin tetap menduduki dua jabatan utama, yaitu menteri luar negeri dan menteri dalam negeri, sementara jabatan menteri lainnya akan dibagikan kepada partai-partai. Selanjutnya ia meminta kepada para pemimpin Persatuan Perjuangan agar mencalonkan wakil-wakilnya untuk duduk dalam kabinet.²³

Pada pukul sembilan malam hari itu juga, Persatuan Perjuangan mengadakan suatu rapat singkat untuk menentukan sikap yang harus diambil sehubungan dengan usul Sukarno itu. Rapat itu akhirnya memutuskan tidak akan melayani jabatan kabinet yang ditawarkan Presiden Sukarno kepada Persatuan Perjuangan, sebelum prinsip Minimum Program diterima sebagai program kabinet. Karena jika Minimum Program itu diterima, Persatuan Perjuangan dengan sendirinya akan mempunyai kedudukan yang menentukan dalam setiap kabinet yang dibentuk; sebaliknya kalau tidak diterima, golongan Sjahrir sebagai penganjur perundingan akan berada dalam suatu posisi untuk membungkam penentang-penentangya setelah menariknya dalam kabinet.²⁴ Tan Malaka pribadi ketika ditanya Sukarno tentang

²³Tan Malaka, op. cit., hal. 217.

²⁴Ibid., hal. 220.

jabatan kabinet yang ditawarkan kepadanya, ia menjawab bahwa soal jabatan dalam kabinet adalah masalah kedua, yang utama adalah diterima atau tidaknya Minimum Program oleh pemerintah. Dengan kata lain ia mau duduk dalam kabinet hanya jika Minimum Program diterima sebagai program pemerintah.²⁵

Sepanjang hari berikutnya perundingan-perundingan berlangsung terus, tetapi kesepakatan tidak dicapai.²⁶ Dengan demikian jalan keluar yang diajukan oleh Sukarno itu tidak berhasil. Karena Sukarno dan Hatta menentang Minimum Program itu dan yakin bahwa KNIP yang mayoritas masih terdiri dari para pendukung kabinet lama juga tidak akan menerimanya, maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaharui mandat Sjahrir, dan percaya kepada umpan jabatan untuk menarik sebanyak mungkin dukungan perorangan yang terpencar-pencar itu ke dalam suatu kabinet baru.

Pada tanggal 2 Maret 1946 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengadakan rapat lagi yang dibuka oleh ketua KNIP Mr. Asaat. Dalam rapat itu Hatta mengumumkan bahwa Sjahrir dipilih kembali sebagai formatur kabinet baru²⁷ yang mendasarkan programnya pada program Lima Pasal Sukarno, yaitu:

1. Berunding atas dasar pengakuan Negara Republik Indonesia (100%).
2. Mempersiapkan rakyat dan negara di segala lapangan

²⁵Ibid., hal. 221.

²⁶Ibid., hal. 223.

²⁷Ibid; Osman Raliby, op. cit., hal. 265.

- politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia.
3. Mencapai susunan pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis.
 4. Berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan produksi dan pembagian makanan dan pakaian.
 5. Tentang perusahaan perkebunan yang penting hendaknya oleh pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunya, hingga memenuhi maksud sebagai tercantum dalam UUD pasal 33 (hal kesejahteraan sosial).²⁸

Dengan dikemukakannya program Lima Pasal itu, maka garis-garis perpecahan semakin tajam. Sesuai dengan keputusan rapat Persatuan Perjuangan, Wikana yang pada waktu itu adalah pemuda terkemuka dari Pesindo, mengumumkan kepada sidang KNIP bahwa mengingat penolakan pemerintah, khususnya Sukarno dan Hatta untuk menerima Minimum Program maka Persatuan Perjuangan melarang semua anggotanya untuk duduk dalam kabinet.²⁹ Ujian yang berat bagi solidaritas Persatuan Perjuangan telah datang, dan tak lama kemudian banyak di antara partai-partai anggota organisasi itu menyatakan dukungannya kepada pemerintah.

Selama proses pembentukan kabinet berlangsung, banyak partai yang tadinya menjadi anggota Persatuan Perjuangan berturut-turut mengundurkan diri dari keanggotaannya. Pada tanggal 1 Maret 1946 Barisan Tani Indonesia (BTI), secara resmi keluar dari Persatuan Perjuangan, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 1946, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan Dewan Perjuangan Jawa Timur menarik diri dari organisa-

²⁸ Soebadio Sastrosatomo, *op. cit.*, hal. 234-235; Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 347.

²⁹ *Ibid.*, hal. 349; Tan Malaka, *op. cit.*, hal. 224.

si itu, dan pada tanggal 7 Maret 1946 Koperasi Rakyat Indonesia juga melakukan hal yang sama.³⁰ Pada hari itu juga BTI dan Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia keduanya di Yogyakarta, Partai Indonesia Maluku, Partai Katolik, Partai Sosialis di Jakarta, Parkindo serta Gerakan Rakyat Indonesia di Surakarta, semuanya menyatakan kepercayaan sepenuhnya kepada Sjahrir dan program Lima Pasal.³¹

Sesudah sidang pleno KNIP di Solo yang berlangsung dari tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 1946 itu, rakyat Indonesia tidak lagi diliputi oleh suasana persatuan nasional. Masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua kelompok, antara yang menyokong pemerintah dan yang menentang pemerintah.

B. Oposisi Persatuan Perjuangan Masa Kabinet Sjahrir II

Pada tanggal 12 Maret 1946 Sutan Sjahrir berhasil menyusun kabinet barunya.³² Dengan dukungan Presiden Sukarno akan tetapi mendapat tentangan dari golongan oposisi yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan, Kabinet Sjahrir II itu akan bekerja berdasarkan program Lima Pasal.

Untuk menghadapi Belanda, tanggal 13 Maret 1946 sehari setelah pelantikan kabinet barunya,³³ Sjahrir menyampaikan

³⁰Ben Anderson, op. cit., hal. 349-350; Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 241.

³¹Ben Anderson, op. cit., hal. 350.

³²Ibid., hal. 351; Osman Raliby, op. cit., hal. 275-276.

³³Susanto Tirtoprodjo, Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia (Djakarta: P.T. Pembangunan, 1963), hal. 19.

usul balasan sebagai jawaban atas keterangan politik Van Mook pada tanggal 10 Februari 1946. Sjahrir menyatakan bahwa Republik menolak setiap bentuk serikat, sebaliknya menuntut pengakuan kedaulatan Republik atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Jadi dalam hubungan Hindia-Belanda, pemerintah Republik (yang berdaulat atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia-Belanda) itu adalah satu-satunya wakil.

Sjahrir juga mengatakan tidak perlu ada masa peralihan, karena Republik telah berdiri dan menjalankan kekuasaan di tangannya. Selanjutnya ia menolak adanya kekuasaan luar biasa Wakil Raja, sebaliknya mendesak supaya pasukan Belanda ditarik segera setelah persetujuan dicapai.

Sementara perundingan berlangsung, ia juga mengusulkan semua gerakan pasukan harus dihentikan. Dalam waktu itu Republik akan membebaskan dan melindungi interniran.

Usul balasan tersebut ditolak pihak Belanda yang diwakili Van Mook. Sebaliknya Van Mook menarik ilham dari persetujuan Perancis dan Indho China, pada tanggal 6 Maret 1946.³⁴ Dalam persetujuan itu ditetapkanlah Republik Vietnam di bawah Ho Chi Minh dengan wilayah meliputi Vietnam Utara, yang akan menjadi federasi Indo China dan mengadakan Uni dengan Perancis. Dengan menggunakan persetujuan tersebut sebagai model, Van Mook mengajukan rumusan usul kepada Sjahrir, yang isinya adalah mengakui Republik Indonesia dengan wilayah

³⁴Ben Anderson, op. cit., hal. 354; G. Moedjanto, op. cit., hal. 11.

jawa yang kemudian akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, serta akan mengadakan Uni dengan kerajaan Belanda. Selanjutnya Van Mook juga mengusulkan agar wakil-wakil dari seluruh bagian Hindia Belanda dan golongan minoritas bersidang untuk menetapkan bentuk (susunan) dari pemerintah negara Indonesia dikelak kemudian hari serta hubungannya dengan kerajaan Belanda. Sementara itu, pasukan Belanda supaya diijinkan masuk ke Indonesia untuk menyelesaikan tugas Sekutu.

Sjahrir tertarik dengan usul model Indho China itu. Kemungkinan Sjahrir terkesan dengan strategi Ho Chi Minh, atau lebih mungkin lagi karena Sjahrir berhasil diyakinkan oleh Sir Archibald Clark Kerr bahwa Republik tidak dapat mengharapkan bantuan dalam perundingan itu tanpa mau memberi konsesi penting kepada Belanda. Selain itu Sjahrir juga menyadari bahwa sebagian daerah Indonesia Timur telah dikuasai Belanda kembali, dan ia tidak merasa yakin akan kekuatan militer Republik. Apa pun motivasinya yang sesungguhnya, usul-usul Sjahrir dalam perundingan selanjutnya ia hanya menuntut pengakuan kedaulatan de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera.

Sjahrir menyadari konsesi yang akan diberikan kepada pihak Belanda itu nanti akan menimbulkan kemarahan di kalangan oposisi, dan dapat dimanfaatkan untuk menjatuhkan kabinetnya. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka antara tanggal 13-16 Maret 1946, sepucuk surat rahasia dikirim ke Yogyakarta, berisi perintah untuk menangkap sejumlah pemimpin oposisi

tergabung dalam Persatuan Perjuangan. Adanya surat itu diakui oleh Amir Sjarifuddin dalam kesaksiannya di muka sidang pengadilan perkara Tan Malaka pada tahun 1948. Tetapi Subadio Sastrosatomo, tokoh PSI yang mengaku sebagai kurir, menyatakan bahwa perintah penangkapan itu disampaikan secara lisan.³⁵ Dengan disingkirkannya pemimpin-pemimpin oposisi, Sjahrir berharap akan dapat melangsungkan perundingan dengan Belanda secepatnya.

Pada pertengahan bulan Maret 1946 Persatuan Perjuangan mengadakan kongres di Madiun. Kongres yang dibuka pada tanggal 15 Maret 1946 itu jumlah organisasi yang diwakili tidak ada 40 organisasi, suatu jumlah yang sedikit dibandingkan peserta kongres di purwokerto dan Solo yang diwakili oleh 141 organisasi.³⁶ Pada tanggal 17 Maret 1945 peserta kongres yang terdiri dari Barisan Banteng, Badan Pemberontak RI, pimpinan Bung Tomo, Laskar-laskar Rakyat serta Polisi khusus, bersiap-siap untuk mengadakan rapat penutupan dan arak-arakan (pawai) keliling kota. Pesindo yang saat itu berada di kota itu dan berpihak kepada pemerintah menuntut bergabung dalam arak-arakan itu dengan alasan menjaga keamanan, dan disetujui pemimpin Persatuan Perjuangan.³⁷ Akhirnya kongres itu berakhir tanpa keributan,

³⁵Ben Anderson, op. cit., hal. 323.

³⁶Ibid., hal. 356; Soebadio Sastrosatomo, op. cit., hal. 242.

³⁷Tan Malaka, op. cit., hal. 321-322; Ben Anderson, op. cit., hal. 357-358.

akan tetapi pada sore harinya kesatuan Pesindo itu mengadakan penangkapan kepada pemimpin-pemimpin Persatuan Perjuangan, antara lain Tan Malaka, Mohammad Yamin, Abikusno Tjokrosujoso serta Sukarni, untuk selanjutnya dibawa ke markas besar Polisi Militer di Madiun.

Sesudah penangkapan itu, tak lama kemudian Djoko Sujono dari Pesindo, mengambil alih pimpinan. Selanjutnya setelah mendapat izin dari penguasa setempat, para tahanan itu dibawa ke Yogyakarta untuk dihadapkan kepada Presiden. Dalam perjalanan dari Madiun itu mereka dikawal oleh Pesindo, dan melalui pos-pos Pesindo mereka menuju ke Kadipolo, Solo dan tiba di sana fajar keesokan harinya.³⁸ Di sana mereka ditahan sampai tanggal 22 Maret 1946, dan tanggal itu juga mereka dipindahkan ke Jetis, suatu desa beberapa kilo meter dari Solo.³⁹ Dan akhirnya pada tanggal 22 April 1946 itu, mereka dipindahkan ke Tawang mangu, suatu daerah di kaki Gunung Lawu beberapa puluh kilo meter dari kota Solo.⁴⁰

Selama berada dalam tahanan itu, pada suatu hari tanggal 23 Maret 1946, Amir Sjarifuddin mengirim Mayor Jendral Djoko Sujono untuk mengunjungi Tan Malaka di Jetis guna menjajaki kemungkinan suatu penyelesaian, tetapi Tan Malaka menuntut pembebasannya dahulu sebagai syarat untuk mengada-

³⁸Tan Malaka, op. cit., hal. 325.

³⁹Ibid., hal. 327; Ben Anderson, op. cit., hal. 358.

⁴⁰Tan Malaka, op. cit., hal. 328.

dakan pembicaraan-pembicaraan.⁴¹ Dengan demikian janji dari mereka yang mengadakan penangkapan untuk membawa para tahanan menghadap Presiden Sukarno itu bohong belaka, dan selama berada dalam tahanan itu mereka diawasi dengan ketat.

Setelah penangkapan dilakukan, pemerintah tidak segera mengumumkan sebab-sebab dilakukan penangkapan. Dan baru pada tanggal 1 April 1946 pemerintah Republik mengeluarkan alasan resmi tentang penangkapan terhadap sejumlah tokoh Persatuan Perjuangan itu. Ada pun alasan penangkapan itu antara lain berisi tuduhan bahwa mereka yang ditangkap melakukan oposisi yang sudah menjurus kepada tidak atau kurang loyal yang bertujuan untuk merubah struktur pemerintahan pusat, melalui cara-cara di luar konstitusi.⁴² Tuduhan-tuduhan itu tampak sekali berbau politik dari mereka yang berkuasa sebagai usaha untuk mematahkan atau membungkam para pengritiknya, dan tentu saja alasan itu dibuat untuk membenarkan tindakan si pembuat alasan, dalam hal ini penguasa pemerintahan.

Yang menarik perhatian dari peristiwa penangkapan para tokoh Persatuan Perjuangan itu adalah sikap pimpinan militer. Dalam pengumumannya markas besar tentara mengeluarkan pernyataan bahwa penangkapan itu bukanlah perintah pucuk pimpinan tentara.⁴³ Di samping itu pengumuman tentang penang-

⁴¹Ibid.

⁴²Ben Anderson, op. cit., hal. 359-360.

⁴³Ibid., hal. 360.

kan itu tidak ditandatangani oleh Presiden Sukarno.⁴⁴ Kedua hal tersebut di atas memperkuat dugaan bahwa penangkapan itu hanya merupakan inisiatif dari Sjahrir dan teman-teman separtainya, terutama Amir Sjarifuddin (Menteri Pertahanan) dan dr. Sudarsono (Menteri Dalam negeri). Oleh karena itu semakin jelaslah pertentangan antara kelompok Sjahrir dan kelompok Tan Malaka, dan untuk selanjutnya Sjahrir segera melanjutkan rencana politiknya.

Pada tanggal 27 Maret 1946, Sjahrir menyampaikan usul balasan yang isinya menuntut pengakuan kekuasaan Republik de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera; serta mengusulkan agar kedua pemerintah (Republik dan Kerajaan Belanda) bekerja sama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat, yang selanjutnya akan menjadi partner dalam ikatan kenegaraan berbentuk Uni bersama dengan Suriname, Curaçao dan kerajaan Belanda. Sjahrir juga mengusulkan bahwa wakil-wakil dari luar Jawa, Madura dan Sumatera serta golongan minoritas ikut ambil bagian dalam pembicaraan-pembicaraan untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat dan Uni itu. Di samping itu usul-usul tersebut juga disertai pernyataan tidak berkeberatan adanya pasukan Belanda untuk menunaikan tugas Sekutu dan menghentikan permusuhan segera setelah persetujuan tercapai.⁴⁵ Dalam usul itu Sjahrir banyak memberikan konsesi ke-

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Susanto Tirtoprodjo, op. cit., hal. 19; G. Moedjanto, op. cit., hal. 12.

pada Belanda, bahkan ada kecenderungan menerima tuntutan politik pemerintah Belanda tertanggal 10 Februari 1946. Sjahrir yakin, bagian-bagian lain dari Republik atas Jawa, Madura dan Sumatera nanti akan menggabungkan diri dengan Republik. Sementara itu, Van Mook merasa akan terjadi titik pertemuan bila perundingan dilanjutkan, maka diambillah kesepakatan untuk melakukan perundingan langsung dengan pemerintah Belanda. Perundingan itu nanti akan diselenggarakan di Hoge Veluwe, negeri Belanda.⁴⁶

Pada tanggal 4 April 1946, delegasi Indonesia untuk perundingan Hoge Veluwe yang terdiri dari Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, Mr. A.K. Pringgodigdo berangkat ke negeri Belanda, dengan didampingi Van Mook dan Sir Archibald Clark Kerr.⁴⁷ Pada akhir bulan April tahun itu delegasi Indonesia tiba kembali di Jakarta, tanpa membawa hasil. Perundingan yang berlangsung dari tanggal 9 sampai 27 April 1946 itu mengalami kegagalan karena beberapa hal, yaitu:

1. Pemerintah Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan de facto Republik atas wilayah Jawa dan Madura saja, Sumatera tidak.
2. Pemerintah Belanda tidak bersedia memperlakukan Republik sebagai negara sederajat (sebagai negara lain), karena menganggap Republik sebagai suatu negara dalam lingkungan kerajaan Belanda.
3. Republik menghendaki pengakuan sebagai "free state", sedangkan pihak Belanda menghendaki Republik sebagai anggota "Commonwealth" semata.

⁴⁶Susanto Tirtoprodjo, loc. cit.; Samawi, op. cit., hal. 31.

⁴⁷Osman Raliby, op. cit., hal 286; Ben Anderson, op. cit., hal. 363.

4. Republik menghendaki adanya ketentuan Mahkamah Arbitrase, sedangkan Belanda menghendaki adanya Badan Pendamai (Pengrūkun) semata bila ada perselisihan kedua belah pihak.⁴⁸

Konsekwensi utama gagalnya perundingan tersebut, mengurangi optimisme penyelesaian diplomatik yang cepat, sebaliknya memperkuat keyakinan golongan yang berpendapat Belanda akan segera melancarkan serangan militer terhadap Republik Indonesia. Maka atas prakarsa Sarmidi Mangunsarkoro, pada tanggal 5 Mei 1946 diadakanlah suatu konperensi yang dihadiri partai-partai dan badan-badan perjuangan, diantaranya Partai Komunis Indonesia (PKI); Partai Rakjat Djelata (PRD), Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), Barisan Rakyat, Partai Sosialis, Masyumi, Pesindo dan Barisan Tani Indonesia (BTI) untuk membentuk sebuah "Konsentrasi Nasional".⁴² Konsentrasi Nasional itu dibentuk guna memperkuat kesatuan nasional dalam menghadapi sikap pemerintah Belanda.⁵⁰

Pada tanggal 2 Mei 1946 pemerintah Belanda menyatakan pendiriannya mengenai perundingan kepada Indonesia. Ada pun isinya, pemerintah Belanda hanya mau mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatera dikurangi daerah-daerah pendudukan, serta menuntut agar pemerin-

⁴⁸G. Moedjanto, op. cit., hal. 12.

⁴⁹Lasjkar, 8 Mei 1946.

⁵⁰Ben Anderson, op. cit., hal. 413; A.H. Nasution, Se-kitar Perang Kemerdekaan Indonesia III (Bandung: Angkasa, 1970), hal. 57.

tah Belanda diberi hak mengatur tata tertib termasuk pemakaian militer di wilayah Republik bila diperlukan.⁵¹ Usul tawaran pihak Belanda itu tidak diterima Republik Indonesia yang telah banyak memberi konsesi.

Pada tanggal 26 Mei 1946 Konsentrasi Nasional mengadakan rapat yang pada intinya membahas tentang kegagalan perundingan antara Indonesia dengan Belanda itu dan merumuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapi kemungkinan serangan militer dari pihak Belanda. Pada akhirnya rapat itu memutuskan bahwa Konsentrasi Nasional berdiri di belakang pemerintah secara kritis, dan menuntut dibentuknya kabinet koalisi nasional untuk memperkuat dukungan rakyat terhadap pemerintah.⁵²

Kabinet Sjahrir tidak menanggapi keinginan Konsentrasi Nasional untuk membentuk kabinet koalisi nasional, karena hal itu akan memberikan peluang kepada golongan revolusioner untuk duduk dalam pemerintahan. Pada hal Sjahrir mengetahui bahwa hambatan mendasar tentang penyelesaian lewat perundingan adalah kekhawatiran masyarakat Belanda mengenai situasi "radikal dan revolusioner" yang sedang terjadi di Jawa. Di samping itu Van Mook telah menaruh kepercayaan pribadi kepada Sjahrir, sehingga jika ia digantikan oleh orang lain yang mungkin lebih dapat diterima golongan oposisi maka perundingan akan lebih sulit. Sjahrir menyadari bahwa kemampu-

⁵¹ Seperempat Abad DPR RI (Jakarta: Sekretariat DPR GR, 1970), hal. 57.

⁵² A.H. Nasution, Sekitar Perang ... Loc. cit.

annya membungkam atau membujuk golongan oposisi.⁵³

Pada tanggal 5 Juni 1946 Sjahrir menolak usul Belanda, karena pada dasarnya usul yang diajukan Van Mook tersebut tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan yang sangat memojokkan posisi Republik Indonesia.⁵⁴ Sebagai ganti, Sjahrir kemudian menyerahkan usul kepada Van Mook pada tanggal 17 Juni 1946 yang isinya menuntut supaya Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik atas Jawa dan Sumatera, serta pendaratan-endaratan pasukan Belanda dihentikan. Selain itu Sjahrir juga menyatakan bersedia membentuk persekutuan dengan kerajaan Belanda sebagai dua negara merdeka.⁵⁵ Usul balasan yang diajukan Sjahrir itu menggambarkan semakin kokohnya pendirian Indonesia dibanding dengan usul-usul pada tanggal 27 Maret 1946.

Meskipun usul-usul Sjahrir itu dirahasiakan, akan tetapi berita tentang isinya dengan cepat bocor dalam pers Belanda di Jakarta. Hal itu menimbulkan suasana krisis politik dalam negeri, karena golongan oposisi mengecam keras usul-usul pada tanggal 17 Juni 1946 itu. Kecemasan-kecemasan pemerintah terungkap dengannjelas, dua keputusan penting diambil waktu itu. Diumumkan bahwa, sejak tanggal 26 Juni 1946 Jendral Sudirman dinaikkan kedudukannya menjadi panglima untuk seluruh Angkatan Bersenjata RI, dan bertanggung jawab

⁵³K.M.L. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hal. 31.

⁵⁴Ibid; Ben Anderson, op. cit., hal. 415.

langsung kepada Presiden Sukarno;⁵⁵ dan dalam minggu itu polisi nasional akan dipindahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan ditempatkan langsung di bawah Sjahrir.⁵⁶ Begitu juga keadaannya dalam golongan oposisi, mereka khawatir pemerintah akan memakai kekerasan untuk menindas mereka demi lancarnya perundingan.

Dalam suasana kegelisahan dan ketakutan yang mendalam itu, maka peristiwa demi peristiwa bergerak dengan cepat. Pada tanggal 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sjahrir bersama rombongan tiba di Solo, sesudah mengadakan peninjauan dari Jawa Timur sehubungan dengan urusan pengiriman beras ke India. Mereka terdiri dari Sjahrir, Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan, Menteri Sosial Maria Ulfah Santoso, Mayor Jendral Sudibyo, dr. Sudarsono dan lain-lainnya, diculik oleh pihak yang tidak puas dengan kebijaksanaan pemerintah.⁵⁷ Ada pun yang melakukan tindak penculikan itu adalah Abdulkadir Jusuf, anak buah Jendral Sudarsono, Panglima Divisi III, bekerja sama dengan Kolonel Sutarto, orang yang berpengaruh di Solo.⁵⁸ Tindakan perwira muda itu mungkin sekali didorong oleh semangat revolusi visi Tan Malaka, akan tetapi Tan Malaka sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang penculikan itu, apa lagi merencanakannya, sebab waktu itu ia masih me-

⁵⁵Ibid., hal 416; A.H. Nasution, Tentara... I ..., hal. 286.

⁵⁶Ben anderson, op. cit., hal. 417.

⁵⁷Osman Raliby, op. cit., hal. 323.

⁵⁸Ben Anderson, op. cit., hal. 420.

ringkuk di penjara.

Dengan adanya penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Sjahrir itu, pada tanggal 28 Juni 1946 pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya, dan Dewan Pertahanan Negara dibentuk dengan kekuasaan penuh untuk mengambil setiap langkah yang dianggap perlu.⁵⁹ Selanjutnya pemerintah berusaha mencari Sjahrir dan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Setelah berita penculikan beredar di tengah-tengah masyarakat luas, maka pada tanggal 29 Juni 1946 pagi Presiden Sukarno memberikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia sebagai berikut:

"Berhubung kedjadian-kedjadian dalam negeri jang membahayakan keselamatan negara dan perdjoangan kemerdekaan kita, maka kami Presiden Republik Indonesia dengan persetudjuan kabinet dalam sidangnja pada tanggal 28 Juni 1946, mengambil ~~kekuasaan~~ pemerintah untuk semetara waktu sampai kembalinja keadaan biasa, jang memungkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinja".⁶⁰

Dalam rangka usaha membebaskan Perdana Menteri Sjahrir, pada tanggal 30 Juni 1946 para pemimpin pemerintah mengadakan rapat bersama Jendral Sudirman di Yogyakarta. Sukarno, Hatta dan Amir Sjarifuddin mencurigai bahwa Sudirman mengetahui di mana Sjahrir berada, dan meminta dengan tegas agar ia menjamin bebasnya Sjahrir. Akan tetapi Sudirman menolak

⁵⁹ Osman Raliby, loc. cit.

⁶⁰ Ibid., hal. 324.

untuk mengambil tindakan dan segera kembali ke Surakarta.⁶¹ Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memainkan kartu trufnya, yaitu Sukarno.

Petang hari itu, tanggal 30 Juni 1946, Presiden Sukarno berpidato di Radio Republik Indonesia yang disiarkan ke seluruh penjuru tanah air. Sukarno berbicara dengan nada yang "lebih banyak prihatin daripada marah", ia menggambarkan golongan oposisi yang tidak memahami perbedaan antara penentangan dan pengrusakan. Negara memang memerlukan oposisi, tetapi oposisi yang harus tahu batas-batasnya. Kestabilan negara harus dipelihara. Penculikan terhadap perdana menteri dan pejabat-pejabat lainnya akan memberikan kesempatan kepada Belanda untuk mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia tidak dapat memerintah dirinya sendiri dan kekecauan serta keonaran terjadi di mana-mana.

Orang-orang yang melakukan penculikan itu membayangkan dirinya sebagai "lebih kiri dari kiri", dan lebih radikal daripada orang-orang radikal, dengan tidak menyadari bahwa tindakan mereka itu dimanfaatkan NICA. Sementara secara subyektif keinginan-keinginan mereka mungkin baik; tetapi secara obyektif tindakan-tindakan mereka itu berbahaya dan menghancurkan. Semboyan-semboyan kedaulatan rakyat telah disalah gunakan secara serampangan untuk membalikkan "anak-anak kita" menentang pemerintah, beberapa pemuda yang idealis telah jatuh ke dalam perangkap.

⁶¹Ben Anderson, op. cit., hal. 425.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa pada tanggal 28 Juni 1946 itu seluruh kekuasaan negara dipusatkan di tangannya sendiri, hal itu bukan untuk menjadikan dirinya seorang diktator tetapi untuk menjamin kestabilan jangka pendek. Bila keadaan sudah pulih kembali, ia akan mengembalikan kekuasaan itu kepada suatu kabinet. Meskipun betapa mendalamnya ketidakpuasan dan sengitnya terhadap pemerintah, penculikan itu bukanlah cara yang tepat untuk menyatakan penentangan. Anarki dan kekacauan tidak akan membawa keuntungan kepada siapapun juga. Oleh karena itu Sjahrir harus dibebaskan.⁶²

Kecaman dan celaan keras Sukarno terhadap tindak penculikan itu, dirangkai dengan kata-kata yang bernada agak ramah kepada pemuda memberikan hasil yang diharapkan. Pada malam itu juga Sjahrir dibebaskan, dan kemudian dikawal ke Surakarta⁶³ untuk selanjutnya meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta. Presiden Sukarno segera memerintahkan kepada Jendral Sudirman untuk menahan Jendral Sudarsono, akan tetapi Jendral Sudirman enggan melakukan tugas itu.⁶⁴

Sesudah Sjahrir aman di Jakarta, maka pemerintah segera melancarkan serangan terhadap para pemimpin golongan oposisi yang diduga terlibat dalam kasus penculikan Sjahrir. Pada tanggal 1 Juli 1946 malam hari, polisi negara melaku-

⁶²Osman Raliby, op. cit., hal. 324-325.

⁶³Ben Anderson, op. cit., hal. 425.

⁶⁴Ibid., hal. 426; Iwa Kusuma Sumantri, op. cit., hal. 142.

kan penangkapan atas diri Buntaran, Boedyarto, Sumantoro, Chaerul Sleh, Pandu Kartawiguna, Mohammad Saleh, Ibnu Par-na, Adam Malik, Sayuti Melik, Subardjo dan sejumlah tokoh lainnya di Yogyakarta. Kemudian esok harinya para tahanan itu dibawa ke penjara Wirogunan di kota itu.⁶⁵

Keesokan harinya Jendral Sudarsono mendengar berita tentang penangkapan para pemimpin politik tersebut, dan so-re harinya bersama Mayor Abdulkadir Jusuf pergi ke Surakar-ta untuk melaporkan hal itu kepada Jendral Sudirman. Sete-lah mendengar laporan tentang hal itu, Jendral Sudirman ma-rah atas peristiwa penahanan para pemimpin politik itu, dan memerintahkan kepada Jendral Sudarsono untuk kembali ke Yog-yakarta dan membebaskan para tahanan atas namanya.⁶⁶

Atas nama Jendral Sudirman mereka berhasil dibebaskan, selanjutnya mereka dibawa ke markas Letnan Kolonel Suharto di Wiyoro.⁶⁷ Aksi para golongan penentang kebijaksanaan Sjah-rir itu belum berakhir. Pada tanggal 3 Juli 1946 pagi, Jen-dral Sudarsono bersama para pemimpin politik yang ada di Wiyoro menghadap Presiden di Yogyakarta, untuk mengusulkan perubahan kabinet.⁶⁸ Presiden diminta menandatangani naskah susunan kabinet yang diajukan Jendral Sudarsono, tetapi Pre-

⁶⁵Ibid; Ben Anderson, op. cit., hal. 427.

⁶⁶Ibid., hal. 430; Iwa Kusuma Sumantri, op. cit., hal. 143.

⁶⁷Ben Anderson, op. cit., hal. 432.

⁶⁸Ibid., hal. 437; Osman Raliby, op. cit., hal. 339.

siden menolaknya bahkan Sudarsono dan rombongan ditahan.⁶⁹

Pada sore harinya Panglima Besar Jendral Sudirman menghadiri suatu rapat rahasia yang diselenggarakan Sukarno beserta anggota kabinet dan wakil berbagai organisasi dan politik. Rapat itu menghasilkan kompromi bahwa Jendral Sudirman menyetujui untuk menandatangani suatu perintah memberhentikan Jendral Sudarsono dari semua fungsi militernya, serta menyetujui penahanan terhadap sejumlah pemimpin sipil dan beberapa pemimpin militer. Dan untuk sementara Sukarno akan terus mengepalai pemerintahan dan dibantu oleh Dewan Pertahanan Negara.⁷⁰ Maka jelaslah, Jendral Sudirman sejak itu memilih sikap melawan terhadap segala usaha yang melemahkan kedudukan pemerintah Republik Indonesia.

Penangkapan para pemimpin golongan oposisi adalah suatu bukti bahwa pemerintah Republik Indonesia mulai memperlihatkan kekuasaannya, yaitu mengatasi segala rintangan yang menentang kebijaksanaan pemerintah. Tindakan pemerintah itu adalah jawaban dari teka-teki siapa dan apa sumber kekacauan dalam negeri.

Dalam menghadapi Belanda-pun pemerintah Republik Indonesia juga mengalami kesulitan, karena di samping menjalankan politik diplomasi, Belanda juga menggunakan kekuatan militer untuk mencapai maksudnya. Kekuasaan Belanda semakin

⁶⁹Ben Anderson, loc. cit.; Osman Raliby, loc. cit.; Revue Indonesia No. 21, Th. 1946, hal. 300.

⁷⁰Ben Anderson, op. cit., hal. 439.

meluas setelah Inggris menyerahkan kota-kota penting kepadanya seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang. Selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 1946, Inggris menyerahkan kekuasaan penuh atas wilayah di luar Jawa dan Sumatera kepada Belanda.⁷¹ Dengan demikian Belanda mendapat kebebasan untuk melaksanakan politik memecah-belah dan menguasai untuk melemahkan kekuatan Republik Indonesia.

Pada tanggal 15 Juli 1946, Van Mook memprakarsai konferensi Malino yang dihadiri wakil-wakil dari daerah Kalimantan, Sulawesi, Bangka, Belitung dan Ambon. Dalam konferensi itu Van Mook mengutarakan rencana pembentukan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dalam kerajaan Belanda, yang akan terdiri dari negara-negara bagian Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur.⁷²

Selanjutnya pada tanggal 1 sampai 12 Oktober 1946 Van Mook juga menyelenggarakan konferensi di Pangkal Pinang (Bangka), khusus membahas tentang kedudukan golongan minoritas yang terdiri dari golongan peranakan Tionghoa, Arab dan golongan Belanda (termasuk Indo Belanda).⁷³

Pada tanggal 7 Desember 1946 di Denpasar, Bali, Van

⁷¹Samawi, op. cit., hal. 35; Susanto Tirtoprodjo, op. cit., hal. 14.

⁷²Ibid; Osman Raliby, op. cit., hal. 351; Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1952), hal. 11.

⁷³Ibid; Osman Raliby, op. cit., hal. 419; Susanto Tirtoprodjo, op. cit., hal. 15.

Mook menyelenggarakan konferensi untuk wakil-wakil dari daerah wilayah Indonesia bagian Timur dan Nusa Tenggara. Konferensi ini pada tanggal 24 Desember 1946 berhasil membentuk Negara Indonesia Timur, dengan Soekawati dari Bali sebagai Presidennya.⁷⁴

Usaha Van Mook membentuk negara-negara boneka itu, dalam rangka mengadakan pendekatan kepada bangsa Indonesia dengan cara licik, serta untuk mengucilkan Indonesia guna mewujudkan cita-cita kembalinya sistem kolonial Belanda di Indonesia.

Sementara itu, Inggris yang bertugas sebagai penengah perundingan antara Indonesia dan Belanda, menunjuk Lord Killearn, koordinator masalah-masalah politik daerah jajahan Inggris di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 25 Agustus 1946 Lord Killearn tiba di Jakarta dan disambut oleh dr. Darma Setiawan.⁷⁵

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1946, Lord Killearn dengan didampingi dr. Darma Setiawan pergi ke Yogyakarta untuk menemui Sjahrir guna membicarakan dasar-dasar perundingan. Mereka berhasil membuat kesepakatan bahwa sebelum perundingan politik antara Indonesia dan Belanda dimulai, terlebih dahulu akan diadakan perundingan mengenai gencatan senjata, dan bila pihak Republik sudah memperoleh

⁷⁴Ibid; Muhammad Yamin, loc. cit.

⁷⁵Radik Utoyo Sudiro, op. cit., hal. 78.

kesepakatan, akan mengirimkan wakil ke Jakarta untuk mengadakan perundingan mengenai teknik serta pelaksanaan gencatan senjata di bawah pimpinan militer Inggris.⁷⁶

Untuk menhadapi perundingan dengan Belanda yang akan datang, Presiden Sukarno menunjuk kembali Sjahrir sebagai formatur kabinet baru. Sedangkan pemerintah Belanda di Den Haag, juga dalam upaya melancarkan jalannya perundingan maka pada tanggal 10 September 1946, membentuk Komisi Jendral yang akan bertindak sebagai delegasi Belanda dalam perundingan dengan Indonesia. Komisi Jendral itu terdiri dari tiga orang yaitu, Prof.Ir.W. Schermerhorn (sebagai ketua), F.de Boer serta M.J.M. Max van Poll (keduanya sebagai anggota) dan setelah tiba di Indonesia pada tanggal 17 September 1946 delegasi itu ditambah dengan Dr. H.J. van Mook.⁷⁷

Pada tanggal 20 September 1946 bertempat di Markas Besar Tentara Sekutu, Jakarta, dimulailah perundingan gencatan senjata antara Indonesia, Sekutu dan Belanda. Dalam perundingan itu Indonesia diwakili oleh Mayor Jendral Soedibyo, Komodor Udara Suryadarma, Kolonel Simbolon, Letnan Kolonel Abdullah Kartawirana dan Letnan Kolonel Soekandar Tjokronegoro. Pihak Belanda diwakili Mayor Jendral D.H. Buurman van Vreeden, sedangkan Inggris oleh Mayor Jendral J.F.R.

⁷⁶Osman Raliby, op. cit., hal. 385; Pantja Raya No. 21/1, 15 September 1946, hal. 553.

⁷⁷Osman Raliby, op. cit., hal. 406; Susanto Tirtoprodjo, op. cit., hal. 20; Samawi, op. cit., hal. 37.

Forman dan Brigadir Jendral I.C.A. Lauder.⁷⁸

Perundingan gencatan senjata itu menemui jalan buntu, karena adanya perbedaan pendapat yang sangat tajam antara Indonesia disatu pihak dengan Belanda dan Inggris di pihak lain. Indonesia bersedia mengadakan gencatan senjata di seluruh wilayah Indonesia; pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia dihentikan; serta ada jaminan dari Inggris untuk tidak mempersenjatai Belanda dan menyingkirkan orang Jepang yang memusuhi Republik dari Indonesia.⁷⁹ Inggris dan Belanda menolak persyaratan itu, karena pada dasarnya mereka menghendaki gencatan senjata dalam arti terbatas pada garis-garis perbatasan, sementara di wilayah lain pasukan Belanda bebas merebut dan menguasai wilayah Indonesia, serta tetap mendatangkan pasukan Belanda ke Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa gencatan senjata yang diusulkan Inggris dan Belanda hanyalah suatu taktik semata untuk memperlengah kekuatan Indonesia, sebaliknya memperkuat posisi mereka di Indonesia.

C. Oposisi Persatuan Perjuangan Masa Kabinet Sjahrir III

Pada tanggal 2 Oktober 1946 Sjahrir berhasil membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Sjahrir III, dengan anggo-

⁷⁸Ibid; A.H. Nasution, Tentara Nasional Indonesia Jilid II (Djakarta: Seruling Masa, 1968), hal. 51.

⁷⁹Ibid; Samawi, op. cit., hal. 38.

ta yang terdiri dari berbagai organisasi politik.⁸⁰ Kabinet Sjahrir III tidak membuat program baru, tetapi melanjutkan program kabinet sebelumnya.

Untuk menghadapi perundingan dengan Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1946, Kabinet Sjahrir III bersidang untuk membentuk delegasi yang akan mewakili Indonesia dalam perundingan dengan Belanda yang akan diadakan pada tanggal 7 Oktober 1946 nanti.⁸¹ Adapun susunan delegasi yang berhasil dibentuk itu terdiri dari Sutan Sjahrir sebagai ketua, delegasi, Mr. Susanto Tirtoprodjo, dr. A.K. Gani, Mr. Mohammad Roem, ketiganya sebagai anggota, serta anggota cadangan yaitu Mr. Amir Sjarifuudin, dr Sudarsono dan dr. J. Leimena.⁸²

Pada tanggal 7 Oktober 1946 Lord Killearn berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda di meja perundingan. Dalam perundingan itu kedua delegasi sepakat untuk membicarakan masalah gencatan senjata dalam tingkat panitia yang diketuai oleh Lord Killearn. Perundingan tingkat panitia itu menghasilkan persetujuan yang isinya, akan diadakan gencatan senjata di kedua belah pihak serta akan diadakan pembentukan sebuah komisi bersama gencatan senjata, untuk mengurus ma-

⁸⁰Lasjkar, 20 Oktober 1946; Osman Raliby, op. cit., hal. 419-420; Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta (Jogjakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hal. 143.

⁸¹Lasjkar, 8 Oktober 1946.

⁸²Ibid; Susanto Tirtoprodjo, op. cit., hal. 22.

salah-masalah teknis pelaksanaan gencatan senjata.⁸³ Selain itu kedua delegasi juga sepakat akan mengadakan perundingan politik secepat mungkin.

Pada tanggal 9 Oktober 1946 pembicaraan tentang gencatan senjata dimulai, dengan susunan delegasi sebagai berikut: Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir, dr. Sudarsono, Mayor Jendral Soedibyo, Kolonel Simbolon dan Letnan Kolonel Abdullah Kartawirana; Belanda diwakili Prof. Ir. W. Schermerhorn, Dr. Idenburg serta Letnan Jendral Spoor, sedangkan pihak Inggris diwakili Mayor Jendral J.F.R. Forman dan Lord Killearn sebagai ketua perundingan.⁸⁴

Setelah beberapa kali berunding, maka pada tanggal 14 Oktober 1946 dicapailah suatu kesepakatan untuk menghentikan tembakan menembak dan permusuhan di kedua belah pihak, serta diumumkan bahwa seluruh tentara Inggris akan meninggalkan Indonesia paling lambat pada tanggal 30 Nopember 1946.⁸⁵

Selanjutnya perundingan mengenai teknis gencatan senjata diadakan, dan pada tanggal 1 Nopember 1946 Panglima Besar Jendral Sudirman menghadiri perundingan Panitia Gencatan Senjata di Jakarta. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan bersama tentang gencatan senjata, yaitu gencatan senjata antara tentara Sekutu dan tentara Indonesia yang akan di-

⁸³Samawi, op. cit., hal. 40; Nugroho Notosusanto, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981), hal. 116.

⁸⁴A.H. Nasution, TNI II op. cit., hal. 53; Samawi, loc. cit.

⁸⁵K.M.L. Tobing, op. cit., hal. 33.

mulai secepat mungkin; perintah lebih lanjut akan diberikan; segala sesuatu harus diusahakan untuk mencegah pertempuran.⁸⁶

Sementara itu dalam bidang politik, pada tanggal 1 Nopember 1946 Sjahrir mengadakan perundingan dengan pihak Belanda, tetapi bagaimana hasilnya dirahasiakan. Tampaknya Sjahrir telah memberikan suatu konsesi kepada Belanda, sehingga Belanda berniat melanjutkan perundingan.

Pada akhirnya Belanda menyadari bahwa peranan Presiden Sukarno dalam perundingan sangat penting, sebab kenyatannya ia adalah unsur utama yang diakui oleh rakyat maupun oleh para politisi Indonesia dalam memimpin revolusi Indonesia. Oleh sebab itu, pada tanggal 4 Nopember 1946 Pemerintah Belanda mencabut kembali keberatannya untuk mengikutsertakan Presiden Sukarno dalam perundingan.⁸⁷

Untuk menghindari kemacetan perundingan selanjutnya, maka perundingan akan diadakan di daerah kekuasaan Republik Indonesia, yaitu di Linggajati, Jawa Barat. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Nopember 1946 dan dengan peran aktif Presiden Sukarno, maka pada tanggal 12 Nopember 1946 dengan disaksikan Lord Killearn, kedua delegasi mencapai dasar-dasar persetujuan yang akan diparaf nanti di Jakarta.⁸⁸

Untuk menghindari interpretasi yang salah, kedua belah pihak sepakat menyusun hasil perundingan secara teratur pa-

⁸⁶ A.H. Nasution, Tentara ... II ..., hal. 57.

⁸⁷ Osman Raliby, op. cit., hal. 443; K.M.L. Tobing, op. cit., hal. 34.

⁸⁸ Susanto Tirtoprodjo, loc. cit.

sal demi pasal disesuaikan dengan maksud kedua belah pihak, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Belanda. Akhirnya pada tanggal 15 Nopember 1946 tersusunlah sebuah naskah persetujuan Linggajati yang berisi 17 pasal dengan diberi nama "Naskah Linggajati". Pada hari itu juga, Jum'at jam 18.10, tanggal 15 Nopember 1946 naskah persetujuan tersebut diparaf oleh kedua belah pihak. Ada pun isi pokok naskah itu ialah:

1. Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam bentuk Negara Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.⁸⁹

Penandatanganan naskah Linggajati dilakukan kedua delegasi di kediaman Sutan Sjahrir, Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Prof.Ir.W. Schermerhorn.

Agar mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka naskah Linggajati itu harus diajukan ke forum parlemen masing-masing negara untuk mendapat pengesahan. Naskah Linggajati merupakan hasil maksimal yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Setelah penandatanganan naskah Linggajati selesai, Komisi

⁸⁹Osman Raliby, op. cit., hal. 447; Susanto Tirtoprodjo, loc. cit.

Jendral kembali ke negeri Belanda untuk memberikan laporan serta meminta pengesahan hasil perundingan kepada pemerintah Belanda. Tetapi kenyataannya pemerintah Belanda tidak begitu saja menyetujui naskah Linggajati, bahkan Menteri Pertahanan Belanda, Panglima Angkatan Darat Jendral Kruls, Panglima Angkatan Laut Laksamana Helfrich menolak diadakannya pembatasan dalam bidang militer seperti yang sudah ditentukan dalam persetujuan Linggajati.⁹⁰

Naskah Linggajati menimbulkan pertentangan di kalangan rakyat Belanda, antara yang pro dan kontra Linggajati. Kelompok yang pro Linggajati adalah para buruh, golongan sendiliawan di lingkungan Perguruan Tinggi, para pemimpin surat kabar. Mereka mempunyai pandangan berdasarkan kejujuran, keadilan dan kemanusiaan yang tidak terikat kepada kepentingan tertentu. Akan tetapi sayangnya mereka tidak berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Sedangkan kelompok yang anti Linggajati adalah para pedagang dan tokoh-tokoh politik yang pernah duduk dalam pemerintahan. Mereka berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan serta berpandangan bahwa Linggajati membawa Belanda ke jurang kemiskinan.⁹¹ Dengan demikian persetujuan Linggajati yang diadakan oleh Komisi Jendral tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dapat diakui keabsahannya oleh pemerintah dan rakyat Belanda.

Menanggapi situasi seperti tersebut di atas, maka pada

⁹⁰K.M.L. Tobing, op. cit., hal. 18.

⁹¹Ibid., hal. 19-20; Samawi, op. cit., hal. 49.

tanggal 15 Desember 1946 pemerintah Belanda mengeluarkan pernyataan resmi mengenai sikapnya terhadap naskah perjanjian Linggajati.⁹² Pemerintah bersedia menyetujui naskah tersebut bila Komisi Jendral melengkapinya dengan suatu penafsiran tertulis, berdasarkan kerangka penugasan Komisi Jendral untuk memajukan hubungan hukum baru di Hindia Belanda, sesuai dengan isi dan makna pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Pemerintah juga mengatakan, karena kedua belah pihak mengakui bahwa Ratu mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara Uni Indonesia-Kerajaan Belanda, maka Ratu mempunyai wewenang untuk menentukan bentuk pemerintahan dalam kerangka hukum baru itu. Sedangkan mengenai masalah militer, pemerintah Belanda berpendapat bahwa kekuatan militer yang kuat sangat diperlukan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan yang akan diadakan di Indonesia itu.

Berkaitan dengan pendirian pemerintah tersebut, di depan sidang Parlemen pada tanggal 10 dan 19 Desember 1946, Menteri Seberang Lautan, Mr. Jonkman,⁹³ membuat penafsiran atas persetujuan Linggajati. Ada pun isinya bahwa selama waktu peralihan, tanggung jawab berada di tangan pemerintah Belanda dan Republik harus mengizinkan Belanda memakai alat kekuasaannya bila diperlukan. Republik harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan demokrasi dengan tiap-tiap bagian berhak berdiri di luar Republik. Dalam hal militer, ia men-

⁹² K.M.L. Tobing, *op. cit.*, hal. 21-22.

⁹³ Samawi, *loc. cit.*

lak diadakannya pengurangan pasukan sebelum ada jaminan keamanan.

Selanjutnya dalam sidang itu juga diterimalah mosi yang diajukan oleh Romme van der Goes van Naters yang isinya adalah, dewan menyetujui sikap pemerintah yang berusaha mencapai kerja sama Indonesia-Belanda berdasarkan isi pi-dato ratu pada tanggal 7 Desember 1942. Selain itu, dewan juga mengakui naskah Linggajati menurut penjelasan yang disusun oleh Komisi Jendral dengan memperhatikan semua keterangan Mr. Jonkman. Dengan demikian pada tanggal 20 Desember 1946, Tweede Kamer menerima naskah Linggajati.⁹⁴ Jelaslah, bahwa segala waktu dan usaha untuk mencapai persetujuan Linggajati dianggap sia-sia saja. Pemerintah Belanda dengan kelompok-kelompok yang masih ingin berkuasa di Indonesia, hanya ingin melihat status baru Indonesia dalam bentuk yang dikemukakan dalam usulnya tanggal 10 Februari 1946, suatu usul yang ditolak dari semula oleh pihak Republik.

Ketua delegasi Belanda Prof.Ir.W. Schermerhorn, menerima keputusan pemerintah Belanda, dan pada awal bulan Januari 1947 Komisi Jendral berangkat ke Indonesia untuk mendapatkan kepastian, bahwa pihak Indonesia bersedia menerima naskah Linggajati yang dilengkapi penafsiran yang dipersyaratkan Parlemen Belanda sebagai dasar pelaksanaan persetujuan Linggajati. Untuk keperluan itu pemerintah Belanda menugaskan

⁹⁴Ibid., hal. 50; Susanto Tirtoprodjo, op. cit., hal. 23.

Prof. Posthuma dan Prof. Versijl sebagai penasehat Komisi Jendral.⁹⁵

Delegasi Republik Indonesia menolak tegas untuk mengkaitkan penafsiran Belanda itu pada dokumen persetujuan Linggajati yang sudah diparaf. Pemerintah Republik Indonesia hanya bersedia berpegang pada naskah Linggajati yang telah diparaf pada tanggal 15 Nopember 1946, dan sekalipun Parlemen Belanda menolaknya, pemerintah Indonesia tetap akan mengajukannya pada sidang Komite Nasional Indonesia Pusat untuk diratifikasi.

Banyak hal yang dilakukan Belanda agar membuat bangsa Indonesia marah, sehingga menolak naskah Linggajati. Sehari sesudah penandatanganan naskah Linggajati, Belanda menyerang Bogor dan sekitarnya. Pada tanggal 24 Januari 1947 menyerang Krian dan Sidoarjo. Belanda ingin mempergunakan penolakan bangsa Indonesia terhadap naskah Linggajati sebagai alasan mereka untuk menggunakan kekuatan senjata. Hal itu terlihat dari usahanya meningkatkan persiapan militernya di Indonesia, dari 47.000 pada tahun 1946/1947 menjadi 91.000 pada triwulan pertama tahun 1947 dan mencapai 120.000 pada pertengahan tahun 1947.⁹⁶

Sementara itu di Indonesia, pengumuman naskah Linggajati menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan rakyat Indonesia.

⁹⁵K.M.L. Tobing, op. cit., hal. 34.

⁹⁶Ibid., hal. 151.

Golongan yang pro terhadap naskah Linggajati adalah partai-partai yang mendukung pemerintah, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesisindo), Partai Komunis Indonesia (PKI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Partai Tani, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik Indonesia, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia.⁹⁷ Sedangkan golongan yang menentang naskah Linggajati adalah pihak yang dari semula menentang kebijaksanaan diplomasi yang dijalankan Sjahrir. Pada tanggal 28 Nopember 1946 Partai Nasional Indonesia (PNI) menyatakan penolakan terhadap persetujuan Linggajati.⁹⁸ Pada tanggal 4 Desember 1946 pengurus besar Masyumi juga mengeluarkan pernyataan yang isinya menolak tegas terhadap persetujuan Linggajati.⁹⁹ Selanjutnya partai-partai yang menentang persetujuan tersebut yaitu Masyumi, PNI, Barisan Banten, Partai Wanita Rakyat, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat, Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), Angkatan Komunis Muda serta Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi; mereka semua mempersatukan diri pada tanggal 12 Desember 1946 dengan nama Benteng Republik.¹⁰⁰

Dengan demikian kedua kelompok itu memiliki pendirian

⁹⁷Samawi, loc. cit.

⁹⁸Osman Raliby, op. cit., hal. 462.

⁹⁹Ibid., hal. 467.

¹⁰⁰Ibid., hal. 468; Adam Malik, Mengabdi Republik Jilid II: Angkatan 45 (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hal. 176.

yang kontradiktif, tetapi sama-sama berkeinginan untuk mendapatkan hal yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Kelompok yang menentang naskah Linggajati berpendirian akan mengadakan perlawanan "hidup atau mati" tanpa menghiraukan pendapat dunia luar; mengusir penjajah. Sebaliknya pihak pemerintah beserta pendukungnya bertekad mempertahankan dan melaksanakan persetujuan Linggajati, agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat simpati dari dunia luar, suatu faktor yang ikut menentukan keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia.

Apabila pada tahun-tahun terdahulu, Persatuan Perjuangan menjadi motor penggerak oposisi terhadap setiap perundingan, maka kini Benteng Republik yang menggantikan peranan itu. Mereka bertindak sebagai penjaga gawang KNIP, dan bertekad untuk menolak naskah Linggajati bila Sjahrir mengajukannya ke hadapan sidang KNIP untuk meminta ratifikasi.

Situasi politik dalam negeri pada masa-masa itu dalam suhu yang cukup panas. Untuk mengatasi ketegangan yang timbul antara kedua golongan itu, maka dalam rangka menghadapi sidang pleno KNIP yang akan diadakan di Malang, Presiden Sukarno pada tanggal 29 Desember 1946 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946, tentang penyempurnaan KNIP dengan memperluas keanggotaannya. Atas dasar Peraturan Presiden tersebut Presiden Sukarno berwenang untuk menambah jumlah anggota KNIP dari 200 menjadi 514.¹⁰¹ Kebijakan itu dengan

¹⁰¹Ibid; Seperempat Abad..., hal.14-15.

sendirinya mendapat tentangan keras dari Benteng Republik.

Pihak Badan Pekerja KNIP sendiri juga menentang kebijaksanaan yang diambil Presiden Sukarno tersebut, hal ini tercetus lewat resolusi yang diajukan oleh Sartono (PNI) mengenai pembatalan Peraturan Presiden No. 6/1946. Partai Nasional Indonesia dan Masyumi mengusulkan Peraturan Presiden itu ditarik kembali, tetapi ditolak pemerintah dan sebagai gantinya diajukan sebagai rencana undang-undang pembatalan Peraturan Presiden No. 6/1946, atas dasar keberatan-keberatan yuridis, politis. Kedua partai tersebut tidak mau menerima Peraturan Presiden tersebut dengan alasan karena hal itu tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara.¹⁰²

Dalam sidang KNIP di Malang dari tanggal 25 Februari sampai 5 Maret 1947, terjadi perdebatan seru mengenai Peraturan Presiden No. 6/1946. Partai-partai yang mendukung pemerintah mengecam golongan yang menghendaki pembatalan Peraturan Presiden hanya mementingkan soal-soal yuridis, politis dan kepentingan partai. Presiden Sukarno sendiri dalam mengeluarkan Peraturan Presiden itu berdasarkan kenyataan bahwa dengan tumbuhnya partai-partai pada masa itu, maka susunan KNIP juga harus disesuaikan dengan menambah jumlah anggotanya, agar KNIP lebih representatif.¹⁰³ Selanjutnya dalam menanggapi keberatan-keberatan yuridis, politis

¹⁰²Ibid; Parada Harahap, Saat Bersedjarah (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1947), hal.30; K.M.L. Tobing, op. cit., hal. 39.

¹⁰³Ibid., hal. 40; Ahmaddani G. Martha, Christianto Wibisono, Yozar Anwar, op. cit., hal. 248.

yang diajukan golongan oposisi itu, ia dalam pidato pembukaan Sidang Pleno KNIP di Malang pada tanggal 25 Februari 1947 itu mengatakan bahwa, kondisi demokrasi di negara kita memang belum sempurna, dan sebelum diadakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat, Presidenlah yang mengangkat anggota-anggotanya karena ia yang menjadi wakil rakyat yang memegang kedaulatan. Presiden Sukarno juga mengatakan, bahwa dalam situasi revolusi seperti sekarang ini semangat persatuan bangsa harus dijaga dan kepentingan bangsa harus lebih diutamakan di atas kepentingan partai atau golongan.¹⁰⁴ Di lain pihak golongan yang menolak Peraturan Presiden menganggap tindakan Presiden itu adalah manipulasi pemerintah supaya persetujuan Linggajati dapat disahkan. Konfrontasi di dalam Sidang Pleno KNIP itu tak dapat dihindarkan lagi.

Perdebatan itu akhirnya dapat dilerai oleh Wakil Presiden yang mengikuti jalannya sidang. Pada hari ketiga Mohammad Hatta sebagai unsur dwitunggal, mengambil alih peran Sukarno sebagai kartu truf yang dibutuhkan oleh Sjahrir pada saat menghadapi krisis. Dalam kesempatan itu Hatta mengatakan kalau Peraturan Presiden No. 6/1946 ditolak, maka hanya ada dua pilihan, KNIP dibubarkan atau Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri.¹⁰⁵ Ancaman pengunduran diri dwitunggal itu melemahkan semangat Benteng Republik, dan mereka menghentikan perlawanannya terhadap Peraturan Presi-

¹⁰⁴Parada Harahap, op. cit., hal. 23-25; K.M.L. Tobing, loc. cit.

¹⁰⁵Parada Harahap, op. cit., hal. 55; Adam Malik, op. cit., hal. 177.

den No.6/1946. Hari itu juga pihak oposisi dan Badan Pekerja KNIP menarik kembali mosi keberatannya terhadap Peraturan Presiden No.6/1946.

Penambahan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang sebagian besar berasal dari golongan yang mendukung pemerintah, menjadikan pembicaraan dan pengesahan naskah Linggajati barjalan lancar. Pada tanggal 28 Februari 1947 naskah Linggajati diterima dan disahkan oleh sidang KNIP di Malang. Dengan demikian Sutan Sjahrir dapat melanjutkan kembali perundingannya dengan Belanda.¹⁰⁶

Sementara itu negara-negara luar sudah mulai bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Maret 1947 Konsul Jendral Mesir di India, Abdul Mun'im, yang bertindak atas nama Raja Farouk menghadap Presiden Sukarno di Yogyakarta untuk menyampaikan keputusan Liga Arab, yang isinya menganjurkan anggotanya untuk mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Pengakuan negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, Mesir, Libanon, Syria, Irak, Transyordania, Yaman, sangat besar artinya bagi perjuangan revolusi Indonesia saat itu.¹⁰⁷

Dengan diterima dan disahkannya naskah Linggajati oleh pemerintah Republik Indonesia serta adanya dukungan moral dari negara-negara Asia di luar Indonesia, menjadikan Belanda

¹⁰⁶ Muhammad Yamin, Sapta Dharma (Bukittinggi-Djakarta-Medan: N.V. Nusantara, 1950), hal. 47.

¹⁰⁷ Soejitno Hardjosoediro, Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hal. 96; Susanto Tirtoprodjo, op. cit., hal. 26.

da sadar akan posisinya. Maka pada tanggal 21 Maret 1947 pemerintah Belanda menginstruksikan kepada Komisi Jendral untuk menandatangani naskah Linggajati yang berdasarkan penafsiran Komisi Jendral, yang disusun tanpa melibatkan delegasi Indonesia dan dicocokkan dengan isi pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Perlu juga diketahui, bahwa sebenarnya dalam Komisi Jendral sendiri terjadi pertentangan mengenai penafsiran Linggajati. Hal itu berakibat anggota Komisi Jendral F. de Boer mengundurkan diri dari Komisi Jendral, karena ia tidak setuju dengan perubahan yang diadakan pada penjelasan naskah persetujuan Linggajati yang sudah disepakati oleh Komisi Jendral dan delegasi Republik Indonesia pada tanggal 15 Nopember 1946.¹⁰⁸

Belanda berkeras agar Republik Indonesia menerima tafsiran yang dibuat secara sepihak oleh Komisi Jendral atas naskah Linggajati, tetapi Republik juga menolaknya dengan tegas. Dengan demikian naskah Linggajati hanya merupakan kerangka suatu perjanjian yang mentah, sedangkan aturan pelaksanaannya masih harus diributkan. Selanjutnya dalam surat yang dikirim delegasi Republik Indonesia kepada Komisi Jendral dijelaskan, bahwa Republik Indonesia tidak menolak Belanda menafsirkan persetujuan yang dicapai berdasarkan penjelasan yang diberikan Menteri Jonkman pada tanggal 10, 19 dan 20 Desember 1946 di hadapan Parlemen Belanda. Akan tetapi sebaliknya Belanda juga harus menerima pendirian Republik

¹⁰⁸ K.M.L. Tobing, *op. cit.*, hal. 86.

yang tetap berpegang kepada penafsiran yang telah mereka sepakati pada tanggal 15 Nopember 1946, dan telah disahkan oleh KNIP serta pemerintah Republik Indonesia.¹⁰⁹

Demgan masing-masing tetap berpegang pada pendiriannya, akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 persetujuan Linggajati ditandatangani di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka Jakarta, sekalipun tanpa suatu ketentuan pelaksanaan yang mengikat kedua belah pihak. Anggota delegasi Indonesia yang menandatangani persetujuan Linggajati adalah Sutan Sjahrir, Mohammad Roem, S.H., Susanto Tirtoprodjo, S.H., dr.A.K. Gani. Sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Prof.Ir.W. Schermerhorn, Dr. H.J. van Mook dan Max van Poll.¹¹⁰

Tidak lama sesudah penandatanganan persetujuan Linggajati, pada tanggal 15 April 1947 Amerika menyatakan pengakuannya terhadap kekuasaan de facto Republik Indonesia. Kepercayaan Amerika yang dipandang sebagai pemimpin dunia serta dukungan negara-negara Asia lainnya, merupakan bahaya tersendiri bagi Belanda. Karena merasa bahwa kekuatan militernya sudah mapan, maka pihak Belanda mulai memaksakan kehendaknya kepada Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jendral memberikan nota ultimatum yang harus dijawab Republik Indonesia dalam tempo 14 hari, isinya yang terpenting adalah:

1. Membentuk pemerintahan bersama dan pemerintahan per-

¹⁰⁹Ibid., hal. 48.

¹¹⁰Republik Indonesia ..., hal. 203.

alihan yang terdiri dari Wakil Kerajaan dan wakil-wakil organisasi kenegaraan Indonesia, dengan wakil kerajaan sebagai pemegang kekuasaan de jure dan mempunyai hak khusus.

2. Pengaturan bersama dalam hubungan luar negeri.
3. Kerja sama militer untuk menjaga ketertiban dan keamanan (gendarmeri bersama).
4. Pengaturan bersama dalam masalah perekonomian.¹¹¹

Pemerintah Republik menyadari bahwa jawaban mereka atas nota ultimatum nanti akan sangat menentukan keadaan negara, oleh karenanya pemerintah Republik bertindak hati-hati. Pada tanggal 8 Juni 1947 Sjahrir membuat nota jawaban yang pada prinsipnya menerima tuntutan Belanda tersebut, tetapi menolak gendarmeri bersama dalam wilayah de facto Republik Indonesia.¹¹² Belanda tidak puas akan jawaban tersebut, dan menghendaki agar semua tuntutananya diterima.

Situasi semakin gawat, maka Sjahrir tidak punya pilihan lain sehingga pada tanggal 19 Juni 1947 ia membuat pidato radio dan pada tanggal 20 Juni 1947, ia mengirim surat kepada Komisi Jendral yang isinya menyetujui pembentukan pemerintahan peralihan dan mengakui kedudukan wakil kerajaan memiliki kekuasaan de jure dan hak khusus. Pengakuan Sjahrir tersebut menimbulkan kegoncangan politik di dalam negeri. PNI, Masyumi dan partai-partai pendukung pemerintah menolak pengakuan Sjahrir, dan menyatakan tidak percaya lagi padanya, sehingga pada tanggal 26 Juni 1947 Sjahrir meletakkan jabatan-

¹¹¹K.M.L. Tobing, op. cit., hal. 57; Samawi, op. cit., hal. 51.

¹¹²A.H. Nasution, Perjuangan ..., hal. 101.

nya.¹¹³

Pada hari itu juga Presiden Sukarno mengambil alih sepenuhnya kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan timbul, Jendral Sudirman memerintahkan agar semua anggota tentara dan seluruh rakyat Indonesia bersikap waspada.

Bagi Belanda sendiri, politik diplomasi yang akhirnya menghasilkan persetujuan Linggajati, sebenarnya hanyalah taktik semata agar ia mendapat kesempatan untuk mengkonsolidasikan kekuatan militernya. Hal ini akan nyata pada tindakannya beberapa waktu mendatang Belanda melakukan agresi militer, untuk mempertahankan kepentingannya di Indonesia.

Demikianlah, Sjahrir yang telah mengendalikan jalannya pemerintahan selama tiga periode berturut-turut itu harus meletakkan jabatannya, untuk kemudian merelakan kedudukannya diisi oleh pemimpin Indonesia lainnya. Selanjutnya pada bagian akhir dari Skripsi ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan uraian pada bab-bab pendahuluan, serta akan memuat beberapa lampiran yang diperlukan untuk memperjelas persoalan-persoalan yang bersangkutan.

¹¹³Ibid; K.M.L. Tobing, op. cit., hal. 74; Samawi, op. cit., hal. 55.

BAB V

KESIMPULAN

Uraian tentang oposisi Tan Malaka terhadap Kabinet Sjahrir periode tahun 1945-1947 adalah suatu obyek permasalahan yang luas dan kompleks. Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang pada prinsipnya untuk memperjelas dan mengurangi perbedaan penafsiran di antara para pembaca yang berkepentingan.

Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah produk perjuangan bangsa Indonesia. Suatu hal yang tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh bangsa Indonesia adalah kenyataan bahwa Belanda dapat ditaklukkan oleh bangsa Jepang dalam waktu yang relatif singkat. Pendudukan Jepang di Indonesia tidak lama, sebab pada bulan Agustus 1945 Jepang harus menyerah kepada tentara Sekutu. Kekalahan Jepang telah menciptakan suasana revolusioner bagi pergerakan rakyat Indonesia. Pada saat Jepang sudah menyerah kepada Sekutu sementara tentara Sekutu belum tiba di Indonesia itu, digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Kedatangan Sekutu yang diboncengi tentara NICA, memecah rakyat Indonesia menjadi dua golongan yang masing-masing mempunyai prinsip dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Revolusi nasional pada waktu itu diwarnai pertentangan paham antara pemerintah dengan para politisinya yang mengutamakan cara diplomasi untuk menghadapi Belanda, dan golongan revolusioner di luar pemerintah yang menentang ke-

bijaksanaan diplomasi Kabinet Sjahrir. Dalam situasi itu Tan Malaka tampil sebagai tokoh pemersatu golongan revolusioner yang tidak segaris dengan kebijaksanaan Kabinet Sjahrir.¹

Kedua, sejarah mencatat Tan Malaka seorang komunis, suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri. Ia pernah memimpin Perguruan Rakyat di bawah naungan PKI dan berhasil; sehingga ia diangkat sebagai ketua PKI. Selama bertahun-tahun hidup di pengasingan ia pernah dicalonkan menjadi anggota Partai Komunis Belanda, serta menjadi anggota Komintern yang bertugas mengkoordinasi perjuangan kaum buruh di kawasan Asia dan Pasific. Akan tetapi komunis Tan Malaka bukan komunis sembarangan, melainkan ia juga seorang pejuang militan yang memiliki daya pikir kreatif.

Kemampuannya untuk berpikir kreatif itulah yang menjadikan komunisnya Tan Malaka lain dari yang lain. Pengalaman hidupnya selama di perantauan membentuk jiwanya menjadi seorang komunis, di samping itu sebelumnya dalam diri Tan Malaka sudah mengalir darah nasionalis. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang saat itu hidup sebagai bangsa terjajah, menjadikan semangat nasionalis dalam dirinya bangkit untuk berusaha melepaskan diri dan bangsanya dari belenggu penjajah. Pengembaraannya ke berbagai penjuru dunia sebagai orang yang diasingkan dari masyarakatnya sendiri, serta pengalamannya hidup di tengah-tengah masyarakat yang tertindas menjadikan darah nasionalis dan komunis dalam dirinya mengalir semakin kuat. Nasionalisme dan komunisme yang berpadu dalam diri Tan Malaka menjadikan seluruh hidupnya diabdikan untuk

berjuang memerangi kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, fasisme serta feodalisme yang menjadikan rakyat melarat tertindas sepanjang hidupnya.

Sebagai seorang komunis, ia bukanlah seorang yang hanya menjiplak langsung begitu saja dogma-dogma maupun ajaran-ajaran komunis atau sosialis yang ditulis para pemikir Dunia Barat. Ia mempelajari cara berpikir Dunia Barat lewat buku-buku yang dibacanya, untuk diolahnya kembali dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi kongkrit rakyat Indonesia. Kemampuannya berpikir mendukung penampilannya dalam kancah politik, sehingga ia menjadi seorang yang berprinsip dan berwatak mandiri yang disegani, sekaligus menjadikannya memiliki banyak musuh yang sebenarnya tidak diharapkannya.

Pengembaraan fisik Tan Malaka diimbangi dengan pengembangan mental (pemikiran), hal itu menjadikannya seorang pejuang sekaligus pemikir. Pengalaman dalam perantauannya sebagai buronan politik yang banyak diwarnai penderitaan dan kecemasan hidup semakin mematangkan dan mendewasakan dirinya, baik sebagai politisi, pemikir maupun pejuang revolusioner yang kesepian.

Ketiga, dalam garis perjuangan politik, Tan Malaka selalu berpihak kepada kepentingan rakyat yang tertindas. Oleh karena itu sebagai bangsa Indonesia, ia merasa terpanggil untuk ikut berjuang membela rakyat Indonesia yang sedang ditindas penjajah Belanda. Hal itulah yang membuatnya bersikap menentang kebijaksanaan diplomasi pemerintah yang diumumkan Perdana Menteri Sjahrir, dan bertekad mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia.

Terhadap diplomasi itu sendiri, sebenarnya Tan Malaka tidak menolak. Ia menyetujui diplomasi yang memang menjadi bagian dari perjuangan politik; hanya ia mengajukan syarat sebelum mulai berdiplomasi. Ada pun syarat yang mutlak harus dipenuhi itu ialah, supaya yang menjadi lawan berdiplomasi mengakui terlebih dahulu hak menentukan nasib sendiri yang telah dipakai bangsa Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan pendirian Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanpa adanya syarat itu sama saja berunding dengan perampok yang sudah mengepung kita dengan bersenjata lengkap yang setiap saat dapat memaksakan kehendaknya. Baginya berunding dengan musuh tidak ada gunanya dan hanya melemahkan semangat revolusi rakyat Indonesia saja.

Ada pun bentuk perjuangan yang paling cocok dengan bangsa Indonesia masa itu menurutnya adalah melalui cara massa-aksi. Untuk mencapai cara itu, seluruh rakyat Indonesia yang tertindas baik kaum buruh, pedagang kecil, petani kecil serta rakyat Indonesia lainnya harus bersatu padu membentuk satu front perjuangan bersama, sebagai kekuatan revolusi untuk mengusir penjajah. Dalam waktu yang relatif singkat ia berhasil menyatukan organisasi dan badan-badan perjuangan ke dalam satu wadah bernama Persatuan Perjuangan.

Keempat, oposisi Persatuan Perjuangan yang mendapat dukungan kalangan militer di bawah pimpinan Jendral Sudirman, mampu memberi tekanan yang efektif kepada pemerintah. Semangat kemerdekaan yang ditekankan Persatuan Perjuangan dan tujuan mencapai kemerdekaan 100% itulah yang membuat Jendral Sudirman memberi dukungan kepada front perjuangan itu.

kian ide revolusi total Tan Malaka kandas di tengah jalan. Kurun waktu yang sempit tidak memungkinkan Tan Malaka menyusun organisasi yang kuat untuk sebuah front perjuangan. Dalam waktu yang singkat itu ia tidak mungkin menyusun kader-kader sebagai tenaga penggerak, serta memilih tenaga organisator yang sangat diperlukannya.

Kegagalan Tan Malaka dalam mewujudkan idenya itu hendaknya tidak mengurangi rasa hormat kita kepadanya, sebab kenyataannya ia juga diakui pemerintah sebagai pahlawan nasional bagi bangsa Indonesia. semangat juangnya untuk lepas dari segala bentuk penjajahan dan mencapai "merdeka 100%", serta ajarannya untuk berpikir dan berbuat sesuai dengan situasi maupun kondisi kongkrit adalah patut kita teladani dan amalkan dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adam Malik

1978 Mengabdikan Republik Indonesia Jilid II: Angkatan 45.
Jakarta: Gunung Agung.

1956 Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Djakarta: Widjaja.

Ahamad Subardjo Djoyoadisuryo

1978 Kesadaran Nasional. Jakarta: Gunung Agung.

1977 Lahirnya Republik Indonesia. Bandung: P.T. Kinta.

Adam, Cindy, terj.

1966 Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat Indonesia, oleh Abdul Bar Salim. Djakarta: Gunung Agung.

Anderson, Ben, terj.

1988 Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, oleh Jiman Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan.

Amrin Imran

1967 Perebutan-perebutan Kekuasaan Menegakkan Republik Indonesia 1945. Djakarta: Lembaga Sedjarah Hankam.

Ahmaddani G. Martha, Christianto Wibisono, Yozar Anwar

1985 Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta: Kurnia Esa.

Alfian

1978 "Tan Malaka Pejuang Revolusioner yang Kesenian", dalam Manusia dalam Kemelut Sejarah, Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae. Jakarta: LP3ES.

Gottschalk, Louis, terj.

1980 Mengerti Sejarah, oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Harahap, Parada

1947 Saat Bersedjarah. Djakarta: Kementerian Penerangan.

Iwa Kusumasumantri

t.t. Sedjarah Revolusi Indonesia Masa Revolusi Bersenjata Jilid II. t.p.

Kahin, George McT., terj.

1980 Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

Mohammad Roem

1970 Pentjulikan Proklamasi dan Penilaian Sedjarah. Djakarta: Hudaya.

- Mohammad Hatta
1969 Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Djakarta: Tintamas.
- Muhammad Yamin
1952 Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Djakarta: Djambatan.
- 1950 Sapta Dharma. Bukittinggi-Djakarta-Medan: N.V. Nusantara.
- Moedjanto, G.
1977 "Perundingan Pendahuluan antara Indonesia-Belanda dan Perundingan Hoge Veluwe", dalam Seri Pembinaan Pengajaran Sejarah Seri VI No. 2. Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Geografi Sosial, IKIP Sanata Dharma.
- Nasution, A.H.
1963 Tentara Nasional Indonesia I. Bandung-Djakarta: Gana-co N.V.
- 1968 Tentara Nasional Indonesia II. Djakarta: Seruling Masa.
- 1964 Sedjarah Perjuangan di Bidang Bersendjata. Djakarta: Mega Bookstore.
- 1977 Sekitar Perang Kemerdekaan III. Bandung : Angkasa.
- Nugroho Notosusanto
1983 Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik. Jakarta: P.N. Balai Pustaka.
- 1983 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Osman Raliby
1953 Documenta Historica. Djakarta: Bulan Bintang.
- Poeze, Harry A., terj.
1988 Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik I. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Radik Utoyo Sudiro
1976 Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950, dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan. Jakarta: CV. Alda.
- 1953 Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta. Jogjakarta: Kementerian Penerangan.
- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poepponegoro, Nugroho Notosusanto, ed.
1976 Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soeharto
1982 Saksi Sejarah. Jakarta: Gunung Agung.

- Sidik Kertapati
1961 Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Djakarta: Jajasan
Pembaruan.
- Suyatno
1985 "Timbul dan Perkembangan Nasionalisme Indonesia", da-
lam Basis No. 1-12, Vol. XXXIV. Yogyakarta: Yayasan
B.P. Basis.
- Soebadio Sastrosatomo
1987 Perjuangan Revolusi. Jakarta: Sinar Harapan.
1970 Seperempat Abad DPR RI. Djakarta: Sekretariat DPR GR.
- Simatupang, T.B.
1954 Pelopop dalam Perang Pelopor dalam Damai. Djakarta:
Jajasan Pustaka Militer.
- Samawi
1970 25 Tahun Merdeka. Jogjakarta: Kedaulatan Rakjat.
- Sutan Sjahrir
1945 Perdjoeangan Kita. Djakarta: Pertjetakan Rakjat.
- Slamet Mulyana
t.t. Nasionalisme sebagai Modal Perdjjuangan Bangsa Indone-
sia. Djakarta: Balai Pustaka.
- Susanto Tirtoprodjo
1963 Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia. Djakarta: P.T.
Pembangunan.
- Soejitno Hardjosoediro
1987 Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan. Jakarta: Balai
Pustaka.
- Tan Malaka
1948 Gerilja Politik Ekonomi. Djakarta: Jajasan Massa.
- 1980 Dari Pendjara ke Pendjara I. Jakarta: Yayasan Massa.
- 1980 Dari Pendjara ke Pendjara II. Jakarta: Yayasan Massa.
- t.t. Dari Pendjara ke Pendjara III. Jakarta: Yayasan Massa.
- 1987 Muslihat. Jakarta: Yayasan Massa.
- Tobing, K.M.L.
1986 Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati. Ja-
karta: Gunung Agung.
- Wawancara Mohammad Hatta dengan Yasni
1979 Bung Hatta Menjawab. Jakarta: Gunung Agung.
- Yap Tjwan Bing
1988 Meretas Jalan Kemerdekaan. Jakarta: PT. Gramedia.

B. Koran dan Majalah

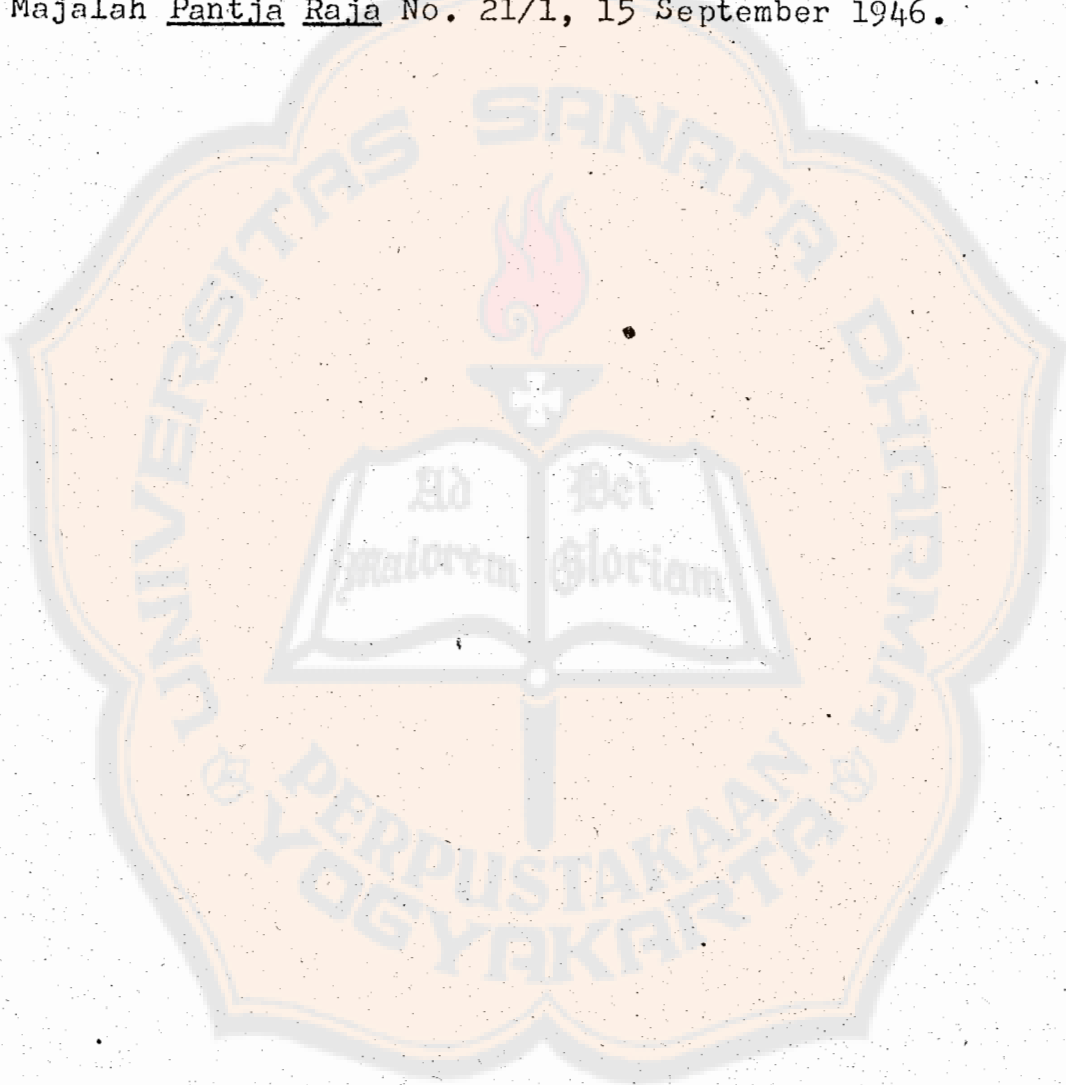
Kompas, 15 Agustus 1983.

Lasjkar, 8 Oktober 1946.

Lasjkar, 20 Oktober 1946.

Majalah Revue Indonesia No. 21, th. 1946.

Majalah Pantja Raja No. 21/1, 15 September 1946.



LAMPIRAN



Lampiran: A.

SUSUNAN KABINET SJAHRIR I
(14 Nopember 1945-28 Februari 1946)*

1. Perdana Menteri: Sutan Sjahrir..
2. Menteri Luar Negeri: Sutan Sjahrir.
3. Menteri Dalam Negeri: Sutan Sjahrir.
4. Menteri Keamanan Rakyat: Amir Sjarifuddin, S.H.
5. Menteri Penerangan: Amir Sjarifuddin, S.H.
6. Menteri Keuangan: Sunario Kolopaking, S.H.
7. Menteri Pendidikan: Dr. T.G.S. Moelia, S.H.
8. Menteri Kehakiman: Soewandi, S.H.
9. Menteri Sosial: dr. Adjidarmo Tjokronegoro.
10. Menteri Kesejahteraan: Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo.
11. Menteri Kesehatan: dr. Darmasetiawan.
12. Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Putuhena.
13. Menteri Perhubungan: Ir. Abdul Karim.
14. Menteri Negara: H. Rasjidi.

*Sumber: Osman Raliby, Documenta Historica (Djakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 94-95.

Lampiran : B.

SUSUNAN KABINET SJAHRIR II
(12 Maret 1946-28 Juni 1946)*

1. Perdana Menteri : Sutan Sjahrir.
2. Menteri Luar Negeri : Sutan Sjahrir; Menteri Muda : Haji Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : dr. Sudarsono; Menteri Muda : R. Samadikun.
4. Menteri Kesehatan : dr. Darmasetiawan; Menteri Muda : dr. J. Leimena.
5. Menteri Keuangan : Ir. R. M. P. Soerachman Tjokroadisoerjo; Menteri Muda : R. Sjafruddin Prawiranegara, S.H.
6. Menteri Perdagangan dan Industri : Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo; Menteri Muda : Sjamsu Harja Udaja.
7. Menteri Pertanian dan Persediaan : Ir. Baginda Zainuddin Rasad; Menteri Muda : Ir. R. Saksono Prawirohardjo.
8. Menteri Pertahanan : Amir Sjarifuddin, S.H; Menteri Muda : Arudji Kartawinata.
9. Menteri Kehakiman : R. Soewandi, S.H; Menteri Muda : R. Hadi, S.H.
10. Menteri Pengajaran : Mohammad Sjafa'i; Menteri Muda : dr. Toedoenggelar Soetan Goenoeng Moelia, S.H.
11. Menteri Penerangan (ad interim) : Mohammad Natsir.
12. Menteri Sosial : R. A. Maria Ulfah Santoso Wirohardjo, S.H; Menteri Muda : Abdulmadjid Djojoadingrat, S.H.
13. Menteri Agama (ad interim) : H. Rasjidi.
14. Menteri Perhubungan : Ir. Abdul Karim; Menteri Muda : Ir. R. Djuanda.
15. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Putuhena; Menteri Muda : Ir. Herling Laoh.
16. Menteri Negara (Urusan Pemuda) : Wikana.

*Sumber: Osman Raliby, Documenta Historica (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 275-276.

Lampiran: C.

SUSUNAN KABINET SJAHRIR III
(2 Oktober 1946-26 Juni 1947)*

1. Perdana Menteri: Sutan Sjahrir.
2. Menteri Luar Negeri: Sutan Sjahrir; Menteri Muda: Haji Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri: Mohammad Roem, S.H; Menteri Muda: Njono.
4. Menteri Kehakiman: Susanto Tirtoprodjo, S.H; Menteri Muda: Hadi, S.H.
5. Menteri Keuangan: Sjafruddin Prawiranegara, S.H; Menteri Muda: Loekman Hakim, S.H.
6. Menteri Kemakmuran: dr. A.K. Gani; Menteri Muda: Joesoef Wibisono, S.H.
7. Menteri Kesehatan: dr. Darmasetiawan; Menteri Muda: dr.J. Leimena.
8. Menteri Pengajaran/Pendidikan/Kebudayaan: Soewandi, S.H; Menteri Muda: Ir. Goenarso.
9. Menteri Sosial: Maria Ulfah Santoso, S.H; Menteri Muda: Abdulmadjid Djojoadingrat, S.H.
10. Menteri Agama: H. Fatoerrachman.
11. Menteri Pertahanan: Amir Sjarifuddin, S.H; Menteri Muda: Harsono Tjokroaminoto.
12. Menteri Penerangan: Mohammad Natsir; Menteri Muda: A.R. Baswadan.
13. Menteri Perhubungan: Ir. Djoeanda; Menteri Muda: Setia-djid.
14. Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Putuhena; Menteri Muda: Ir.H. Laoh.
15. Menteri Negara: Sultan Hamengku Boewono.
Wachid Hasjim.
dr. Sudarsono.
Tan Po Gwan, S.H.

*Sumber: Lasjkar, 2 Oktober 1946.

Lampiran: D.

DAFTAR DEWAN PIMPINAN POLITIK DAN KEMENTERIAN NEGARA
YANG DIUSULKAN JENDRAL SUDARSONO
DALAM PERISTIWA 3 JULI 1946*

A. Dewan Pimpinan Politik

Anggota Dewan Pimpinan Politik adalah:

Buntaran Martoatmodjo, Budhiarto Martoatmodjo, Chaerul Saleh, Gatot, Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Yamin, Subardjo, Sunarjo, Tan Malaka, Wachid Hasjim.

B. Kementerian Negara

Anggota Kementerian Negara adalah:

Menteri Luar Negeri: Subardjo.
Menteri Dalam Negeri: Budyarto.
Menteri Pertahanan: akan disiarkan.
Menteri Kehakiman: Supomo.
Menteri Kemakmuran: Tan Malaka.
Menteri Agama: Wachid Hasjim.
Menteri Sosial: Iwa Kusuma Sumantri.
Menteri Bangunan Umum: Abikusno Tjokrosujoso.
Menteri Keuangan: A.A. Maramis.
Menteri Kesehatan: Buntaran Martoatmodjo.
Menteri Penerangan dan Penjiaran: Muhammad Yamin.
Menteri Pengajaran: Ki Hajar Dewantoro.
Menteri Perhubungan: Roeseno.

C. Mentari-Menteri Negara

Anggota menteri-menteri negara adalah:

Chaerul Saleh, Fatoerrachman, Gatot, Kartono, Patty, Sukiman, Sunarjo, Sartono, Samsu H. Udaja, Muhammad Saleh, Djody, Kartodiwirjo, Sukarni.

*Sumber: Osman Raliby, Documenta Historica (Djakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 342-343.

Lampiran: E.

NASKAH PERSETUDJUAN

Pemerintah Belanda, dalam hal ini berwakilkan Komisi Djen-deral dan pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia.

Oleh karena mengandung keinginan jang ichlas hendak menetapkan perhubungan jang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan tjara dan bentuk bangun jang baru, bagi kerdja-bersama dengan suka rela, jang merupakan djaminan sebaik-baiknya bagi kemadjuan jang bagus, serta dengan kukuh-teguhkan daripada kedua negeri itu, didalam masa datang, dan jang membukakan djalan kepada kedua belah pihak atas dasar-dasar jang baru, menetapkan mufakat seperti berikut, dengan ketentuan akan mengandjurkan persetudjuan ini selekas-lekasnja untuk memperoleh kebenaran daripada madjelis-madjelis perwakilan rakjatnja masing-masing.

Pasal 1.

Pemerintah Belanda mengakui kenjataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Djawa, Madura dan Sumatera.

Ada pun daerah-daerah jang diduduki oleh tentara Serikat atau Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerdja-bersama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam Daerah Republik. Untuk menjelenggarakan jang demikian itu maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan jang perlu-perlu, supaja selambatnja pada waktu jang disebutkan dalam pasal 12, termaksudnja daerah-daerah jang tersebut itu telah selesai.

Pasal 2.

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menjelenggarakan segera berdirinja sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, jang berdasarkan perserikatan jang dinamai Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3.

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia-Belanda seluruhnja, dengan ketentuan, bahwa djika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah setelah dimusjawatkan dengan lain-lain bagian daerah pun djuga, menjatakan menurut aturan demokratis, tidak atau belum suka masuk ke dalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk daerah itu bolehlah diwujudkan sematjam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Keradjaan Belanda.

Pasal 4.

(1) Ada pun negara-negara jang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo dan Timur-Besar, jaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, untuk menjatakan kehendaknja, menurut aturan demokratis, supaja kedudukannja dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan tjara lain.

(2) Dengan tidak menjalahi ketentuan di dalam pasal tadi dan di dalam ayat ke-1 pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinja.

Pasal 5.

(1) Undang-undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat ituditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk n negara, jang akan didirikan daripada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil Sekutu lain-lain jang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, jang wakil-wakil itu ditundjukkan dengan djalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat jang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang tjara turut-tjampurnja dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia oleh daerah-daerah jang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk jang tidak ada atau tidak tjukup perwakilanja, segala itu dengan mengingat tanggung-djawab daripada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Pasal 6.

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia akan bekerdja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia jang terbentuknja itu keradjaan Belanda, jang meliputi Negeri Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curaçao, ditukar sifatnja mendjadi persekutuan itu, jang terdiri pada satu Belanda, Suriname dan Curaçao dan pada pihak lainnja daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Jang tersebut di atas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan dengan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curaçao satu dengan lainnja.

Pasal 7.

(1) Untuk membela-peliharakan kepentingan jang tersebut di dalam pasal di atas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat, mungkin djuga oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat negara-negara itu.

(3) Ada pun jang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerdja-bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan, dan seberapa perlu keuangan, serta djuga hal-hal ekonomi dan kebudajaan.

Pasal 8.

Diputjuk Persekutuan Belanda-Indonesia itu duduklah Radja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Radja.

Pasal 9.

Untuk membela-pelihara kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda, dan kepentingan-kepentingan Keradjaan Belanda di Indonesia, maka Pemerintah masing-masingnya kelak mengangkat Komisaris.

Pasal 10.

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung djuga ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Pertanggungan hak-hak kedua belah pihak jang satu terhadap jang lain dan djaminan-djaminan kepastian kedua belah pihak menetapi kewadjiban-kewadjiban jang satu kepada jang lain.
- b. Hal kewarga-negara untuk warga negara Belanda dan warga negara Indonesia, masing-masing di daerah lainnja;
- c. aturan tjara bagaimana menjelesaikannja, apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat ditjapai semufakat;
- d. aturan tjara bagaimana dan dengan sjarat-sjarat apa alat-alat kelengkapan Keradjaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak ada atau kurang tjukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri;
- e. pertanggungan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, jang dimaksudkan djuga oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11.

(1) Anggar-anggar itu akan direntjanakan kelak oleh suatu permusjawaratan antara wakil-wakil Keradjaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat jang hendak dibentuk itu.

(2) Anggar-anggar itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat kedua belah pihak masing-masingnya.

Pasal 12.

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Djanuari 1949.

Pasal 13.

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaya, setelah terbentuknja Persekutuan Belanda-Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima mendjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14.

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak-hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka jang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka jang lagi berada di dalam daerah kekuasaannja de facto. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menjeenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 15.

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susun-

annja dan tjara bekerdjanja seboleh-bolehnja sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk-susunan menurut hukum negara, jang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaja dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, agar supaja sementara menantikan berwujudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Keradjaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16.

Dengan segera setelah persetudjuan ini mendjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan balatentaranja masing-masing. Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang sampai seberapa dan lambat-tjepatnja melakukan pengurangan itu; demikian djuga tentang kerdja-bersama dalam hal ketentaraan.

Pasal 17.

(1) Untuk kerdja-bersama jang dimaksudkan dalam persetudjuannini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, jang terdiri daripada delegasi-delegasi jang ditundjukkan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnja, dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetudjuan ini, jang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi jang tersebut itu, akan menjerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itumpersidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, jang diangkat dengan semufakat antara dua pihak delegasi itu, atau, djika tidak berhasil semufakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.



Sumber: Samawi, 225 Tahun Merdeka (Jogjakarta: Kedaulatan Rakjat, 1970), hal.42-48.